



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA JAMBI

TAHUN 2019





DR. H. SYARIF FASHA, ME

WALIKOTA JAMBI

DR. dr. H. MAULANA, MKM

WAKIL WALIKOTA JAMBI





WALIKOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Tahun 2019 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019 ini sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang. Untuk itu patut kiranya kita semua terus memperkuat komitmen pembangunan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, instansi vertikal, masyarakat, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kedepannya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	I-1
1.2. Gambaran Umum Daerah	I-3
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah.....	I-3
1.2.2. Gambaran Umum Demografis.....	I-4
1.2.3. Kondisi Ekonomi	I-5
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1. Visi dan Misi	II-1
2.2. Tujuan dan Sasaran	II-3
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-8
2.3.1. Strategi Pembangunan Daerah	II-8
2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	II-12
2.4. Prioritas Pembangunan Daerah	II-21
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-3
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-4
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-5
3.1.3. Permasalahan dan Solusi.....	III-10
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-11
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	III-11
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja	III-11
3.2.3. Permasalahan dan Solusi	III-14
3.3. Pembiayaan Daerah	III-14
 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
4.1. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	IV-1
4.1.1. Urusan Wajib.....	IV-1
4.1.1.1. Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1.2. Urusan Kesehatan	IV-3
4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	IV-6
4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	IV-7
4.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	IV-9
4.1.1.6. Urusan Sosial.....	IV-13
4.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja.....	IV-14
4.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV-16
4.1.1.9. Urusan Pangan	IV-17
4.1.1.10. Urusan Lingkungan Hidup	IV-19
4.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-23

4.1.1.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-26
4.1.1.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-27
4.1.1.14. Urusan Perhubungan.....	IV-29
4.1.1.15. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-30
4.1.1.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-32
4.1.1.17. Urusan Penanaman Modal.....	IV-35
4.1.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga.....	IV-36
4.1.1.19. Urusan Kebudayaan	IV-38
4.1.1.20. Urusan Perpustakaan	IV-38
4.1.1.21. Urusan Kearsipan	IV-39
4.1.2. Urusan Pilihan.....	IV-40
4.1.2.1. Urusan Pariwisata.....	IV-40
4.1.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV-41
4.1.2.3. Urusan Pertanian	IV-43
4.1.2.4. Urusan Perdagangan.....	IV-45
4.1.2.5. Urusan Perindustrian	IV-47
4.1.3. Urusan Penunjang.....	IV-48
4.1.3.1. Inspektorat	IV-48
4.1.3.2. Perencanaan.....	IV-50
4.1.3.3. Keuangan.....	IV-51
4.1.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	IV-55
4.1.4. Urusan Pendukung.....	IV-57
4.1.4.1. Sekretariat Daerah.....	IV-57
4.1.4.2. Sekretariat DPRD	IV-58
4.1.5. Urusan Kewilayahan	IV-60
4.1.5.1. Kecamatan	IV-60
4.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi.....	IV-63
4.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Jambi	IV-63
4.2.2. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi.....	IV-63
4.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	IV-66
4.4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Tahun 2018 Lalu	IV-67

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama antar Daerah dan Dengan Pihak Ketiga	VI-1
6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan.....	VI-1
6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	VI-1
6.2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI-16
6.3. Pembinaan Batas Wilayah	VI-17
6.4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	VI-18

6.5.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.....	VI-20
6.5.1.	Gangguan Yang Terjadi	VI-20
6.5.2.	OPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum	VI-20
6.5.3.	Penanggulangan dan Kendalanya	VI-21
6.5.4.	Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	VI-22

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN I Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Daftar

**LAMPIRAN II Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Jambi pada
Tahun 2019**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel.1.1	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019	I-4
Tabel.1.2	Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Kelompok Usia Tahun 2015-2019	I-5
Tabel 1.3	Kontribusi PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Jambi (persen)	I-6
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (persen).....	I-7
Tabel 1.5	PDRB Per Kapita Kota Jambi Tahun 2015-2019.....	I-8
Tabel 1.6	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Jambi Tahun 2019	I-9
Tabel 1.7	Komoditas Penyumbang Deflasi Kota Jambi Tahun 2019	I-10
Tabel 1.8	Nilai inflasi rata-rata Kota Jambi Tahun 2014 s.d 2019	I-10
Tabel 2.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi.....	II-5
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi.....	II-9
Tabel 2.3	Arah Kebijakan	II-13
Tabel 3.1.	Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	III-4
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-5
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 dengan TA 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-7
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 dengan TA 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-8
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-8
Tabel 3.6.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.....	III-12
Tabel 3.7.	Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019	III-13
Tabel 3.8.	Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019	III-13
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019.....	III-14
Tabel 4.1	Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-1
Tabel 4.2	Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-3
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan pada Tahun 2019 ..	IV-4
Tabel 4.4	Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-6
Tabel 4.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPUPR Kota Jambi pada Tahun 2019	IV-6
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.7	Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-9

Tabel 4.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2019	IV-10
Tabel 4.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019	IV-10
Tabel 4.10	Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-13
Tabel 4.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Tahun 2019.....	IV-13
Tabel 4.12	Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-14
Tabel 4.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2019	IV-15
Tabel 4.14	Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-16
Tabel 4.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019	IV-16
Tabel 4.16	Prestasi DPMPPA Kota Jambi pada Tahun 2019	IV-17
Tabel 4.17	Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-18
Tabel 4.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pangan pada Tahun 2019....	IV-18
Tabel 4.19	Keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-19
Tabel 4.20	Rekapitulasi Luas dan Lokasi Ruang terbuka Hijau di Kota Jambi.....	IV-21
Tabel 4.21	Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-23
Tabel 4.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-23
Tabel 4.23	Data Realisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-25
Tabel 4.24	Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-27
Tabel 4.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2019.....	IV-27
Tabel 4.26	Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-28
Tabel 4.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi pada Tahun 2019	IV-29
Tabel 4.28	Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-31
Tabel 4.29	Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-31
Tabel 4.30	Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-33
Tabel 4.31	Keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	IV-35
Tabel 4.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-35
Tabel 4.33	Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	IV-37
Tabel 4.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-37

Tabel 4.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2019.....	IV-39
Tabel 4.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2019 ..	IV-40
Tabel 4.37	Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-41
Tabel 4.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019	IV-42
Tabel 4.39	Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	IV-45
Tabel 4.40	Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	IV-47
Tabel 4.41	Keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 ...	IV-49
Tabel 4.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2019 ...	IV-49
Tabel 4.43	Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-50
Tabel 4.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019.....	IV-50
Tabel 4.45	Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-52
Tabel 4.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2019.....	IV-52
Tabel 4.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019.....	IV-53
Tabel 4.48	Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-55
Tabel 4.49	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-56
Tabel 4.50	Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	IV-57
Tabel 4.51	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi pada Tahun 2019.....	IV-57
Tabel 4.52	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2019.....	IV-59
Tabel 4.53	Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023...	IV-61
Tabel 4.54	Realisasi Anggaran Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2019.....	IV-61
Tabel 4.55	Pagu Anggaran Belanja seluruh Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2019.....	IV-62
Tabel 4.56	Capaian IKU RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019	IV-63
Tabel 4.57	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019	IV-64
Tabel 4.58	Tanggapan atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2018 Lalu.....	IV-67
Tabel 6.1	<i>Memorandum Of Undersranding</i> dan Perjanjian Kerja Sama yang Ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan Pihak Ketiga Selama Periode Tahun 2019	VI-2
Tabel 6.2	Kegiatan yang Dilaksanakan secara Bersama-sama dengan Instansi Vertikal.....	VI-16
Tabel 6.3	Kejadian Kebakaran Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi	VI-18
Tabel 6.4	Perbandingan Kejadian Kebakaran Tahun 2018 dan Tahun 2019	VI-20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi serta Nasional	I-8
Gambar 1.2 Grafik Laju Inflasi Kota Jambi 2017-2019	I-9
Gambar 3.1 Persentasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2019	III-6
Gambar 3.2. Capaian Target Hasil Dana Perimbangan Pemerintah Kota Jambi T.A 2019.....	III-7
Gambar 3.3 Persentase Realisasi Pendapatan Kota Jambi T.A 2019	III-9
Gambar 3.4 Persentase Kontribusi komponen pendapatan terhadap total pembentukan pendapatan daerah Kota Jambi T.A 2019	III-9
Gambar 3.5 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019.....	III-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2020.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 88 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km² yang terdiri dari:

a. Kecamatan Alam Barajo	36.909	Km ²	21,73%
b. Kecamatan Danau Sipin	7.278	Km ²	4,28%
c. Kecamatan Danau Teluk	13.444	Km ²	7,91%
d. Kecamatan Jambi Selatan	12.267	Km ²	7,22%
e. Kecamatan Jambi Timur	13.684	Km ²	8,05%
f. Kecamatan Jelutung	7.617	Km ²	4,48%
g. Kecamatan Kotabaru	29.937	Km ²	17,62%
h. Kecamatan Paal Merah	19.571	Km ²	11,52%
i. Kecamatan Pasar Jambi	1.670	Km ²	0,98%
j. Kecamatan Pelayangan	10.689	Km ²	6,29%
k. Kecamatan Telanaipura	16.822	Km ²	9,90%
	169.887		100%

Sumber: DPUPR Kota Jambi

Perubahan luasan diatas menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Jambi untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi diatas. Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°31'27,19" BT sampai 103°40'51,80" BT dan 01°32'48" LS sampai 01°41'46,07" LS. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 5 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

Topografi	Kemiringan (%)	Persentase
Datar	0-8	61.529%
Landai	8-15	28.570%
Agak Curam	15-25	8.599%
Curam	25-45	1.302%

Sumber: DPUPR Kota Jambi

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat).

Selama tahun 2019 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,5°C sampai 27,2°C. Dengan suhu maksimum 34,4°C yang terjadi pada bulan Januari dan suhu minimum 21,5°C terjadi pada bulan Februari dan Juni.

Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2019 beragam antara 55 mm sampai 298 mm, dengan jumlah hari hujan antara 15 hari sampai 25 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 3 knots hingga 8 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 82% - 88%.

1.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019 tercatat 604.378 jiwa, dengan kepadatan 2.912 orang/km². Kepadatan penduduk menurut Kecamatan adalah:

- a. Kecamatan Alam Barajo = 2.746 orang/Km²
- b. Kecamatan Danau Sipin = 6.754 orang/Km²
- c. Kecamatan Danau Teluk = 904 orang/Km²
- d. Kecamatan Jambi Selatan = 5.128 orang/Km²
- e. Kecamatan Jambi Timur = 4.913 orang/Km²
- f. Kecamatan Jelutung = 8.431 orang/Km²
- g. Kecamatan Kotabaru = 2.626 orang/Km²
- h. Kecamatan Paal Merah = 4.669 orang/Km²
- i. Kecamatan Pasar Jambi = 7.463 orang/Km²
- j. Kecamatan Pelayangan = 1.291 orang/Km²
- k. Kecamatan Telanaipura = 3.059 orang/Km²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio* : 101,00). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019

No	Penduduk	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-laki	289.713	293.217	297.036	300.775	303.818
2	Perempuan	286.354	290.270	294.098	297.537	300.920
J u m l a h		569.331	576.067	583.487	591.134	604.738
Sex Rasio		101,15	101,17	101,01	101,00	101,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Kelompok Usia Tahun 2015-2019

No	Kelompok Usia	Jumlah (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	0 – 14 tahun	148.672	148.302	147.899	147.302	147.827
2	15 – 59 tahun	392.119	397.897	403.731	408.963	413.680
3	60 tahun +	35.276	37.288	39.504	41.848	43.231
Jumlah		569.331	568.062	576.067	583.487	604.738

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

1.2.3. KONDISI EKONOMI

1.2.3.1. Makro Ekonomi Daerah

Makro ekonomi global tahun 2019 yang diwarnai dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan ketegangan geopolitik yang terus menekan laju pertumbuhan ekonomi global. Hal ini terbukti dengan terjadinya revisi target pertumbuhan ekonomi global oleh IMF, yang semula diprediksi mampu mencapai 3,3 dirasionalisasi menjadi 3. Hal ini tentunya juga berdampak pada perekonomian Indonesia yang diyakini tidak mencapai angka 5 pada tahun 2019. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi yang ada sebagai bagian integral.

Tahun 2019 ini Indonesia dihadapkan pada fenomena *trade shock*, dimana harga barang yang diekspor Indonesia turun dibandingkan dengan barang yang diimpor Indonesia. Hal ini tentunya berpengaruh langsung pada banyak daerah termasuk Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang menghasilkan komoditas ekspor khususnya pada sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan yang merupakan basis dari struktur ekonomi Provinsi Jambi. Kondisi ini tentunya berdampak pada geliat perekonomian di Kota Jambi.

Sebagai pusat perdagangan dan jasa yang menempati posisi ketiga dalam struktur ekonomi Provinsi Jambi, perlambatan laju perekonomian Provinsi Jambi dan efek perang dagang antara amerika serikat dan china tentunya juga berpengaruh kepada laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi menjaga tren positif ekonomi perkotaan yang ditopang oleh sektor sekunder dan tersier. Untuk itu Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menggali potensi-potensi ekonomi guna menjaga arah positif laju pertumbuhan ekonomi diantaranya pengembangan daerah wisata Danau Sipin, pembangunan infrastruktur serta perbaikan birokrasi diyakini sebagai beberapa faktor yang cukup efektif dalam menjaga tren positif ekonomi.

Dinamika diatas tentunya juga berdampak pada struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha yang bisa dijadikan sebagai gambaran potensi unggulan suatu daerah. Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Adapun struktur

ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (31,48 %);
2. Transportasi dan Pergudangan (12,02%);
3. Industri Pengolahan (10,09%);
4. Konstruksi (9,08%);
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (8,53%).

Untuk mengetahui kontribusi/peranan masing-masing lapangan usaha yang menjadi struktur ekonomi Kota Jambi pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Kontribusi PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Jambi (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,34	1,27	1,21	1,18	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	11,59	10,88	10,77	10,36	10,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27
F	Konstruksi/Construction	9,06	8,57	8,78	8,83	9,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	28,17	29,64	30,24	30,75	31,48
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	11,91	12,59	12,66	12,53	12,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,27	2,29	2,40	2,36	2,38
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	4,42	4,57	4,58	4,61	4,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	5,88	6,01	5,84	5,47	5,34
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,47	2,40	2,41	2,47	2,55
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2,97	2,99	3,01	2,97	3,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	9,49	8,82	8,61	8,66	8,53
P	Jasa Pendidikan/Education	4,49	4,47	4,53	4,46	4,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,22	2,23	2,24	2,2	2,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2020

Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2019 sebesar 5,33 persen. Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 9.94 persen, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar minus -2,61 persen.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2,58	1,78	2,08	4,42	-2,61
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-31,34	-3,25	-17,82	3,31	-1,43
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	5,17	4,23	3,83	3,58	3,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6,55	5,87	1,76	6,05	5,85
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,97	4,17	2,25	4,94	0,80
6	Konstruksi/Construction	2,50	4,13	7,91	6,22	7,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	12,13	7,69	5,28	7,02	7,53
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,70	12,42	6,93	3,47	1,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,10	8,24	9,52	7,67	6,54
10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	9,36	8,65	6,74	8,27	6,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,85	12,11	3,42	-0,63	2,38
12	Real Estat/Real Estate Activities	2,43	4,90	5,52	6,67	7,46
13	Jasa Perusahaan/Business Activities	6,82	6,54	5,95	5,30	5,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	6,42	2,98	2,47	4,60	4,50
15	Jasa Pendidikan/Education	7,64	6,33	4,42	6,55	7,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	10,28	7,14	6,25	6,24	9,94
17	R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	7,99	6,28	4,62	6,85	4,41
	Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	5,12	6,84	4,68	5,26	5,33

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor-sektor mana saja yang tumbuh pada tahun 2019. Secara grafik, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dari tahun 2015-2019 dan perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi serta Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi serta Nasional

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Adapun perkembangan PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
PDRB Per Kapita Kota Jambi Tahun 2015-2019

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
ADHB	21.293	24.406	26.294	28.859	30.856
ADHK	15.852	16.936	17.728	18.661	19.656
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
ADHB	36.964	41.827	44.481	48.251	51.054
ADHK	27.518	29.026	29.990	31.201	32.522
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)	3,66	5,48	3,32	4,04	4,24
Jumlah Penduduk (orang)	576.067	583.487	591.134	598.103	604.378
Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,41	1,29	1,31	1,18	1,05

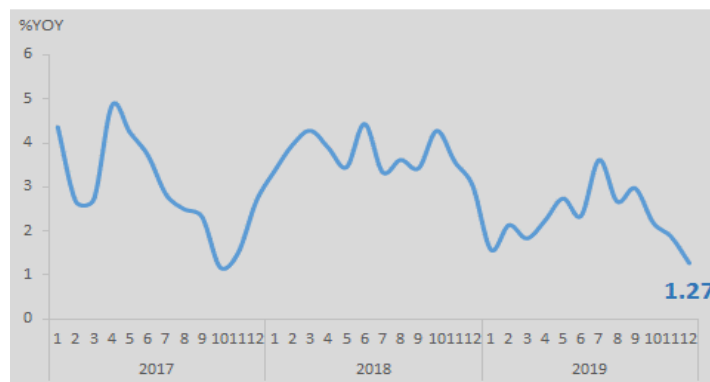
Sumber: BPS Kota Jambi 2020

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 36,96 juta rupiah naik menjadi 51,05 juta rupiah pada tahun 2019. Kenaikan angka PDRB per kapita

atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini karena nilainya masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

1.2.3.2. Inflasi Daerah

Laju inflasi merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam pengelolaan ekonomi daerah. Dimana dalam 3 tahun terakhir kinerja relative terjaga yaitu berada dibawah 5%, bahkan mencapai titik terendah pada desember 2019 (yoy) menyentuh angka 1,27% atau terendah sejak tahun 2015. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat perkembangan laju inflasi Kota Jambi dari tahun 2017-2019.



Gambar 1.2
Grafik Laju Inflasi Kota Jambi 2017-2019

Dalam kurun waktu 2017-2019 laju inflasi di Kota Jambi masih didominasi pada kelompok volatile food. Dimana pada tahun 2019 inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya peningkatan harga pada bahan makanan seperti bawang putih, bawang merah, cabe merah, ikan nila, jeruk, serta komoditi lain seperti buku tulis, tarif rumah sakit, emas perhiasan dan upah tukang. Sebagaimana tergambar pada tabel komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi tahun 2019 berikut ini.

Tabel 1.6
Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Jambi Tahun 2019

No	Komoditas	Inflasi (yoy,%)	Sumbangan (%)
1	Cabe Merah	29,29	0,29
2	Nila	15,52	0,19
3	Emas Perhiasan	9,66	0,16
4	Bawang Merah	22,31	0,15
5	Rokok Kretek Filter	3,35	0,11
6	Rarif Rumah Sakit	10,43	0,11
7	Tukang Bukan Mandor	4,16	0,09
8	Bawang Putih	51,92	0,08
9	Buku Tulis Bergaris	38,6	0,08
10	Jeruk	16,72	0,07
Total Sumbangan			1,33

Sumber: Bank Indonesia 2020

Disamping komoditi penyebab inflasi, terdapat beberapa komoditi yang mengalami deflasi yang secara agregat tentunya berpengaruh pada kinerja pengendalian inflasi di Kota Jambi. Adapun beberapa komoditi yang mengalami deflasi di Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sayur bayam, udang basah, ikan gabus, dencis, angkutan udara dan beberapa komoditas pangan dan komersil lainnya. Berikut tabel komoditas yang mengalami deflasi di Kota Jambi tahun 2019.

Tabel 1.7
Komoditas Penyumbang Deflasi Kota Jambi Tahun 2019

No	Komoditas	Inflasi (yoy,%)	Sumbangan (%)
1	Angkutan Udara	-10,95	-0,26
2	Udang Basah	-18,28	-0,14
3	Beras	-3,42	-0,13
4	Bensin	-2,53	-0,11
5	Daging Ayam Ras	-7,83	-0,11
6	Mobil	-3,91	-0,09
7	Bayam	-25,25	-0,07
8	Batu Bata/Batu Tela	-9,41	-0,05
9	Gabus	-12,79	-0,05
10	Dencis	-10,44	-0,05
Total Sumbangan			-1,05

Sumber Bank Indonesia 2020

Adapun nilai inflasi dan rata-rata nilai inflasi di Kota Jambi selama tahun 2014-2019 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Nilai inflasi rata-rata Kota Jambi Tahun 2014 s.d 2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi (%)	8,72	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3,6

Sumber: Data diolah, BPS Kota Jambi 2020

Secara garis besar dari tahun 2014 s/d 2019 laju inflasi di Kota Jambi relative baik, namun demikian Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencari daerah-daerah penghasil komoditi pangan yang masih mendominasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini guna menjaga trend positif dan daya beli masyarakat akan kebutuhan hidupnya.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. VISI DAN MISI

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN
MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Batasan konsep yang terdapat dalam visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- **Berakhlak:** Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- **Pelayanan Prima:** upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ke-1, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut melalui beberapa sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Tramtibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pada Misi ke-2, terdapat 2 (dua) tujuan. Pertama, Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: yang dapat diukur dari 2 (dua) indikator ialah (1) Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan (2) penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan. Tujuan kedua, Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan. Adapun sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL.

Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pada Misi ke-3, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan yakni, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan
- sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pada misi ke-4, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari 2 (dua) yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Tingkat pengangguran terbuka. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan
- Sasaran 3 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sasaran 5 : Meningkatkan realisasi investasi.
- Sasaran 6 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja.
- Sasaran 7 : Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Pada Misi ke-5, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pembangunan Gender, (3) Kriteria Kota Layak Anak, (4) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, (5) Persentase Penduduk Miskin. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan;
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- Sasaran 3 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk;
- Sasaran 4 : Meningkatkan kesetaraan gender;
- Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
- Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Sasaran 7 : Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan;
- Sasaran 8 : Menurunkan angka PMKS.

Tabel. 2.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,33	2,44	
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	59	60,5	62	62	
					Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A	
					Indeks survey persepsi Korupsi	N/A	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%	
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	80%	75%	66%	60%	60%	
			Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07 %	60,77 %	70,61 %	78,25 %	85,79 %	85,79%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	91	91,5	92	92,5	9,25
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	523,37 M
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25 %	65,50 %	65,75 %	66%	66%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
					Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06 %	19,27 %	23,85 %	29,82 %	36,70 %	36,70%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37	
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	14,60	14.61	14.62	14.63	14.64	14.64	
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32	
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72	
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01	
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23 %	96,46 %	96,69 %	96,92 %	97,15 %	97,15%	
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,90	94,91	94,93	94,94	94,95	94,95	
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	68,50	
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	61,43	63	64	66	66	
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52	52	
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60	6	70	75	80	85	85	

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

2.3.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

VISI: MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang	S.6.Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana perhubungan yang handal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Berkelanjutan	S.7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
	S.8. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
		Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
		Peningkatan harmonisasi ruang kota
	S.9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
	S.10. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S.15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
		Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
		Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
		Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesenjaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
	S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

2.3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Arah Kebijakan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah hinterland dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b. Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c. Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d. Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu, perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan

kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata Jambi Kota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Ketika promosi dan akomodasi transportasi berjalan seirama, tentu diperlukan perhatian yang cukup intensif terhadap kualitas objek wisata dan keramahan tuan rumah itu sendiri. Inovasi paket wisata dan berbagai kreativitas lainnya juga harus digerakkan berkesinambungan. Selain itu, juga dibutuhkan sinergitas semua stakeholder terkait dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah peran masyarakat pengguna teknologi untuk memaksimalkan promosi sektor pariwisata di Kota Jambi. Kombinasi apik antara perkembangan teknologi, pariwisata, serta keramahan budaya akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan aktivitas kepariwisataan.

Apabila aktivitas kepariwisataan mampu dikelola dengan baik dan diorganisasi dengan manajemen yang sehat, maka hal ini tentu akan meningkatkan promosi daerah Kota Jambi di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, peningkatan investasi di Kota Jambi pun juga akan tumbuh, dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan lapangan usaha dan pengurangan pengangguran. Muaranya tentu adalah perbaikan struktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2)

Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Penerimaan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sampai dengan tahun 2019 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan lain yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/ pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	BPHTB	Perda No. 06 Tahun 2016
2.	Pajak Daerah	Perda No. 07 Tahun 2016
3.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No.11 Tahun 2017
4.	Retribusi Jasa Umum	Perda No.12 Tahun 2017
5.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017

3.1.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari obyek pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan pendataan objek pajak daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data obyek pajak daerah yang lebih akurat.
- Melakukan optimalisasi penagihan dan menggali potensi baru wajib pajak.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- Melakukan pemasangan *Terminal Monitoring Device* (TMD) yang bekerjasama dengan Bank Jambi untuk memudahkan pengawasan pembayaran pajak daerah sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir.
- Memberikan kemudahan pembayaran PBB di pusat-pusat perbelanjaan (*PBB goes to mall*).
- Bersinergi dengan KPK dalam rangka upaya penagihan pajak daerah.
- Memberikan kemudahan dalam pembuatan SPPT PBB baru untuk para pengembang perumahan di Kota Jambi.
- Koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah.

3.1.2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.675.908.071.976,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.651.570.091.051,86 (98,53%) yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Perimbangan;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

a. Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2019 mencapai Rp.393.552.931.927,79 atau 103,09% dari target penerimaan sebesar Rp.381.743.685.000 dan memberikan kontribusi sebesar 23,83% terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 yakni sebesar Rp.338.892.256.292,96 maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13% atau naik Rp. 54.660.774.046,83.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

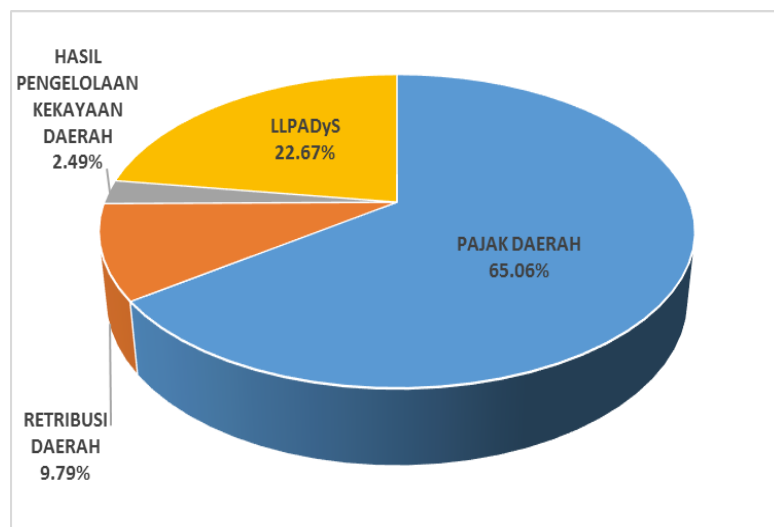
Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	203.500.000	215.444.388	105,87	242.090.000	256.028.625	105,76
2.	Ret. Daerah	44.012.000	40.389.059	91,77	45.068.647	38.540.093	85,51
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di pisahkan	8.850.000	8.854.962	100,06	9.700.000	9.783.144	100,86
4.	Lain-lain PAD yg sah	79.540.135	74.203.846	93,29	84.885.038	89.201.068	105,08
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.931	103,09

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

Diketahui bahwa komponen hasil pajak daerah mencapai target yang telah direncanakan semula. Dari target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 242.090.000.000 ternyata realisasinya mencapai Rp. 256.027.807.313,55 atau melebihi target sebesar 5,76%. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah kurang dari target yang telah ditetapkan (85,52%). Untuk PAD yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2019 ini melebihi target yang telah ditetapkan (100,86 %), sedangkan PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 105,08%.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi Tahun 2019.



Gambar 3.1
Persentasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2019

b. Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Target dana perimbangan adalah sebesar Rp. 1.130.319.892.976,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.110.177.033.331,00 atau mencapai 98,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut yang menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018 dengan Tahun 2019 berikut ini:

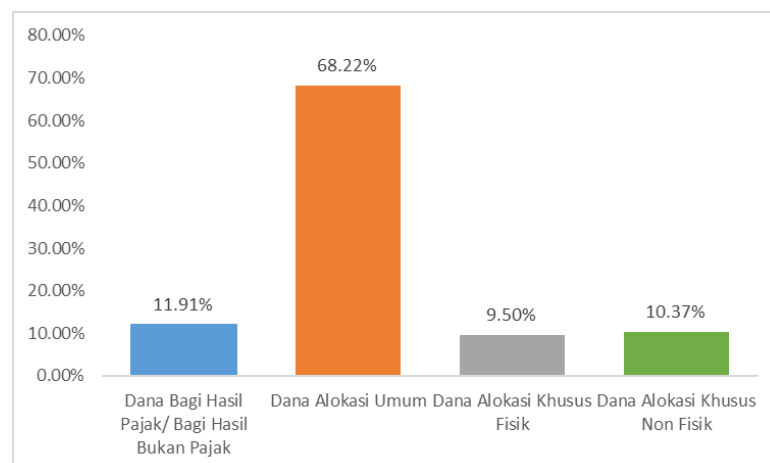
Tabel 3.3.
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2018 dengan TA 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	118.890.269	118.633.409	99,78	137.965.056	132.185.357	95,81
2.	Dana Alokasi Umum	714.783.378	714.783.378	100,00	757.404.051	757.404.051	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	291.823.567	277.298.116	95,02	234.950.785	220.587.624	93,89
TOTAL		1.057.789.912	1.125.497.214	98,69	1.130.319.892	1.110.177.033	98,22

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp. 137.965.056.000,00 realisasinya mencapai Rp. 132.185.357.673,00 atau 95,81%.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2019 adalah sebesar Rp. 757.404.051.000,00 dan realisasinya mencapai Rp. 757.404.051.000,00 atau 100,00%, sedangkan pada penerimaan dari pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,89% yaitu Rp. 220.587.624.658.



Gambar 3.2.
Capaian Target Hasil Dana Perimbangan
Pemerintah Kota Jambi T.A 2019

c. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2019, ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.81.347.485.000 dan terealisasi sebesar Rp.114.911.044.081,07 (141,26%).

Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp. 61.479.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.621.148.000,00 (18,9%). Untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dengan Tahun 2019 di bawah ini:

Tabel 3.4.
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	62.534.000	35.914.102	57,43	61.479.800	11.621.148	18,9
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	81.347.485	92.499.055	113,71	81.347.485	114.911.044	141,26
4.	Dana Penyesuaian Otsus	18.000.000	18.000.000	100,00	11.291.209	11.291.209	100,00
5.	Bantuan Keuangan dr Provinsi Jambi	5.220.000	3.720.000	71,26	9.720.000	9.720.000	100,00
TOTAL		95.684.861	167.101.485	89,85	163.838.494	147.543.401	90,24

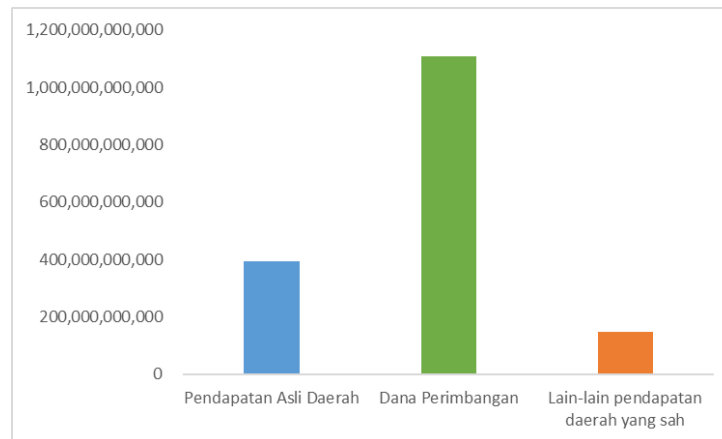
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total pendapatan daerah adalah Rp. 1.651.273.366.339,86 atau terealisasi 98,53% dari target sebesar Rp. 1.675.902.071.976,00. Target dan realisasi pendapatan Kota Jambi Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.3 berikut.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

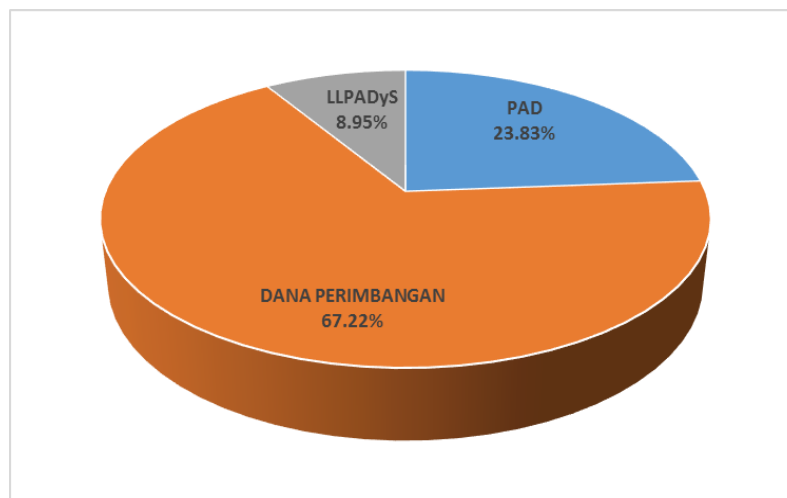
No	Jenis	Target	Realisasi	% dari Target
1	PAD	381.743.685.000,00	393.552.931.927,79	103,09
2	Dana Perimbangan	1.130.319.892.976,00	1.110.177.033.331,00	98,22
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	163.838.494.000,00	147.543.401.081,07	90,24
	Total	1.675.902.071.976,00	1.651.273.366.339,86	98,55

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)



Gambar 3.3
Persentase Realisasi Pendapatan
Kota Jambi T.A 2019

Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 23,83% dari total realisasi pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 67,22% dan sisanya sebesar 8,95% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Gambar 3.4
Persentase Kontribusi komponen pendapatan terhadap total
Pembentukan pendapatan daerah Kota Jambi T.A 2019

Kontribusi PAD Kota Jambi yang sebesar 23,83% di Tahun 2019 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada dikisaran 8,5% di Tahun 2019. Namun angka ini masih menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pemerintah pusat.

3.1.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,13% dibandingkan dengan tahun 2018. Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam Pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum Optimal.

b. Solusi

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf serta keterlibatan RT untuk melaksanakan operasional pendataan pajak dilapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akurat.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi pemungut.
- Penerapan Sanksi agar lebih tegas.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.2.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Pada Tahun 2019 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 1.848.826.216.875,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 1.042. 522.489.234,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 806.303.727.641,00 Jika dibanding dengan jumlah anggaran

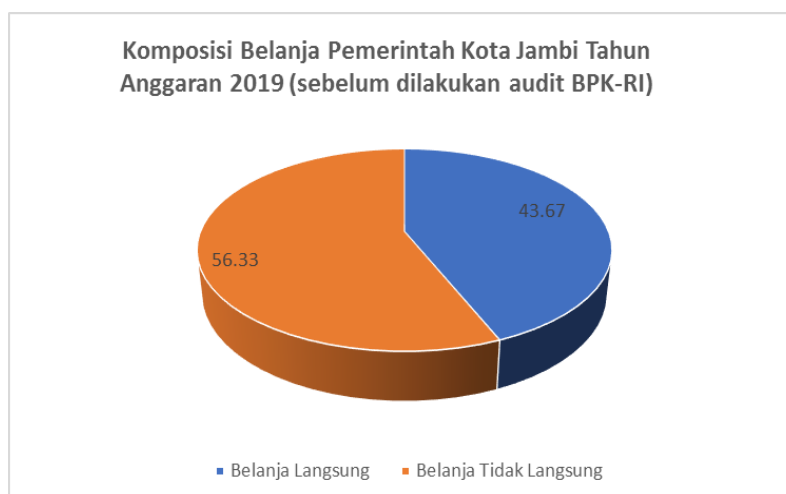
Belanja tahun 2018 sebesar Rp 1.755.151.632.467,00 maka tahun 2019 ini Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami kenaikan sebesar 4,93%.

Tabel 3.6.
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	806.303.727.641,00	43,61
2.	Belanja Langsung	1.042.522.489.234,00	56,39
TOTAL BELANJA		1.848.826.216.875,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 43,61 % dari total belanja Kota Jambi di Tahun 2019 dan sisanya sebesar 56,39 % merupakan Belanja Langsung.



Gambar 3.5
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 806.303.727.641,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 695.916.805.729,00 atau 86,31% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2019 (Setelah Perubahan)		
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	%
1.	Belanja Pegawai	780.513.273.241,00	674.551.639.407,00	86,42
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0
3.	Belanja Subsidi	,000	0,00	0
4.	Belanja Hibah	14.726.000.000,00	13.663.492.850,00	92,78
5.	Belanja Bantuan Sosial	7.651.455.000,00	5.801.400.000,00	75,82
6.	Belanja Tidak Terduga	,000	0,00	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan	1.307.132.400,00	836.172.392,00	63,97
8.	Belanja Tidak Terduga	2.105.867.000,00	1.064.101.080,00	50,53
TOTAL BELANJA		806.303.727.641,00	695.916.805.729,00	86,31

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.042.522.489.234,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 936.571.372.047,03 atau 89,84 %, sebelum dilakukan audit oleh BPK- RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Pegawai	66.138.355.995,00	58.246.248.150,00	88,07
2.	Belanja Barang dan Jasa	523.039.125.378,00	456.724.739.127,71	87,32
3.	Belanja Modal	453.345.007.861,00	421.600.384.769,32	93,00
TOTAL BELANJA		1.042. 522.489.234,00	936.571.372.047,03	89,84

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

Untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 masih menunggu proses audit pihak BPK, yang bila telah selesai akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.

3.2.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- Penyampaian laporan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung oleh Perangkat Daerah sering sangat terlambat dan menghambat proses pengelolaan keuangan daerah.
- Rentang waktu pelaksanaan APBD menjadi singkat karena lambatnya proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Kurangnya Pemahaman Pengelola Administrasi keuangan Perangkat Daerah dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan.

b. Solusi

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penatausahaan keuangan daerah.
- Memantapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKADA).
- Pengintegrasian antara e-Planning dan SIPKD.

3.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto

Pada tahun 2019, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019
Penerimaan Pembiayaan Daerah	172.924.144.899,89	172.924.144.899,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	172.924.144.899,89	172.924.144.899,89
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	172.924.144.899,89	172.924.144.899,89
SURPLUS/(DEFISIT)	(172. 124.144.899,00)	18.785.188.563,83
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		191.709.333.463,72

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. CAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1.1. URUSAN WAJIB

4.1.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan. Adapun keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	14,6	14.62
				Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32	21,32	21.30
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10.68

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2020

Angka realisasi tahun 2019 pada tabel di atas diperoleh Dinas Pendidikan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan. Adapun alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 131.029.422.498	Rp.121.233.219.827	(92,52%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 378.849.282.670.</u>	<u>Rp.318.767.328.171</u>	(84,14%)
Total Anggaran	Rp. 509.878.705.168	Rp.440.000.547.998	(86,30%)

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 1.848.826.216.875, maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 27,58%. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009.

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta Didik PNF yang mengikuti lomba di tingkat Nasional sebanyak 2 orang;
2. Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat di kota Jambi sebanyak 4.000 orang;
3. Jumlah Anak Putus Sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan kesetaraan dan/atau layanan pendidikan kecakapan hidup sebanyak 140 orang;
4. Jumlah Peserta Didik yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan sebanyak 10.746 Peserta Didik;
5. Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan sebanyak 30 SD;
6. Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SD sebanyak 187 SD;
7. Jumlah Pendidik PAUD yang memenuhi Kompetensi sesuai SNP sebanyak 281 pendidik PAUD.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Jambi, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan dapat mencapai sasaran dan target sesuai RPJMD pemerintah Kota Jambi 2018-2023, maka dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran harus bertitik tolak pada RPJMD Kota Jambi;
2. Penyusunan rencana kegiatan tahunan harus lebih terarah kepada kebutuhan dan kondisi real dilapangan;

3. Dalam menyusun rencana kegiatan tahunan harus berbasis pada data yang valid dan riil; dan
4. Mengingat seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan, maka perlunya memperhitungkan waktu pelaksanaannya.

4.1.1.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan. Adapun keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	73,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2020

Angka realisasi tahun 2019 pada tabel di atas diperoleh dari hasil perhitungan Dinas Kesehatan.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI		
1	Peningkatan jaminan masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat tidak mampu yang dijamin pelayanan kesehatannya	100 %	100 %		
2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi.	100 %	100 %		
		Terpenuhinya Standar Sarana Prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas.	20%	20%		
3	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Menurunkan Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	0	5	Hipertensi pada kehamilan (eklamsi) dan pendarahan kondisi di sebabkan oleh perilaku ibu hamil terhadap pola makan dan kesadaran dalam pemeriksaan kehamilan sejak kehamilan trimester I sampai dengan Trimester III	lebih optimal dalam melakukan screening ibu hamil, kematian ibu melahirkan juga disebabkan adanya penyakit sertaan pada ibu hamil tersebut
		Menurunkan Jumlah kasus kematian bayi baru lahir.	0	2	berat badan lahir rendah kondisi di sebabkan pada saat kehamilan kurang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan	Sosialisasi mengenai pemeriksaan ibu hamil ke fasilitas kesehatan
4	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran yang berimbang agar pencapaian indikator standard pelayanan minimal (SPM) Dinas kesehatan Kota Jambi sesuai Permenkes Nomor 04 Tahun 2016 dapat tercapai, terlaksana dan meningkat, Namun penganggaran tidak tersedia di jejaring UPTD puskesmas maupun tingkat kelurahan.	Melakukan advokasi Anggaran untuk kegiatan rutin Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di jejaring UPTD Puskesmas, maupun tingkat kelurahan.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2020

Angka realisasi tahun 2019 pada tabel di atas diperoleh dari hasil perhitungan Dinas Kesehatan.

Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Adapun alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 91.262.443.681	Rp. 76.523.728.752	(83,85%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 93.129.303.679,</u>	<u>Rp. 89.464.640.450</u>	(96,06%)
Total Anggaran	Rp.184.391.747.360	Rp.165.988.369.202	(90,02%)

Realisasi Keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya kegiatan dengan sumber dana dari DBHCHT dan dana DAK Penugasan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya masalah teknis, solusinya adalah perlunya dilaksanakan perencanaan dan penganggaran kembali Dana DBHCT untuk kegiatan yang sesuai juknis DBHCHT dengan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal terhadap lintas sektor dan lintas program guna pencapaian indikator SPM.

Pada tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manaf Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Adapun alokasi anggaran RSUD) Abdul Manaf Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp.105.929.528.558	Rp. 98.181.394.354	(92,69%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 22.394.082.621,</u>	<u>Rp. 20.965.753.067</u>	(93,62%)
Total Anggaran	Rp.128.323.611.179	Rp.119.147.147.421	(92,85%)

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan urusan Kesehatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Jiwa telah dilaksanakan di 4 Kecamatan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Alam Barajo, Danau Teluk, Telanai Pura dan Kecamatan Kota Baru;
2. Membentuk Pos Peduli Schizofrenia di Dua UPTD Puskesmas Kota Jambi yaitu di Wilayah UPTD Puskesmas Simpang Kawat dan UPTD Puskesmas Kebon Handil;
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
4. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Jambi yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Proses Belajar mengajar, Tempat bermain anak, tempat Ibadah, Angkutan Umum dan Sarana Olahraga.

Prestasi yang diraih oleh urusan kesehatan pada tahun 2019 berupa:

1. Juara Umum Lomba Asuhan Mandiri (TOGA dan Akupresur) Tingkat Perkotaan Provinsi Jambi;
2. Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (Kategori Bidan) Tingkat Provinsi atas nama Arni, AM.Keb;
3. Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Dokter) Tingkat Provinsi atas nama dr. Syarifah Netti Eka Putri;
4. Juara I Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Ahli Laboratorium Medik) Tingkat Provinsi atas nama Nyiayu Ernawati, AM.AK;
5. Juara II Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Kesehatan Masyarakat) Tingkat Provinsi atas nama Deasy Sumarni, SKM;
6. Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Kefarmasian) Tingkat Provinsi atas nama Juni Daryanti Bacin, S.Farm.

4.1.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,1 dan terealisasi sebesar 7,22. Adapun keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%	59,16%

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPUPR Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Terpadu Dan Berkelanjutan	Pengurangan titik genangan	1	1
		Rasio jalan kota dalam kondisi baik	89,06	87,06
		Rasio Pelayanan Air Minum	67,39	69,38
		Rasio Pelayanan Air Limbah	0,97	1,15
		Rasio Bangunan dalam kondisi baik	53,37	58,22
		Rasio Dokumen Perencanaan yang Diimplementasikan	80	80
2	Terkendalnya Pemanfaatan Lahan	Rasio ketaatan RTRW	95,00	95,00

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 6 (enam) program urusan yakni:

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong;
3. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan;
4. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan;
5. Program Perencanaan Tata Ruang; dan
6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 276.216.263.650	Rp. 270.014.205.898	(97,75%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 9.125.357.908</u>	<u>Rp. 7.499.695.409</u>	(82,18%)
Total Anggaran	Rp. 285.341.621.558	Rp. 277.513.901.307	(97,26%)

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 89,06% atau sepanjang 454,60 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2019 baru mencapai 87,06% atau sepanjang 444,39 km;
2. Target rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 100% dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sebesar sesuai target 100% atau sepanjang 127,2 km;
3. Target cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 67,39% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2019 sebesar 69,38%;
4. Rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun demikian, berdasarkan pantauan peta citra 2013 diperoleh ratio kesesuaian ruang adalah sebesar 95% atau masih terdapat margin sebesar 5% margin bangunan yang harus ditertibkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pembangunan yang dilakukan tanpa melalui proses pengajuan rekomendasi kesesuaian ruang.

4.1.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	78.79%	78,79%

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2020

1. Luas kawasan kumuh yang ditargetkan untuk diselesaikan hingga akhir periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 209,54 Ha. Adapun target rencana penyelesaian pada tahun 2019 seluas 32,9 Ha, dengan realisasi seluas 66,047 Ha atau sebesar 200,75%.
2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman ditargetkan total terpasang sebanyak 16.652 titik dan terealisasi 100%, yakni sebanyak 16.652 titik, dimana total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik.
3. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun awal perencanaan sebanyak 78,79% dan pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 202 unit. Adapun realisasi mencapai 501 unit atau 248%.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 2 (dua) program urusan yakni, program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan; dan program pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 34.967.230.000	Rp. 34.145.609.270	(97,65%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.837.356.730</u>	<u>Rp. 4.723.164.084</u>	(80,91%)
Total Anggaran	Rp. 40.804.586.730	Rp. 38.868.773.354	(95,26%)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi secara kelembagaan juga melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jambi, sehingga pada tahun 2019 dilaksanakan penanganan melalui program rumah tidak layak huni baik itu pembangunan baru maupun peningkatan kualitas yang dilaksanakan oleh Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Jambi. Untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 300 unit rumah untuk kategori peningkatan kualitas dengan dana yang bersumber dari APBN, 171 unit bersumber dari dana DAK dan 30 unit rumah dari dana APBD.

Selain dari itu juga saat ini Kota Jambi telah memiliki Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, akan tetapi belum dapat dihuni karena masih dalam proses serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.1.1.5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD, yakni Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 2, yaitu Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat. Adapun keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	100%
		Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%

Sumber: Satpol PP, Disdamkar dan Badan Kesbangpol Kota Jambi 2020

Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 memiliki 2 (dua) program urusan yakni Program Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah serta Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat. Total anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 7.785.648.800	Rp. 7.458.029.695	(95,79%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 6.055.468.157</u>	<u>Rp. 5.409.269.162</u>	(89,33%)
Total Anggaran	Rp 13.841.116.957	Rp.12.867.298.857	(92,96%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Satpol PP pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2019

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Regulasi Daerah	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	69	97,9
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum	75	92,7
2	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	42	99,31
		Jumlah Gaklin dan pencitraan Sat Pol PP Kota Jambi	54	98,9

Sumber: Satpol PP Kota Jambi 2020

Untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, namun memang terdapat sejumlah kendala antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personil serta sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan penegakan regulasi daerah berdasarkan Tupoksi
2. Belum adanya pengaturan penerapan sangsi pada Perda dan Perwal
3. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penanganan masalah yang terjadi pasca penertiban.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan, dengan indikator tujuannya cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%

Sumber: Dinas Disdamkar Kota Jambi 2020

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni, program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan, dengan 2 (dua) indikator program, yaitu Cakupan patroli Siaga Ketertiban Umum; dan Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 8.707.010.000	Rp. 6.877.304.456	(78,99%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 7.202.746.628</u>	<u>Rp. 6.504.496.794</u>	(90,31%)
Total Anggaran	Rp.15.909.756.628	Rp.13.381.801.250	(84,11%)

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan didukung dengan:

- a. 1 (satu) unit Mako;
- b. 5 (lima) unit Posyankar yaitu Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Pelayangan dan Danau Teluk;
- c. 4 (empat) unit *Fire Truck* kapasitas 10.000 liter;
- d. 4 (empat) unit *Fire Truck* Kapasitas 5.000 liter;
- e. 3 (tiga) unit *Fire Truck* Kapasitas 4.000 liter;
- f. 3 (tiga) unit *Fire Truck* Kapasitas 3.000 liter;
- g. 1 (satu) unit Mobil Pompa;
- h. 1 (satu) unit Mobil Rescue;
- i. 1 (satu) unit Mobil Logistik;
- j. 1 (satu) unit Gerobak Motor Pemadam;
- k. 1 (satu) unit Mobil Pasukan;
- l. 2 (dua) unit Mobil Dapur Umum;
- k. 5 (lima) unit Perahu Karet;
- l. 162 (seratus enam puluh dua) orang Satgas.

Dengan kondisi yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menargetkan *respon time* sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran hingga akhir tahun 2023.

Dalam melaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terdapat permasalahan berupa tidak terealisasinya pembelian mobil pemadam kebakaran akibat keterlambatan peluncuran dana dari APBN (sekitar bulan Desember), sehingga tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan. Solusinya kedepan diharapkan untuk dapat segera mempercepat proses realisasi dana, apabila berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.

Prestasi yang telah dicapai atau diraih Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi selama tahun anggaran 2019 yaitu :

1. Peserta Terbaik II Diklat Rescue 200 Jam Pelajaran (JP) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran Ciracas Jakarta Timur Angkatan 1 atas Nama Saiful Mustafa;
2. Juara Terbaik Umum Skill Kompetisi 2019 Petugas Pemadam Kebakaran se-Provinsi Jambi, dengan kategori perlombaan sebagai berikut:

- a. Juara I *Hose Laying*
- b. Juara I Pemadaman Tradisional dan APAR
- c. Juara I *High and Rescue*
- d. Juara II *Survival (Fire FighterLife)*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam melaksanakan 2 (dua) program urusan, yaitu program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol. Anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesbangpol pada tahun 2019 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.289.310.000	Rp. 2.180.200.640	(95,23%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.027.445.457</u>	<u>Rp. 2.759.980.995</u>	(91,17%)
Total Anggaran	Rp. 5.316.755.457	Rp. 4.940.181.635	(92,92%)

Adapun beberapa capaian Badan Kesbangpol pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melaksanakan forum kewaspadaan dini masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Tahun 2019, dengan dibentuknya tim tersebut untuk mengantisipasi atau mendeteksi dini terhadap gejala yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di masyarakat juga anggota tim melakukan pemantuan terhadap situasi dan kondisi diwilayahnya.
2. Melaksanakan pemantauan dan survey terhadap orang asing, keberadaan orang asing/tenaga kerja asing yang ada di Kota Jambi pada umumnya tidak ada yang menyalahi aturan, namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan pemantauan yakni untuk tenaga pengajar atau mahasiswa asing yang kuliah di Universitas Islam Indonesia dikarenakan kewenangannya pada Kemenag Provinsi Jambi. Sedangkan untuk survey orang asing terdapat kendala pada PT. Vipul Jaya Lestari yang beralamat di Jalan Lingkar Timur II RT. 03 Kel. Payo Selincih dikarenakan pihak perusahaan tidak mengizinkan dan mengindahkan kedatangan tim, atas peristiwa tersebut Tim akan melaporkan kepada Imigrasi Jambi.
3. Membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2019, dengan tujuan untuk pencegahan dan deteksi dini serta pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah.
4. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan UU Pemilu serta bimbingan teknis bantuan keuangan Parpol.
5. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pengawasan aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba serta Tim Fasilitasi Peran Pemda dan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah.
6. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) berdasarkan Keputusan Walikota Jambi nomor 132 Tahun 2019 tentang Pementukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi Tahun

2019, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Jambi melalui koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi.

7. Melaksanakan pembinaan dan pemantuan Orkemas, pada tahun 2019 jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif sebanyak 67 dari 197 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.

4.1.1.6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Menurunkan angka PMKS. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Persentase PMKS yang tertangani. Adapun keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60%	62%

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019	
			TARGET	REALISASI
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	65%	55.65 %
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	65%	62 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.256.900.000	Rp. 4.924.246.178	(93,67%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.330.057.344</u>	<u>Rp. 3.448.572.184</u>	(79.64%)
Total Anggaran	Rp. 9.586.957.344	Rp. 8.372.818.362	(87.33%)

Adapun prestasi yang pernah diraih pada Dinas Sosial Kota Jambi untuk pelaksanaan Program Kegiatan tahun anggaran 2019 adalah :

1. Penghargaan Tokoh Nasional Peduli Lansia kepada Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME.
2. Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama Republik Indonesia kepada Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME.
3. Penghargaan Terbaik 1 Kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan.

4.1.1.7. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja. Adapun keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12
Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,79%

Sumber: DTKK,UKM Kota Jambi 2020

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, dengan sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 65%, capaian realisasi sebesar 65,79%. Adapun jumlah angkatan kerja yang tercatat sejumlah 297.290 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja sejumlah 451.865 orang, artinya Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian sebesar >100%.

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% = \frac{297.290}{451.865} \times 100\% = 65,79\%$$

Dalam mendukung misi ke 4, Urusan Tenaga Kerja memiliki sasaran strategis yaitu meningkatnya produktivitas dan penempatan kerja, dengan indikator sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya produktivitas dan penempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65%	65,79%
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	56%	60,53%

Sumber: DTKK, UKM Kota Jambi 2020

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 65% dan realisasi pencapaian sebesar 65,79%. Sementara untuk persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 56% terealisasi pencapaian sebesar 60,53%. Untuk tahun 2019, jumlah kasus yang dicatatkan sejumlah 76 kasus, dari jumlah tersebut jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 46 kasus. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan.

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) program urusan yakni program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.837.360.500	Rp. 2.681.936.031	(94,52%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.209.282.900.</u>	<u>Rp. 3.659.056.298</u>	(86,93%)
Total Anggaran	Rp 13.841.116.957	Rp.12.867.298.857	(89,99%)

Pada Tahun 2019 untuk mencapai target indikator sasaran strategis dan indikator program tersebut, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu kegiatan pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, dilaksanakan beberapa sub kegiatan, yaitu :

1. Pelatihan Keterampilan Desain Grafis : 1 angkatan, 20 orang
2. Pelatihan Keterampilan Menjahit : 1 angkatan, 20 orang
3. Pelatihan Keterampilan Tata Rias Kecantikan : 1 angkatan, 20 orang
4. Pelatihan Service AC : 1 angkatan, 15 orang
5. Pelatihan Service Hp : 1 angkatan, 15 orang
6. Pelatihan Keterampilan Menjahit untuk anggota P2WKSS : 50 orang

Sedangkan Untuk Kegiatan Penyusunan dan perluasan informasi pasar kerja, dilaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Job Fair : 20 perusahaan
- b. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2019.

4.1.1.8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan 2 (dua) sasaran RPJMD yakni 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender; 2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,9	94,46
				Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,1	69,83
		Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	70%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2020

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menetapkan tujuan Peningkatan pemberdayaan masyarakat disemua aspek pembangunan di Kota Jambi dan Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak menuju kesejahteraan keluarga. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Tercapainya standar kota layak anak	Persentase standar KLA yang terpenuhi	70 %	70%
2.	Meningkatnya usaha ekonomi perempuan	Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan	76 %	98,60%
3.	Meningkatnya perlindungan Terhadap Perempuan	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	33	36

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2020

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni Program peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.494.999.000	Rp. 6.088.676.906	(93,74%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.850.983.892</u>	<u>Rp. 3.453.964.704</u>	(89,69%)
Total Anggaran	Rp.10.345.982.892	Rp. 9.542.641.610	(92,24%)

Secara umum yang menjadi faktor penghambat dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara tim penanganan korban kekerasan;
2. Kurangnya peran anggota fokal point sebagai motivator, inovator dan dinamisor program pembangunan berperspektif gender;
3. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
4. Belum terkoordinasinya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di semua Perangkat Daerah.

Adapun prestasi pada tahun 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang telah dilaksanakan dan memperoleh penghargaan baik Tk. Provinsi Jambi maupun Tk. Nasional adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Prestasi DPMPPA Kota Jambi pada Tahun 2019

No	Penghargaan	Kategori
1	Tk. Nasional - Kota Layak Anak (KLA)	Kategori Madya
2	Terbaik I APE Tk. Provinsi Jambi	Terbaik I
3	Lomba TTG Tk. Provinsi Jambi	Juara II – Posyantek Berprestasi
4	Lomba TTG Tk. Kota Jambi	a. Juara I – Alat panen pisang b. Juara II – Lempeng (lemari pengering) c. Juara III - Alat Tonjok Siput

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2020

4.1.1.9. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan. Adapun keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17
Keterkaitan Urusan Pangan
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,5	90.7

Sumber: DPKP Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Pangan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pangan pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	Persentase Peningkatan SKOR PPH a. PPH Ketersediaan - Energi dan - protein perkapita	2.944 gr/kap/hr 76,24 gr/kap/hr	3.010gr/kap/hr 88,43gr/kap/hr
2	Meningkatnya Keamanan pangan	1. PPH Konsumsi 2. Persentase peningkatan pangan aman konsumsi	90,2 % 79 %	90.7% 100%

Sumber: DPKP Kota Jambi 2020

Urusan Pangan pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pangan pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 4.476.323.000	Rp. 4.191.625.328	(93,64%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.14.724.225.152</u>	<u>Rp.12.417.272.733</u>	(84,33%)
Total Anggaran	Rp.19.200.548.152	Rp.16.608.898.061	(86,50%)

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 8 kali di 11 Kecamatan;
2. Terlaksananya Gerakan Makan *One Day No Rice* 3 kali;
3. Terlaksananya Display Pangan B2SA 2 kali dan EXPO/Pameran pada Hari Pangan Sedunia ke-39;
4. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Jambi menjadi 90,7 dengan nilai Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 64,3 gr/kapita/hari dan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.188 kkal/kapita/hari.

Dalam melaksanakan urusan pangan di Kota Jambi terdapat beberapa permasalahan, seperti:

1. Pemenuhan cadangan Pangan Pemerintah Kota Jambi belum didukung oleh sarana dan prasarana;
2. Implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui pangan lokal diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras, belum dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Sosialisasi keamanan jajanan anak sekolah khususnya di Sekolah Dasar belum dilaksanakan secara optimal;
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pola konsumsi masyarakat khususnya bahan pangan yang sehat, bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana prasarana penyimpanan ketersediaan pangan terutama bahan pokok masyarakat demi menjaga kestabilan harga dan pasokan
2. Perlunya ikatan kerjasama dengan daerah pemasok bahan pangan guna menjaga distribusi dan rantai pasok.
3. Melakukan penyuluhan tentang sumber karbohidrat selain beras merupakan sumber pangan yang berkualitas sama dengan beras dan non terigu melalui Gerakan Makan *One Day One Rice*
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pangan yang aman konsumsi melalui sosialisasi dan membentuk jejaring pangan daerah.

4.1.1.10. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19
Keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,27
				Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	76,84
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	44,81

Sumber: DLH Kota Jambi 2020

Indeks kualitas Air (IKA) yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar 37,75 dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 32,11 dapat direalisasikan dengan nilai 38,27 pada tahun 2019, peningkatan nilai ini didapatkan dari pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar yang diketahui banyak berasal dari limbah domestik.

Limbah domestik yang terakumulasi dari beberapa tahun sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai dan danau di Kota Jambi. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengurangi beban pencemaran air dengan melakukan pembangunan sarana prasarana fisik melalui kegiatan pembuatan *septic tank* komunal ataupun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal dari kegiatan sanimas oleh Dinas PUPR Kota Jambi

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi Tahun 2018 dengan pemantauan Passive Sampler sebesar 80,68 sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan nilai IKU sebesar 76,84 namun masih dalam kategori **Baik**, hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang berdampak terjadinya kabut asap di Kota Jambi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara di Kota Jambi.

Nilai indeks kualitas tutupan lahan terjadi peningkatan dari nilai 39,33 pada tahun 2018 menjadi nilai 44,81 di tahun 2019, kondisi ini didapatkan dari pendataan ulang data terhadap perhitungan nilai indeks kualitas tutupan lahan dari aspek nilai indeks tutupan hutan, indeks performance hutan, indeks keanekaragaman hayati, indeks kualitas badan air dan indeks kualitas tanah. Penilaian aspek-aspek ini bukanlah perbandingan tampilan tutupan lahan hijau berbanding luas wilayah, namun perhitungan nilai kualitas yang dihasilkan dari setiap indeks tersebut.

Pemerintah Kota Jambi berupaya melakukan pemenuhan terhadap ratio ruang terbuka hijau sebesar 30% secara bertahap yang masih belum terpenuhi. Sepanjang tahun 2017-2019 telah dilakukan pendataan ulang seluruh luasan Ruang Terbuka Hijau baik yang merupakan ruang publik maupun privat. Pemutakhiran data dan sistem informasi terhadap ruang terbuka di Kota Jambi terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2019, telah didapatkan data rasio ruang terbuka hijau di Kota Jambi yaitu Ruang Publik seluas 10,36%; dan, Ruang Privat seluas 9,11%. Potensi timbunan ruang publik berasal dari pendataan asset ruang terbuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat yang berada di dalam wilayah administrasi Kota Jambi. Dan potensi ruang privat yang dapat diidentifikasi adalah berasal dari ruang pekarangan, taman dan sisa lahan yang tidak terbangun dari bangunan privat dan rumah tangga. Untuk melihat luasan RTH di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20
Rekapitulasi Luas dan Lokasi Ruang terbuka Hijau di Kota Jambi

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	876,18
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50
9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,78

Sumber: DLH Kota Jambi 2020

DLH Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni program Penurunan Beban Pencemaran; program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati; dan program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan. Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 49.606.572.150	Rp. 44.784.296.852	(90,28%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 8.862.309.390</u>	<u>Rp. 7.871.220.665</u>	(88,82%)
Total Anggaran	Rp. 58.468.881.540	Rp. 52.655.517.517	(90,06).

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pemantauan sumber pencemaran;
2. Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Tercapainya jumlah sampel yang di uji;
4. Terbitnya hasil penilaian/pembahasan akhir dokumen lingkungan hidup;
5. Masuk dalam seleksi kota penerima anugerah Nirwasita Tantra;
6. Tersusunnya dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah;
7. Terbinanya 30 sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
8. Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
9. Pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan;
10. Penanganan kasus pengaduan lingkungan;
11. Terlaksananya pembuatan taman kota;
12. Terlaksananya penataan taman kota;

13. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Taman Hutan Kota M. Sabki, RTH Bagan Pete dan Hutan Rengas;
14. Terlaksananya pengolahan persampahan dan limbah B3;
15. Terlaksananya pengurangan sampah melalui Bank Sampah.

Dalam melaksanakan urusan urusan Lingkungan Hidup di Kota Jambi terdapat beberapa permasalahan, seperti:

1. Belum baiknya kualitas lingkungan hidup.
2. Pembangunan belum berwawasan lingkungan.
3. Masih terjadi pencemaran air.
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah-limbah B3.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah oleh masyarakat.
6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
7. Masih adanya pencemaran tanah, air dan udara.
8. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.
9. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
10. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
11. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
12. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah.
13. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
14. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Peningkatan pelayanan perizinan dibidang lingkungan hidup;
3. Melakukan pengendalian pencemaran air sungai dan danau;
4. Peningkatan pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum dari pencemaran limbah B3;
5. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan sampah;
6. Menyiapkan produk hukum daerah dan kajian dibidang lingkungan hidup;
7. Melakukan pengendalian pencemaran (tanah, air, udara);
8. Peningkatan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum;
9. Peningkatan pembinaan pengelolaan limbah;
10. Mengoptimalkan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat;
11. Peningkatan dan pengembangan SDM di bidang lingkungan hidup;
12. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
13. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
14. Meningkatkan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

Prestasi yang diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 berupa:

1. Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2019 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1037/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019 tanggal 06 Desember 2019.
2. Penetapan sekolah Adiwiyata tingkat Kota Jambi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 386 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019.

4.1.1.11. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21
Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil	85,5	85,63
		Cakupan layanan dokumen kependudukan	93	94,40
		Cakupan layanan dokumen pencatatan sipil	82	83,84
		Persentase validitas database kependudukan	87	86,68

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Tata Kelola

Administrasi Kependudukan, dengan 4 (empat) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.412.244.000	Rp. 5.934.873.124	(92,55%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.559.626.548</u>	<u>Rp. 5.299.100.553</u>	(95,31)
Total Anggaran	Rp 11.971.870.548	Rp. 11.233.973.677	(93,84).

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan rekam data dan *update* data penduduk. Data yang terhimpun untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Data Realisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Wajib KTP	Perekaman	Jumlah KK	Jumlah KK cetak KK	Jumlah pencetakan KK	Jumlah penerbitan KTP	Jumlah penduduk memiliki KTP	Penerbitan akta kelahiran	Penerbitan akta kelahiran 0-18	Usia anak 0-18 tahun	Jumlah kematian	Jumlah penerbitan akta kematian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN TELANAIPURA	50.581	37.291	53.664	13.712	12.680	5.239	16.396	53.357	20.515	14.539	16.588	815	647
2	KECAMATAN JAMBI SELATAN	59.580	43.815	73.248	16.720	15.303	6.011	19.278	72.839	23.925	16.729	18.927	865	630
3	KECAMATAN JAMBI TIMUR	69.099	51.402	57.646	19.804	17.005	6.411	19.788	57.202	28.291	19.236	21.606	1.202	910
4	KECAMATAN PASAR JAMBI	12.741	9.788	9.908	3.603	2.966	1.161	3.681	9.827	5.219	3.297	3.779	342	599
5	KECAMATAN PELAYANGAN	13.729	9.927	9.809	3.779	2.946	1.046	2.603	9.753	5.381	3.979	4.516	395	47
6	KECAMATAN DANAU TELUK	13.115	9.438	9.328	3.611	2.936	1.167	3.711	9.253	5.023	3.688	4.265	330	57
7	KECAMATAN KOTA BARU	78.914	56.296	84.546	21.629	18.659	8.823	27.046	83.982	34.474	24.026	26.475	1.105	1.626
8	KECAMATAN JELUTUNG	62.410	46.297	47.406	17.524	15.802	5.556	18.056	47.084	31.232	18.117	19.481	1.108	835
9	KECAMATAN ALAM BARAJO	104.376	73.555	40.856	27.599	25.433	12.236	36.379	40.513	46.435	31.782	35.998	1.049	921
10	KECAMATAN DANAU SIPIN	46.088	34.051	15.786	12.591	12.529	4.802	14.155	15.619	17.918	13.055	15.118	909	533
11	KECAMATAN PAAL MERAH	105.042	74.444	38.059	28.509	27.343	11.471	33.950	37.767	42.426	31.185	35.728	1.123	489
	JUMLAH	615.675	446.304	440.256	169.081	153.602	63.923	195.043	437.196	260.839	179.633	202.481	9.257	7.309

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2020

Berdasarkan evaluasi ditemukan hambatan/permasalahan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan tertib administrasi kependudukan antara lain :

1. Belum efektifnya pemanfaatan sistem pelayanan yang terintegrasi, sehingga menyulitkan pemantauan pelayanan yang diberikan terutama untuk pelaporan realisasi pelayanan administrasi penduduk.
2. Masih kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pelaporan kependudukan.
3. Lambatnya sistem validasi data KTP Elektronik yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga menghambat proses pelayanan pencetakan KTP Elektronik.
4. Distribusi blangko KTP Elektronik dari pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan di daerah.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melakukan perekaman data KTP Elektronik bagi usia wajib KTP Elektronik.
6. Validasi database kependudukan yang masih belum valid.

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka solusi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Memperbaiki sistem pelayanan melalui perbaikan SOP serta menggunakan aplikasi layanan terintegrasi dengan sistem informasi berbasis komputer untuk mempermudah proses pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh UPTD Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Membuat inovasi-inovasi pelayanan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dengan cara melakukan pelayanan mobile serta pemanfaatan media sosial.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan mengintensifkan memanfaatkan media informasi baik elektronik, media cetak dan media sosial
4. Melakukan pengukuran validasi database kependudukan untuk mendukung akurasi data kependudukan dengan melaksanakan pemutakhiran elemen data kependudukan secara kuantitas maupun kualitas.

Prestasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 menerima Penghargaan dari Kemenpan RB Republik Indonesia Deputi Bidang Pelayanan Publik, dengan kategori penghargaan adalah Unit Penyelenggaraan Publik Kategori Baik dengan catatan.

4.1.1.12. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.24
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	70,96

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	37 %	97,88%
2	Meningkatkan persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	79 %	81,42%
		Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna	41 %	70,96%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2020

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni program Pemberdayaan Masyarakat. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.750.049.550 dengan realisasi sebesar Rp. 4.319.218.675 atau 90,93%.

Secara umum yang menjadi faktor penghambat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Jambi adalah kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat bidang sosial, budaya dan ekonomi.

4.1.1.13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk. Adapun keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.26
Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96%

Sumber: DPPKB Kota Jambi 2020

Hasil realisasi persentasi jumlah keluarga sejahtera didapatkan dari hasil perhitungan data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu pada Bidang Pengendalian Penduduk.

Pada tahun 2019, DPPKB Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Adapun alokasi anggaran DPPKB Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 7.752.588.000	Rp.7.184.930.702	(92,67%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.764.547.007,.</u>	<u>Rp.3.218.764.053</u>	(85,50%)
Total Anggaran	Rp.11.517.135.007	Rp.10.403.694.755	(90,33%)

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan peserta KB baru dengan total 5.952 akseptor (37,60% atau 15.830 orang dari PPM);
2. Peserta KB baru terdiri dari IUD 434 peserta, MOW 440 peserta, Kondom 291 peserta, Implant 306 peserta, Suntik 3.581 peserta, dan Pil 896 peserta;
3. Pencabutan IUD secara komulatif mencapai 218 akseptor;
4. Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat kasus kompilatif berat dan kasus kegagalan;
5. Pembinaan kesejahteraan keluarga diketahui jumlah UPPKS yang dilaporkan dengan jumlah 1.059 anggota.
 - Sebayak 524 (49,48%) dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1;
 - UPPKS berstatus PUS sebayak 729 anggota dan status PUS ber KB 645 (88,84%);
 - UPPKS yang berstatus PUS dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 420 dan yang ikut KB 376 (89,52%) pasangan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.

Adapun prestasi yang diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Kelompok Kasih Ibu Juara I Lomba Bina Keluarga Balita (BKB);
- Kelompok Melati IV Juara II Lomba Bina Keluarga Balita (BKB);
- Kelompok Melati IV Bakung Juara III Lomba Bina Keluarga Balita (BKB);
- Kelompok Cempaka Juara I Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);
- Kelompok Bougenville Ceria Juara II Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);
- Kelompok Danau Indah Juara III Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);
- Kelompok Kamboja Juara I Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL);
- Kelompok Beringin Juara II Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL);
- Kelompok Baitul Fattah Juara III Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL);
- Kelompok Mawar Juara I Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

4.1.1.14. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan merupakan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perhubungan Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Perhubungan Darat	Cakupan Pelayanan Transportasi	45.80	38,2%
2	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase Pengendalian Lalu Lintas	68.3	68,3%
3	Peningkatan Penataan dan Pelayanan Perpajakan	Persentase Pelayanan Perpajakan	74.76	74,76%

Sumber: Dishub Kota Jambi 2020

Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni, program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan; program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu lintas; dan program Peningkatan Pelayanan Perpajakan.

Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 16.855.465.000	Rp. 16.289.757.887	(96,64%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 10.408.536.685</u>	<u>Rp. 9.214.514.588</u>	(88,53%)
Total Anggaran	Rp. 40.804.586.730	Rp. 38.868.773.354	(93,55%)

Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2019 telah melakukan beberapa inovasi-inovasi diantaranya dengan memasang CCTV pada 18 (delapan belas) simpang-simpang yang ada di Kota Jambi dan langsung terkoneksi ke ruang Jambi *City Operation Center* (J-COC), dan kedepannya akan terus ditambah untuk simpang-simpang yang belum terpasang. Selain itu juga penyelenggaraan kerjasama angkutan umum berbasis android (Koja Trans) dengan PT Multi Inti Digital Transport yang diharapkan dapat melayani jalan-jalan koridor, sementara mobil-mobil angkutan yang lama dapat berfungsi sebagai *feeder*.

Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya realisasi penerimaan retribusi di Bidang Pengelola Parkir, adalah :

1. Pembangunan yang semakin merata di seluruh daerah di Kota Jambi, menyebabkan semakin terdistribusinya tarikan perjalanan, yang sebelumnya pembebanan lalu lintas tertumpu hanya pada beberapa ruas jalan yang menuju ke Pasar Jambi, saat ini semakin terbagi. Dampak positif dari pembangunan Kota ini tidak berbanding lurus dengan penerimaan Retribusi Parkir Dalam Kawasan;
2. Tingkat perekonomian masyarakat Jambi sedikit menurun sehingga kunjungan ke pasar jambi cenderung berkurang;
3. Kartu Parkir Berlangganan
Pada saat penentuan Target penerimaan subsektor Kartu Parkir Berlangganan yang dijadikan asumsi adalah seluruh ASN Kota Jambi melakukan pembelian Kartu Parkir Berlangganan, namun pada kenyataannya belum semua ASN yang mempergunakan, baru sekitar $\pm 15,87\%$ dari jumlah ASN Kota Jambi 6.161 orang, atau sebanyak 3.913 kartu;
4. Masih rendahnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai efektifitas dan efisiensi Kartu berlangganan;
5. Adanya perubahan regulasi dari Kemenhub RI terkait kendaraan baru wajib melampirkan SRUT.

4.1.1.15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja

pemerintah berbasis TIK, dimana indikator sasaran tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.28
Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,85

Sumber: Diskominfo Kota Jambi 2020

Adapun kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.29
Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Realisasi 2019
1	Terwujudnya Layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Komunikasi dan informatasi	40%	45%
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Rasio Jumlah data/Informasi Statistik sektoral	10%	10%
3	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi	Indeks kematangan keamanan informasi	20%	20%

Sumber: Diskominfo Kota Jambi 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 2 (dua) program urusan yakni program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan; dan program Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pengembangan data/Informasi. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.776.525.000	Rp. 5.504.061.683	(95,28%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.811.704.195</u>	<u>Rp. 3.075.469.920</u>	(80,68%)
Total Anggaran	Rp. 9.588.229.195	Rp. 8.579.531.603	(89,48%)

Dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika masih terdapat kendala yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta fasilitasi yang mendukung sarana dan prasarana masih belum memadai.

Untuk tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi telah berhasil meraih prestasi yang dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Piagam Penghargaan Implementasi smart city Nusantara dari PT. Telkom Indonesia, Tbk tahun 2017 sebagai Pemerintah Kota yang telah mengimplementasikan *smart city* nusantara;
- b. Piagam Penghargaan dari Walikota Jambi kepada Diskominfo Kota Jambi sebagai Akun Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah Terbaik, 2017;
- c. Piala Penghargaan Appreciation "TOP IT *Implementation On Smart City Development* 2017 ";
- d. *Certificate Of Appreciation (The Best Leader IT, The IT Data Governance, dan The Best IT Data Infrastrucutre)* 2018;
- e. Piagam Penghargaan *Implementasi Smartcity* Nusantara Dari Telkom Indonesia
- f. Piala Penghargaan Best IT dan *Dat Tech Governance* 2018;
- g. Piagam Penghargaan Inovasi dan Transformasi Digital “ *Indonesia Toward Industry 4.0 ERA*”;
- h. Piagam penghargaan Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia 2019;
- i. Piagam penghargaan IT Works Top Digital Awards 2019 “ *Top Digital Transformation Rerdiness 2019*”;
- j. Piagam Penghargaan IT Works Top Digital Awards 2019 “ *Top Leader on Digital Implementation 2019*”;
- k. Piagam Penghargaan IT Works Top Digital Awards 2019 “ *Top Digital Implementation 2019 on City Government # Level Star 4.*

4.1.1.16. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil. Adapun keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.30
Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,08%
				Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	16,50%

Sumber: DTKK,UKM Kota Jambi 2020

Peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, kemandirian, kedewasaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha. Sasaran strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sama dengan sasaran dan indikator sasaran yang tercantum pada RPJMD, yakni Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dan Persentase koperasi berkualitas.

Pada tahun 2019 capaian Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas ditargetkan sebesar 8,08%.

$$\frac{\text{Jumlah UKM Berkualitas}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\% = \frac{(820+50)}{10.763} \times 100\% = 8,08 \%$$

Data sampai dengan 31 Desember tahun 2018, jumlah usaha mikro kecil yang berkualitas sebanyak 820 UMK, dan realisasi capaian pada Tahun 2019 sebesar 50 usaha mikro kecil berkualitas, artinya hal ini memenuhi target yang telah ditetapkan. Usaha mikro kecil dapat dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya;
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha;
- Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja;
- Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk.

Pada Tahun 2019 untuk mencapai pencapaian indikator program dilakukan beberapa kegiatan:

- 1) Kegiatan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa peralatan pendukung usaha bagi pelaku usaha kecil dan usaha mikro, yang menjadi anggota koperasi.

Diharapkan dengan bantuan peralatan ini, mampu memberikan motivasi dan meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha kecil dan usaha mikro anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya.

2) Kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mengembangkan usahanya. Adapun pelatihan yang dilaksanakan, terdiri dari :

- Pelatihan olahan makanan
- Pelatihan sertifikasi halal
- Pelatihan handycraft
- Pelatihan handycraft dari bahan daur ulang

3) Kegiatan penguatan pemasaran bagi produk UMKM.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempromosikan produk-produk UMKM melalui event pameran yang diadakan baik di Kota Jambi maupun diluar Kota Jambi. Kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM secara rutin setiap tahunnya yaitu pameran Jambi EXPO yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari Ulang Tahun Kota Jambi, pameran APEKSI dan pameran Hari Koperasi tingkat Nasional. Pada tahun 2019 Persentase Koperasi Berkualitas ditargetkan sebesar 16,06% dengan capaian sebesar 16,5%.

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\% = \frac{(30 + 6)}{218} \times 100\% = 16,5\%$$

Di akhir tahun 2018, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 30 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 218. Pada tahun 2019, jumlah koperasi berkualitas bertambah 6 koperasi, sehingga total jumlah koperasi berkualitas yaitu 36 koperasi. Dengan demikian, persentase capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan.

Koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi;
- Tertib administrasi (memiliki buku 16);
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungan dalam 1 tahun;
- Melaksanakan RAT;
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK);
- Peningkatan jumlah anggota;
- Memiliki dana pendidikan;
- Memiliki dana sosial;
- Penyelenggaraan audit;
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP.

Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua (dua) program urusan yakni program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kerja pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.468.565.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.310.555.140 atau 89,24%

Pada tahun 2019, prestasi yang diraih oleh urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional berupa Penghargaan Bhakti Koperasi sebagai tokoh masyarakat (Ketua TP PKK) Kota Jambi yang memiliki kontribusi untuk memajukan gerakan Koperasi dan UKM Kota Jambi.

4.1.1.17. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada dua misi. Pertama, Misi 1 yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Kedua, Misi 4 yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Realisasi Investasi. Adapun keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.31
Keterkaitan Urusan Penanaman Modal
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perizinan dan non Perizinan	85,5 %	83,70%
2	Meningkatkan realisasi investasi	Realisasi Investasi	430,5 M	1,055T

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2020

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 memiliki 2 (dua) program urusan yakni program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan program program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 3.993.435.000	Rp. 3.619.977.353	(90,65%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.348.815.972</u>	<u>Rp. 3.957.185.601</u>	(90,99%)
Total Anggaran	Rp. 8.342.250.972	Rp. 7.577.162.954	(90,83%)

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Semua Perusahaan yang berinvestasi dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000.- wajib untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulannya melalui sistem LKPM Online (langsung ke BKPM RI).
2. Dari LKPM tersebut Realisasi Investasi PMA/PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal yang terbit pada tahun 2019 dengan target Rp. 430.500.000.000,- didapat Realisasi Penanaman Modal sebesar Rp. 1.055.269.443.825.- untuk periode Januari s/d September 2019 (3 Triwulan) dengan status sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh BKPM dari 45 Perusahaan yang melapor.
3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui 9 unsur pelayanan yang dinilai. Berdasarkan survey tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perizinan terpadu pada DPMPTSP Kota Jambi mendapat Nilai sebesar 83,70 % atau kategori sangat BAIK “ B “.
4. Penerbitan izin usaha baru sebanyak 6.214 perizinan, izin IMB sebanyak 3.672 perizinan, izin usaha lainnya sebanyak 1.941, izin usaha perawat dan sejenisnya sebanyak 601 dan izin yang diregistrasi sebanyak 4.438 perizinan.

Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah meraih kembali penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai *Role Model* unit penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik.

4.1.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan. Adapun keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.33
Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga
dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	Data belum dikeluarkan oleh Bappenas

Sumber: *Dispora Kota Jambi 2020*

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dispora Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019	
			TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Organisasi	40%	41%
2.	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Cabang Olahraga Prestasi	71,11%	71,11%

Sumber: *Dispora Kota Jambi 2020*

Pada tahun 2019, Dispora Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan. Adapun alokasi anggaran Dispora Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 7.752.810.000	Rp. 7.490.257.032	(96,61%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.197.384.718</u>	<u>Rp. 3.035.383.744</u>	(94,93%)
Total Anggaran	Rp.10.950.194.718	Rp.10.525.640.776,-	(96,12%)

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemuda dan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun anggaran 2019.

Adapun prestasi yang diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Tim Sepak Takraw Kota Jambi Juara Umum Sepak Takraw pada Kejuaraan Daerah Sepak Takraw 2019;
- Tim Sepak Bola Wanita Kota Jambi Juara Pertama pada Piala Menpora U-17;
- Tim Sepak Bola Kota Jambi Juara Pertama pada Piala Menpora U-16;
- Tim Olahraga Tradisional Terompah Juara Kedua pada Festival Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi antar Pelajar SLTA Sederajat;
- Tim Olahraga Tradisional Lomba Balok Juara Kedua pada Festival Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi antar Pelajar SLTA Sederajat;

- Tim Olahraga Tradisional Egrang Juara Kedua pada Festival Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi antar Pelajar SLTA Sederajat;
- Tim Olahraga Tradisional Hadang Juara Pertama pada Invitasi Olahraga Tradisional antar Pelajar SLTA Sederajat Tingkat Provinsi;
- Tim PSSI Kota Jambi Juara Pertama pada Liga Berjenjang Piala Soeratin U-13 dan U-15;
- Tim Taekwondo Kota Jambi Juara Umum 2 Kategori Cadet pada Kejurnas Pelajar Taekwondo ICST 3 di Ciracas;
- Tim Kota Jambi yang diwakili oleh Club Siginjai Roller Skate (SRS) meraih perolehan 4 Emas, 5 Perak, dan 4 Perunggu pada Kejuaraan Nasional antar Club se-Indonesia di Bekasi;
- Tim Marching Band Bahana Tanah Pilih Binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Juara Umum pada Event Jambi Marching Championship (JMC);
- 8 Orang Teknopreneur Kota Jambi Lolos Tingkat Nasional dan Mendapat Penghargaan serta Dukungan Dana dari Pemerintah;
- 2 Orang Pemuda JPI Terpilih sebagai Perwakilan Kota Jambi di Tingkat Nasional.

4.1.1.19. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan. Urusan Kebudayaan pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) program urusan yakni program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata, dengan satu kegiatan urusan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.678.488.000	Rp. 2.432.084.726	(90,80%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.608.214.386.</u>	<u>Rp. 3.255.816.407</u>	(90,23%)
Total Anggaran	Rp 6.286.702.386	Rp. 5.687.896.253	(90,48%)

Adapun capaian beberapa kegiatan urusan kebudayaan pada tahun 2019 adalah Festival dan Carnaval Angso Duo; dan Malam Apresiasi Seni dan Budaya Pentas Tanah Pilih.

4.1.1.20. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Perpustakaan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perpustakaan	65	75
		Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	5.75	5.75

Sumber: DKP Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, urusan Perpustakaan melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan. Alokasi anggaran belanja langsung untuk urusan perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi untuk tahun anggaran 2019 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp.1.269.916.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 97.16 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.233.854.533 (98%).

Adapun capaian dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Buku karya cetak sebanyak 5.605 eksemplar;
- Jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 32.423 orang;
- Jumlah transaksi peminjaman sebanyak 5.406 judul;
- Melestarikan bahan pustaka sebanyak 100 eksemplar;
- 40 orang petugas perpustakaan mengikuti Bimtek;
- Membuat 3 MOU antar perpustakaan dan stakeholder;
- Merilis ebook sebanyak 636 judul;
- Melaksanakan 4 kegiatan ekspose perpustakaan;
- Menyediakan 59 pojok baca/perpustakaan;
- Memonitoring dan evaluasi 171 pojok baca/perpustakaan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Adapun prestasi yang diraih oleh DKP Kota Jambi adalah meraih peringkat 2 pada Lomba Cerita Anak Tingkat Provinsi.

4.1.1.21. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kearsipan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kepatuhan PD terhadap Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah PD yang menerapkan SIKD (Sistim Informasi Kearsipan Dinamis)	0	0
		Persentase PD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar.	28	28

Sumber: DKP Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, urusan Kearsipan melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Adapun alokasi anggaran urusan Kearsipan pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.747.363.500	Rp. 2.651.382.446	(96,51%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.210.362.375</u>	<u>Rp. 4.528.735.969</u>	(86,92%)
Total Anggaran	Rp 11.971.870.548	Rp. 11.233.973.677	(90,23%)

Adapun capaian dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1200 buah arsip yang terselamatkan
- Terdapatnya 20 arsiparis/pengelola arsip
- 4 Perwal tentang pengolahan kearsipan.
- 1200 berkas arsip yang diolah.
- Asistensi pembinaan PD, bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan sebanyak 31.
- Asistensi pembinaan Ormas, Orpol dan Perusahaan sebanyak 31.
- 16 PD yang mendapatkan audit dan monitoring kearsipan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Adapun prestasi yang diraih oleh DKP Kota Jambi adalah meraih peringkat 2 pada Lomba Cerita Anak Tingkat Provinsi.

4.1.2. URUSAN PILIHAN

4.1.2.1. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB. Adapun keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.37
Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%

Sumber: DPK Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Pariwisata pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan wisatawan, dengan target sebanyak 450.000 orang terealisasi sebanyak 637.598 orang wisatawan;
2. Jumlah PAD dari pajak dan retribusi dari usaha pariwisata, ditargetkan sebesar Rp. 43.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.378.830.319;
3. Jumlah rata-rata lamanya kunjungan wisata di Kota Jambi, ditargetkan selama 3 (tiga) hari terealisasi 3 (tiga) hari.

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan Pariwisata pada tahun 2019 sebesar Rp 1.492.587.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.471.244.200,00 atau 98,57% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2019 untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan ke dalam program pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata dengan kegiatan pengembangan dan promosi pariwisata daerah dan kegiatan pengembangan promosi kebudayaan dan pariwisata daerah. Adapun capaian program dan kegiatan urusan pariwisata pada tahun 2019 diantaranya adalah terselenggaranya Haul Pangeran Wiro Kusumo dan Haul Tuanku Keramat Tambak, Lomba Perahu Tradisional dan Ketek Hias, Carnaval Angso Duo, Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi, dan Pameran Promosi Pariwisata di dalam dan luar daerah.

4.1.2.2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Persentase Produktivitas Perikanan	2,5 %	7,20%
		Peningkatan Produktivitas perikanan perairan umum	0.71 %	0,72%
		Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	2.437 Ton	3.566,379 Ton
		Peningkatan Nilai Tambah produk perikanan	2.040 Ton	2.003,25 Ton
		Peningkatan Konsumsi Ikan	33,3 Kg/Kap/Th	34,5 KG/Kap/Th
		Jumlah produksi benih di PBAT	1.400.000 Ekor	1.600.500 Ekor

Sumber: DPKP Kota Jambi 2020

Urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2019 telah melakukan beberapa kegiatan yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan, pengembangan bibit ikan unggul, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan, serta pendampingan terhadap kelompok tani budidaya ikan. Program dan kegiatan ini untuk mendukung ketersediaan pangan, melalui produksi ikan budidaya di Kota Jambi.

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dengan 4 (empat) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 adalah Rp. 3.466.070.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.325.424.230,00 atau 95,94%.

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Gemar ikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan);
2. Lomba Memasak Serba Ikan dan Inovasi masakan hasil laut;
3. Bimbingan Teknis Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan;
5. Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Jambi terdapat beberapa permasalahan, seperti:

1. Menurunnya kualitas perairan akibat pencemaran limbah industri maupun rumah tangga dan aktifitas peti di hulu (Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Muaro Bungo) serta iklim yang tidak menentu menyulitkan pembudidayaan dalam pengaturan pola tanam yang tepat guna menghindari mortalitas yang tinggi;
2. Terbatasnya pasokan benih ikan yang berkualitas, terutama untuk benih ikan nila;

3. Harga pakan ikan yang cenderung meningkat, menyebabkan tingginya cost pada usaha budidaya, sehingga memberatkan petani pembudidaya ikan dan menyebabkan KJA dan kolam yang tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan terbengkalai;
4. Terbatasnya kemampuan SDM petani dan petugas.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada petani pembudidaya ikan maupun petugas penyuluh perikanan;
2. Melakukan pelatihan gerakan pakan ikan mandiri guna menekan cost pada usaha budidaya ikan;
3. Mengoptimalkan produksi benih ikan unggul di BPAT Simpang Rimbo dan Danau Teluk dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM;
4. Melakukan sosialisasi Undang-undang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

4.1.2.3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Urusan Pertanian pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni program Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dengan 9 (sembilan) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pertanian pada tahun 2019 adalah Rp. 3.144.072.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.933.078.300,00 atau 93,29%.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Kota Jambi mencoba menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau *Good Manufacturing Practise* (GMP) yang bertujuan menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen, mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan.

Program dan kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dapat didorong lagi untuk mendukung distribusi dan akses terhadap pasar yang lebih bagi komoditas pertanian di Kota Jambi. Koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait untuk mendukung bergeraknya industri hilir dari sektor pertanian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan nilai tambah pelaku usaha pertanian di Kota Jambi.

Capaian sampai dengan tahun 2019 urusan Pertanian adalah dengan pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan yaitu dengan penyediaan calon induk

dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit yang antara lain:

1. Menyediakan calon pohon induk unggul hortikultura (lokal dan nasional) yang bersertifikasi.
2. Menyediakan bibit unggul hortikultura (lokal dan nasional) yang bersertifikasi.
3. Menyediakan koleksi tanaman buah-buahan langka.
4. Membina penangkar benih hortikultura yang bersertifikasi.

Adapun capaian bidang Peternakan pada tahun 2019 antara lain adalah Pelayanan kesehatan hewan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan kegiatan promosi produk peternakan sebanyak 2 (dua) kali dan dilaksanakan di dalam daerah Kota Jambi tepatnya pada peringatan puncak semarak hari jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ke 617 dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke 73 tahun 2019 berlokasi di Lapangan Transmart yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Juni 2019, dan Hari Ulang Tahun Propinsi yang ke 62, dilaksanakan di lapangan Gubernur pada tanggal 3 – 6 Januari 2019.

Selain itu pelaksanaan kegiatan operasi pasar daging sapi di Kota Jambi menjelang hari raya Idul Fitri telah membantu masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau dan kegiatan operasi pasar daging sapi ini juga mempengaruhi tidak terjadinya lonjakan harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya lainnya.

Dalam melaksanakan urusan Pertanian di Kota Jambi terdapat beberapa permasalahan, seperti:

1. Berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian akibat alih fungsi atau konservasi lahan pertanian;
2. Menurunnya keseimbangan ekosistem akibat penggunaan pestisida/ herbisida;
3. Sebagian petani enggan untuk menerapkan teknologi baru budidaya tanaman;
4. Belum optimalnya peran penyuluh pertanian terhadap diseminasi dan peningkatan produksi;
5. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi lahan pertanian yang masih berproduksi seperti melakukan gerakan pemanfaatan lahan sempit/lahan pekarangan;
2. Melakukan pelatihan dan bimbingan penggunaan pestisida/herbisida ramah lingkungan;
3. Optimalisasi peran penyuluh pertanian sebagai garis terdepan dalam rangka peningkatan pemahaman pertanian sempit berdaya, memberikan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani dalam rangka penerapan teknologi pertanian perkotaan;
4. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis penambahan nilai produk pertanian;

5. Melakukan bimbingan pelatihan kepada peternak tentang budidaya yang benar dan penggunaan tatacara penggunaan pakan yang baik dan ekonomis.

4.1.2.3. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.39
Keterkaitan Urusan Perdagangan
dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	63,34

Sumber: DPP Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019 target persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan sebesar 36% dengan realiasi sebesar 63,34%.

Formulasi yang dipergunakan untuk mengukur indikator sasaran ini yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perdagangan pada renstra tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perdagangan pada renstra tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100 \%$$

$$\frac{101 \% + 40 \% + 40 \% + 489,66 \% + 57,4 \% + 36 \%}{6} \quad (\times 100 \%)$$

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui hasil realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu:

= hasil penjumlahan - dengan sisa target RPJMD (tahun n+4)

$$= 127,34 \% - 64 \% = 63,34 \%$$

Dengan demikian adapun realisasi kinerja sasaran persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan yang terdapat dalam RPJMD sebesar 63,34 %.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perdagangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi retribusi

Realisasi indikator kinerja sasaran di tahun 2019 di targetkan sebesar 100 % dalam Renstra, dan realisasinya sebesar 101 %, maka hasil yang capaian kinerja sasaran ini sebesar 101%, yang diperoleh dari 2 (dua) sektor yaitu :

- Sektor retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp. 4.100.247.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.186.400.271,00 atau 102,10%.
- Sektor retribusi tera/tera ulang (UTTP Metrologi) ditargetkan Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi Rp 518.766.900,00 atau 129,70%.

2. Persentase pasar yang bersih dan tertib

Realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2019 ditarget sebesar 40 % dan realisasinya sebesar 40 % maka hasil yang capaian kinerja sasaran ini sebesar 100 %.

3. Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 di targetkan sebesar 40 % dan realisasinya sebesar 41 %, maka hasil yang capaian kinerja sasaran ini sebesar 102,50.

4. Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Indikator kinerja sasaran di tahun 2019 di targetkan sebesar 39 % dalam Renstra, dan realisasinya sebesar 428,66 %, maka capaian kinerja sasaran ini sebesar 1.097%.

5. Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Indikator kinerja sasaran di tahun 2019 di targetkan sebesar 43 % dalam Renstra, dan realisasinya sebesar 57,40 %, maka hasil capaian kinerja sasaran ini sebesar 133,48%.

6. Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Indikator kinerja sasaran di tahun 2019 di targetkan sebesar 36 % dalam Renstra, dan realisasinya sebesar 36 %, maka hasil yang capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%.

Urusan Perdagangan pada tahun 2019 memiliki 2 (dua) program urusan yakni program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran; dan program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pengawasan Industri dan Perdagangan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp.11.092.931.060	Rp. 10.100.732.177	(91,06%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 8.905.556.345</u>	<u>Rp. 7.874.584.576</u>	(89,87%)
Total Anggaran	Rp.19.998.487.405	Rp.17.973.322.003	(92,24%)

Adapun beberapa capaian kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perdagangan pada tahun 2019 diantaranya adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian di pasar rakyat;

2. Terlaksananya pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan serta penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrolgogian;
3. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
4. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar.

4.1.2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.40
Keterkaitan Urusan Perindustrian
dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	19,30

Sumber: DPP Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019 target persentase daya saing produk IKM ditargetkan sebesar 4,3% dengan capaian sebesar 19,30%.

Formulasi yang dipergunakan untuk mengukur indikator sasaran ini yaitu:

Realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)

$$= \frac{\text{Jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)}}{\text{Hasil penjumlahan}} \times 100 \% - \text{sisa target RPJMD (tahun n+4)}$$

Untuk memperoleh angka pertumbuhan IKM dengan rumus:

Jumlah IKM tahun pelaksanaan (tahun n) – jumlah IKM tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan jumlah IKM s/d tahun pelaksanaan dikalikan 100 %
Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu:

$$\frac{36,92 \% + 155,96 \%}{2} \times 100 = 96,44 \%$$

$$\begin{array}{r} \text{Pertumbuhan IKM:} \\ 3255 - 3120 \\ \hline 3255 \end{array} \times 100 \% = 4,14 \%$$

$$\begin{array}{r} \text{Realisasi:} \\ 96,44 \% \\ \hline 4,14 \% \end{array} \times 100 \% = 23,29 \% - 4 \% = 19,30 \%$$

Dengan demikian adapun realisasi kinerja sasaran meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil yang terdapat dalam RPJMD sebesar 19,30 %

Urusan Perindustrian pada tahun 2019 memiliki satu program urusan yakni program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pengawasan Industri dan Perdagangan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2019 sebesar Rp.1.736.048.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.645.673.620,00 (94,79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp.1.736.048.000	Rp. 1.645.673.620	(94,79%)
Belanja Tidak Langsung	sudah dihitung pada BTL urusan perdagangan		
Total Anggaran			

Adapun beberapa capaian kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perindustrian pada tahun 2019 diantaranya adalah pelatihan-pelatihan, pameran, lomba desainer etnik Jambi, serta mengirimkan 17 (tujuh belas) IKM pengerajin batik Jambi magang pada Batik Gentongan Sumber Arafat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura Surabaya Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dari pengiriman pengrajin tersebut dapat menambah pengetahuan, ketrampilan dan wawasan bagi pengrajin batik sehingga dapat lebih memordenisasi proses pembuatan batik Jambi yang berdaya saing tinggi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2019.

4.1.3 URUSAN PENUNJANG

4.1.3.1. INSPEKTORAT

Dalam rangka menuju *good governance*, ada tuntutan Reformasi Birokrasi yang telah mendorong adanya konsekuensi logis, perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, termasuk didalamnya jajaran Inspektorat Kota Jambi. Inspektorat Kota Jambi sebagai instansi yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Inspektorat mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan

Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.41
Keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B
				Indeks survey persepsi Korupsi	3,65	Data belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK RI	75%	60%	Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dan Pihak III dalam penyelesaian Tindak Lanjut	Meningkatkan pembinaan terhadap penyelesaian Tindak Lanjut.
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal	75%	75%	Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dan Pihak III dalam penyelesaian Tindak Lanjut	Meningkatkan pembinaan penyelesaian Tindak Lanjut .
3	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi	B	B	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap SAKIP	Meningkatkan pembinaan terkait SAKIP
4	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3	Masih lemahnya SPIP pada Perangkat Daerah	Peningkatan SPIP di tiap Perangkat Daerah.
5	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	0	0	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memenuhi syarat WBK	Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah.
6	Level kapabilitas APIP	Level III	Level III	Rendanya kualitas dan kuantitas SDM sebagai syarat pemenuhan level	Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, Inspektorat Kota Jambi melaksanakan 5 (lima) program yaitu 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program urusan, yakni program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan 25 kegiatan. Adapun alokasi anggaran Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.393.300.000	Rp. 5.048.266.784	(93,60%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 6.569.339.323</u>	<u>Rp. 6.285.882.714</u>	(95,69%)
Total Anggaran	Rp 11.962.639.323	Rp. 11.334.043.854	(94,75%)

Prestasi yang dicapai Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut :

1. Capaian tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Jambi yang telah mencapai Level III oleh BPKP RI;
2. Capaian Kapabilitas APIP yang telah mencapai Level III oleh BPKP RI;
3. Capaian Pemerintah Kota Predikat Terbaik Se-Indonesia atas Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi oleh Korsupgah KPK.

4.1.3.2. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Bappeda mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2019 adalah nilai B. Adapun realisasi target tersebut adalah nilai B dengan angka yang sedikit meningkat. Adapun keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.43
Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
1	Penetapan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan proses dan peraturan perundangan	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, Bappeda Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Adapun alokasi anggaran Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 8.445.581.245	Rp. 7.849.125.210	(92,94%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.930.877.178</u>	<u>Rp. 3.946.957.472</u>	(80.05%)
Total Anggaran	Rp 13.376.458.423	Rp. 11.796.082.682	(88,19%)

Adapun beberapa hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan KUA PPAS;
2. Menyusun buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah serta stakeholders lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan;
4. Melakukan penyusunan kajian yakni kajian Strategi Pemenuhan Hak-hak Bagi Penyandang Disabilitas Kota Jambi, Efektifitas Penanganan Pelayanan Kebakaran di Kota Jambi, Rencana Aksi Daerah Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan Kota Jambi, LP2KD Kota Jambi Tahun 2019, Implementasi Kerjasama Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, Identifikasi Potensi dan Timbulan Limbah B3 di Kota Jambi, Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan Kewirausahaan di Kota Jambi, Kelayakan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Jambi, Indeks Analisis Gini Ratio, Analisis Kebutuhan Masyarakat Kota Jambi, Analisis Kebutuhan Guru, Analisa Titik-titik Genangan di Kota Jambi, Penyusunan Sistem Informasi Database Infrastruktur Berbasis GIS, Peninjauan Kembali RTRW Kota Jambi 2013-2033 dan Penyusunan Laporan IKLI.

4.1.3.3. KEUANGAN

Keuangan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Sedangkan BPPRD mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.45
Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	16,13%

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dan indikator sasaran pada Tahun 2019 yaitu Nilai SAKIP dengan target “B” dapat dicapai dengan realisasi “B”.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.46
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	Menunggu hasil audit oleh BPK

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2020

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran strategis BPKAD ada 2 (dua) indikator, yaitu Penetapan APBD dan Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan. Pada Tahun 2019, capaian indikator penetapan APBD terealisasi Tepat Waktu, dimana APBD paling lambat 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya, dan APBDP Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Ketepatan waktu tersebut dapat dilihat melalui penetapan PERDA APBD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, dan Perda APBDP Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019. Sementara itu, capaian indikator Opini BPK terhadap pengelola keuangan, dengan target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 menunggu hasil audit oleh BPK yang akan keluar sebelum pertengahan tahun 2020.

Pada tahun 2019, BPKAD Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah. Adapun alokasi anggaran BPKAD Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp 11.434.556.292	Rp.10.244.345.230	(89,60%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 7.895.107.896</u>	<u>Rp. 4.648.115.709</u>	(58,87%)
Total Anggaran	Rp 19.329.664.188	Rp.14.892.460.939	(77,04%)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2019 mencapai Rp.393.552.656.639,79 atau 103,09% dari target sebesar Rp.381.743.685.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 23,83% terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 338.892.256.292,96 maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13% atau naik Rp. 54.660.774.046,83. Jadi, indikator sasaran RPJMD yakni Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2019 dengan target “8%” dapat dicapai dengan realisasi “16,13%”.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh BPPRD	Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD	100%	105,79%.

Sumber: BPPRD Kota Jambi 2020

Indikator kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi, yaitu persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD, dimana pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPPRD Kota Jambi pada Tahun 2019:

- Dari sektor pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 242.090.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 256.028.625.688,55 atau 105,76%;
- Dari sektor retribusi daerah (retribusi jasa usaha pemakaian billboard) yang dikelola oleh BPPRD ditargetkan sebesar Rp 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 23.300.000,00 atau 77,67 %;
- Pendapatan dari sektor denda pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.448.407.502,00 terealisasi sebesar Rp 1.621.871.396,00 atau 111,98%.

Dengan demikian, secara keseluruhan target pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD pada Tahun 2019 sebesar Rp. 243.568.407.502,00 terealisasi sebesar Rp.257.673.797.084,55 atau 105,79%.

Pada tahun 2019, BPPRD Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun alokasi anggaran BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 8.468.339.000	Rp. 6.817.301.960	(80,50%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.18.188.795.385</u>	<u>Rp.16.949.867.517</u>	(93,19%)
Total Anggaran	Rp. 26.657.134.385	Rp.23.767.169.477	(89,16%)

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 diantaranya:

- Pemasangan Tapping Box di beberapa tempat usaha seperti Hotel, Restoran/Rumah Makan, TMM, Parkir, Tempat Hiburan, dll;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat;
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait;
- Peningkatan kualitas aparatur pajak daerah;
- Updating basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan;
- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari obyek Pajak Daerah;
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendapatan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya;
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak Daerah;
- Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak Daerah;
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak;
- Melakukan pengkajian peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu:

- Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak;
- Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan;

- c. Penegakan hukum (*Low Infocement*) yang lemah;
- d. Belum optimalnya penggunaan TI dalam penyajian data dan informasi;
- e. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah;
- f. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak belum jelas;
- g. Sistem administrasi penerimaan yang kurang optimal.

Upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur dengan mengikut sertakan pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan;
- c. Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah;
- d. Memaksimalkan sistem computerized pajak daerah;
- e. Penyempurnaan data base wajib Pajak;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

4.1.3.4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.48
Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	56	56,2

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2020

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan melihat:

1. Kualifikasi (pendidikan) ASN;
2. Diklat Kepemimpinan;
3. Mengikuti diklat teknis 20 JP dalam setahun.

Berikut solusi untuk permasalahan di atas, yaitu :

1. Memberi kesempatan pada ASN untuk melanjutkan pendidikan dengan penerbitan surat izin belajar bagi yang melanjutkan dengan biaya sendiri atau penerbitan surat tugas belajar bagi yang mendapatkan beasiswa dari kementerian, lembaga atau swasta;
2. Untuk diklat Teknis setiap tahun wajib 20 JP bagi setiap ASN dan untuk memenuhi diklat tersebut dibutuhkan anggaran yang besar;
3. Agar OPD aktif mendaftarkan ASN untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan kementerian, BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi baik itu kontribusi atau diklat tanpa kontribusi.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi pada Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan	%	94	98.64	104.94
2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	87	98.56	113.29
3	Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai	%	20	12.36	61.80
4	Persentase Pengembangan Kompetensi	%	44.5	45.08	101.30
5	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik	%	84	98.46	117.21
6	Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	%	1.27	0.56	226.79

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2020

BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) program urusan yakni program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Total anggaran yang dialokasikan untuk BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 7.868.816.500	Rp. 6.093.897.824	(77,44%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.21.360.852.974</u>	<u>Rp.11.918.011.951</u>	(55,79%)
Total Anggaran	Rp.29.229.669.474	Rp.18.011.909.775	(61,62%)

Adapun prestasi yang diraih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah secara nasional dan internasional belum ada, Prestasi yang diraih secara lokal Antar OPD pada tahun 2019 yaitu :

1. Juara 1 Lomba Kebersihan antar OPD;
2. Juara 1 Senam Pekan Olah Raga Korpri;
3. Juara 1 Tenis Meja Putri Pekan Olah Raga Korpri;
4. Capaian Kinerja yang diraih yaitu penilaian Sakip dengan mendapat nilai 79,71 (BB) sangat baik.

4.1.4. URUSAN PENDUKUNG

4.1.4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan Pendukung. Sekretariat Daerah Kota Jambi terdiri dari 11 bagian merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.50
Keterkaitan Sekretariat Daerah
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B

Sumber: Setda Kota Jambi 2020

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.51
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Setda Kota Jambi pada Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, humas, hukum dan kerjasama	Preastasi EKPPD	Sangat tinggi	Sangat Tinggi
	Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan	87,50%	62,50%
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan kesra	Komponen standar UKPBJ	6,00%	6,00%

Sumber: Setda Kota Jambi 2020

Untuk persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dengan target 87,50% terealisasi sebesar 62,50% dengan capaian 71,42%, dikarenakan target Setda pada tahun 2019 sebanyak 7 perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dibandingkan dengan 8 perjanjian kerjasama, tetapi pada realisasinya sebanyak 20 perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dibandingkan dengan 32 perjanjian kerjasama yang masuk ke Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi, hal ini disebabkan karena Sistem belum terhubung dan juga pihak yang ingin bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi belum

memiliki anggaran, jadi secara persentase target belum tercapai, tetapi secara kinerja atau jumlah perjanjian kerjasama telah melebihi target.

Adapun alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 62.814.736.650	Rp. 59.213.820.049	(94,27%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 17.100.474.526</u>	<u>Rp. 15.496.260.096</u>	(90,62%)
Total Anggaran	Rp. 79.915.211.176	Rp. 74.710.080.145	(93,49%)

Anggaran di atas sudah termasuk biaya operasional KDH/WKDH, Sekda dan pendukung kegiatan Staf Ahli dan Asisten Sekda. Dalam hal pendapatan Sekretariat Daerah juga mengelola PAD dari Gedung Putro Retno dan Kantin Hijau dengan target Rp. 100.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 42.300.000,- atau 42,3%. Tidak tercapainya terget ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menyewa gedung Putra Retno dan juga sudah banyaknya alternatif pilihan.

Secara umum tugas dan fungsi bagian di Setda Kota Jambi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
2. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
3. Optimalisasi kinerja pegawai dan peningkatan kapasitas SDM aparatur;

Prestasi yang diraih Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, penerimaan penghargaan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 dengan predikat nilai tingkat akuntabilitas kinerja B (62,99);
2. Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, dalam rangka peringatan hari HAM sedunia ke 71.

4.1.4.2. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan Pendukung. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat DPRD mengacu pada Misi 1, yakni Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.52
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	17 Ranperda	11 Ranperda	64,70
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	5 paripurna 30 rapat Banmus	5 paripurna 20 rapat Banmus	100 66,66
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	2 kali reses 20 turun lapangan	2 kali reses 21 turun lapangan	100 105
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	14 konsultasi 8 study banding 1 kali kunker	14 konsultasi 8 study banding 1 kali kunker	100 100 100
		6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPRD	51 media elektronik 513 media online 90 media cetak 55 liputan pro parlemen	49 media elektronik 486 media online 89 media cetak 42 liputan pro parlemen	96,07 94,73 98,88 76,36
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD	65 kali	35 kali	53,84
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD	225 stel pakaian 45 ID card 45 pin 45 duplikat pin	225 stel pakaian 45 ID card 45 Pin 45 duplikat pin	100 100 100 100
		Rata-rata capaian			

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi 2020

Tidak tercapainya realisasi dari indikator kinerja tingkat realisasi penetapan ranperda sebesar 64,70 % dikarenakan belum disampaikannya draft ranperda yang juga belum dilengkapinya naskah akademik. Untuk kedepannya lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah pengusul Perda tersebut.

Pada tahun 2019, Sekretariat DPRD Kota Jambi melaksanakan 2 Program Urusan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD. Adapun alokasi anggaran Dinas Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2019:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 50.022.348.000	Rp. 39.523.726.477	(79,01%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 31.066.516.522</u>	<u>Rp. 28.331.665.443</u>	(91,20%)
Total Anggaran	Rp. 81.088.864.522	Rp. 67.855.391.920	(83,68%)

Dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan tugas dan fungsi terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang menguasai peraturan bidang hukum, peraturan tentang keuangan serta pengadaan barang/jasa;

2. Penyerapan anggaran belum maksimal karena pelaksanaan program dan kegiatan DPRD mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD;
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang-undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP, Permendagri, Permenpan maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru;
4. Koordinasi antar bagian yang kurang sehingga sering terjadi salah pengertian atau *miss communication* dalam penyampaian peraturan, kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan kedepan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP, Permendagri, Permenpan dan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa);
2. Terus berupaya memberi masukan kepada Anggota DPRD tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah;
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dengan adanya rapat evaluasi antar bagian yang berkelanjutan.

4.1.5. URUSAN KEWILAYAHAN

4.1.5.1. KECAMATAN

Urusan Kewilayahan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kota Jambi. Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014, Kecamatan dalam Kota Jambi mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah.

Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada 2 (dua) misi. Pertama, Misi 1 yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Misi 5 yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Adapun keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.53
Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, Kecamatan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan Bangkit Berdaya; Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan; Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan; Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan; dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Untuk Kegiatan Bangkit Berdaya yang bertujuan membantu pembangunan di Kota Jambi dengan mengajak partisipasi masyarakat secara swadaya sejak Tahun 2014 sampai saat ini. Dari kegiatan Bangkit Berdaya ini mendapatkan antusias dari masyarakat dan dinilai cukup berhasil sehingga kegiatan ini menjadi unggulan inovasi daerah Kota Jambi. Adapun realisasi anggaran kegiatan Bangkit Berdaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.54
Realisasi Anggaran Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2019

No	Kecamatan	Anggaran Kegiatan Bangkit Berdaya	Realisasi Anggaran Kegiatan Bangkit Berdaya	%
1	Kota Baru	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
2	Telanaipura	1.000.000.000	999.992.130	99,99%
3	Jelutung	1.000.000.000	998.997.175	99,90%
4	Pasar Jambi	216.000.000	215.743.100	99,88%
5	Jambi Selatan	1.000.000.000	998.165.350	99,82%
6	Jambi Timur	700.000.000	699.893.400	99,98%
7	Danau Teluk	600.000.000	549.144.672	91,52%
8	Pelayangan	600.000.000	598.600.000	99,77%
9	Alam Barajo	1.000.000.000	999.849.280	99,98%
10	Danau Sipin	1.000.000.000	978.598.788	97,86%
11	Paal Merah	1.000.000.000	997.966.050	99,80%
	Jumlah	9.116.000.000	9.036.949.945	99,13%

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2020

Pada tahun 2019, total anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk seluruh Kecamatan adalah Rp.60.131.616.939 dengan realisasi sebesar Rp. 55.405.972.856 atau 92,14%, sedangkan total anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp. 78.826.641.600 dengan realisasi sebesar Rp. 73.938.975.828. Untuk melihat anggaran secara lengkap untuk seluruh kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.55
Pagu Anggaran Belanja seluruh Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	ANGGARAN TAHUN 2019			REALIASI ANGGARAN TAHUN 2019			PERSENTASE (%)		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	Kota Baru	5.619.529.297	7.104.161.500	12.723.690.797	5.275.874.895	6.691.833.352	11.967.708.247	93,88%	94,20%	94,06%
2	Telanaipura	5.299.379.990	7.263.182.500	12.562.562.490	5.068.723.032	7.026.697.918	12.095.420.950	95,65%	96,74%	96,28%
3	Jelutung	6.594.291.203	8.330.113.000	14.924.404.203	5.899.798.134	7.727.243.453	13.627.041.587	89,47%	92,76%	91,31%
4	Pasar Jambi	3.720.025.047	5.214.138.600	8.934.163.647	3.180.546.221	4.917.286.467	8.097.832.688	85,50%	94,31%	90,64%
5	Jambi Selatan	6.009.485.537	6.553.695.000	12.563.180.537	5.321.396.384	6.385.629.416	11.707.025.800	88,55%	97,44%	93,19%
6	Jambi Timur	6.827.366.019	9.642.272.000	16.469.638.019	6.408.859.796	8.966.658.574	15.375.518.370	93,87%	92,99%	93,36%
7	Danau Teluk	4.526.745.198	5.692.329.000	10.219.074.198	4.342.528.007	4.749.935.567	9.092.463.574	95,93%	83,44%	88,98%
8	Pelayangan	5.072.480.605	5.904.915.000	10.977.395.605	4.782.309.695	5.394.146.501	10.176.456.196	94,28%	91,35%	92,70%
9	Alam Barajo	6.510.598.222	8.453.402.000	14.964.000.222	5.870.832.219	8.232.682.357	14.103.514.576	90,17%	97,39%	94,25%
10	Danau Sipin	4.974.903.866	6.991.999.500	11.966.903.366	4.638.271.642	6.625.433.623	11.263.705.265	93,23%	94,76%	94,12%
11	Paal Merah	4.976.811.955	7.676.433.500	12.653.245.455	4.616.832.831	7.221.428.600	11.838.261.431	92,77%	94,07%	93,56%
	PAGU TOTAL	60.131.616.939	78.826.641.600	138.958.258.539	55.405.972.856	73.938.975.828	129.344.948.684	92,14%	93,80%	93,08%

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2020

4.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA JAMBI

4.2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD KOTA JAMBI

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Jambi tahun 2018-2023, dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013-2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Adapun capaian IKU RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.56
Capaian IKU RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019

No	Indikator	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Data belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB
2	Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	9%	24,66%
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5,1	7,22
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,06	52,46
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,33
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,72
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	16,13%
8	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	78,26

Sumber: RPJMD Kota Jambi 2018-2023, OPD Kota Jambi, BPS Kota Jambi 2020

4.2.2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA JAMBI

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 terdapat 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran.

Adapun capaian indikator sasaran RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.57
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2019

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,85
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	56,2
					Nilai SAKIP	B	B	B
					Indeks survey persepsi Korupsi	N/A	3,65	Data belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5	82,15
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	100%
			Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	59,16%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,27
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	76,84
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	44,81
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	63,34

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	90,7
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	8,00%	16,13%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	1,055T
				Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,79%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,08%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	19,30%
					Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	16,5%
			Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	73,2
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,6	14,62
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32	21,32	21,30
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,68
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96%
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,9	94,46
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,1	69,83
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	70%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	70,96
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	Data belum dikeluarkan oleh Bappenas
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60%	65%	62%

Sumber: RPJMD Kota Jambi 2018-2023, OPD Kota Jambi, BPS Kota Jambi 2020

4.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Adapun kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas;
3. Jambi Bugar;
4. Kota Layak Anak;
5. Kegiatan Khusus Lansia;
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119;
7. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas PKM Rawat Inap;
8. Pelayanan Prima Perizinan;
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair;
10. Kepastian Hukum;
11. Peningkatan SDM dan Prasarana bagi Pelaku IKM/UMKM;
12. Laporan Keuangan yang Akuntabel;
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama;
14. Peningkatan Akses dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT;
15. Peningkatan Destinasi Wisata serta Prasarananya;
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik;
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah dan Swasta.

4.4. TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI PANSUS DPRD TERHADAP LKPJ WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018 LALU

Pada pembahasan LKPJ 2018 yang lalu, terdapat 4 (empat) Pansus DPRD Kota Jambi yang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2018. Adapun tanggapan atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2018 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.58
Tanggapan atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2018 Lalu

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
Rekomendasi Pansus I (satu) DPRD Kota Jambi				
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	a .	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi secara konsisten kesekolah-sekolah dan masyarakat, tentang dampak terhadap kemajuan teknologi dan media sosial/dunia maya yang mudah diakses dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan anak-anak yaitu pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga atau masyarakat. Bila terjadi harus dapat dicarikan solusinya.	Untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget, terus dilakukan Sosialisasi Penggunaan internet sehat untuk siswa Dikdas, orang tua dan sekolah, saat ini sudah ada SE tentang Pembatasan Pengguna Gadget serta melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan
		b .	Kampung Bantar harus memiliki rencana kerja serta didukung keuangan dan Kecamatan atau Kelurahan yang menjadi sasaran harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat.	Filosofi Kampung Bantar adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan RT yang Bersih, Aman dan Pintar secara swadaya, Atas inovasi yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut dinilai dan diberikan reward dalam bentuk uang pembinaan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan Bantar
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	a .	Mendata tanah milik Pemerintah Kota yang belum bersertifikat agar segera tidak menjadi penyalahgunaan terhadap asset tanah serta melakukan labelisasi asset tanah agar perlakuan tanah milik Pemerintah Kota Jambi menjadi jelas.	a. Sekarang bidang aset sedang mendata tanah milik Pemkot keseluruhan guna mendapatkan kejelasan status dalam bentuk kepemilikan serta menghindari persengketaan dan penyalahgunaan. Berkenaan dengan itu sudah dilakukan penganggaran untuk sertifikasi dan labelisasi kepemilikan. Selain itu, BPKAD sedang melakukan <i>mapping</i> sebaran aset tanah pemda dalam bentuk data GIS dan akan dilakukan berkelanjutan guna mendapatkan lokasi sebaran tanah beserta koordinatnya sesuai bentuk kepemilikan.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
		b .	BPKAD dalam rangka menertibkan asset Kota Jambi harus didukung dengan APBD, dengan tujuan agar tidak tertunda proses tentang penertiban asset.	b. Bidang Aset saat ini sedang merancang dan menganalisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting terkait penertiban dan pengamanan aset yg meliputi pembentukan regulasi terkait penertiban dan pengamanan aset, serta kedepannya telah memiliki SOP yang kemudian dapat diterapkan penganggarannya sesuai kebutuhan.
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	a .	Dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis serta memotivasi ASN untuk berkarir perlu dilakukan distribusi ASN (fungsional : guru, medis, serta struktural/eselon) sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya manusianya.	a. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis telah dilakukan Distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja, namun kita belum bisa memenuhi kebutuhan PD karena secara umum pemerintah Kota kekurangan ASN
		b .	Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.	b. Untuk meningkatkan kualitas SDM ASN, telah dilakukan diklat Struktural, fungsional dan penilaian potensi dan kompetensi
		c .	Jenjang karir ASN harus secara profesional (melalui seleksi).	c. Penjenjangan karir ASN, telah dilakukan sesuai dengan amanat UU nomor 5/2014 tentang ASN dan PP no 11/2017 tentang Manajemen PNS, dimana pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak dan integritas. Sedangkan untuk jabatan camat dan Lurah dilakukan melalui <i>fit and proper test</i>
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	a .	Dukcapil harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang E-KTP serta fungsi lainnya terhadap pelayanan masyarakat.	Untuk meningkatkan pelayanan e KTP beberapa kegiatan sudah dilakukan antara lain : 1. Melakukan perekaman KPT el melalui jemput bola ke sekolah-sekolah, psantren di kelurahan dan pusat keramaian (mall) termasuk di lokasi <i>car free day</i> . Untuk pelayanan Akta Kelahiran telah dilakukan kerjasama kemitraan dengan dharma wanita Kota jambi, Bhayangkari Polresta dan Sosialisasi akta kelahiran dengan Kepala SD se Kota jambi. 2. Selain itu upaya yang dilakukan sosialisasi dengan kelurahan , Forum RT, BKMT, bahkan dengan kelompok arisan ibu-ibu 3. Untuk akta kematian difasilitasi melalui WhaatsApp no. 082317146688 dan gerakan Disdukcapil Peduli ASN Kota jambi 4. Terkait dengan DPT, Bahwa Pnentuan DPT mutlak kewenangan dari KPU, yang kita lakukan adalah pendampingan dan sinkronisasi data data penduduk dengan batasan kewenangan Disdukcapil.
		b .	Dukcapil harus berkoordinasi dengan KPU terkait dukungan Pemilu dengan melakukan rekonsiliasi data kependudukan Kota Jambi yang masuk dalam DPT.	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
5	Bagian Pemerintahan Umum	a .	Tingkatkan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan agar semua fungsi layanan masyarakat terus meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya.	Untuk meningkatkan pelayanan kelurahan disamping meningkatkan koordinasi juga telah dilakukan pembinaan secara berkelanjutan termasuk memberikan reward bagi Lurah yang berprestasi
6	Bagian Hukum dan Per Undang-undangan	a .	Secara periodik koordinasi dengan DPRD/Bappemperda tentang seluruh Perda yang perlu direvisi dan Perda Baru sesuai kebutuhan menjadi Prolegda tahun berikutnya.	a. Sudah dilakukan sesuai dengan amanat UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan
		b .	Kewajiban Kepala Bagian Hukum untuk dapat memberikan pandangan Hukum kepada Walikota Jambi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan	b. Sudah kita lakukan sesuai amanat UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Advice/kajian hokum tersebut diberikan dalam hal untuk eklancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
7	Bagian Organisasi	a .	Dalam rangka pengembangan Kecamatan, Bagian Organisasi perlu kajian pengembangan kelurahan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik	Terkait kajian tentang pengembangan kelurahan telah dilakukan kajian melalui Naskah Akademik dan FGD dengan tokoh masyarakat. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Ranperda
8	Bagian Humas	a .	Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat (melalui media cetak/elektronik) tentang proses/capaian pembangunan seluruh OPD dilakukan satu pintu sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas	Layanan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama penerbitan publikasi melalui media massa dapat dilakukan satu pintu, namun demikian penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan secara langsung oleh Pejabat atau OPD terkait, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU Keterbukaan Publik
9	Satpol PP	a .	Masih perlu ditingkatkan fungsi dan tugas dalam rangka penegakan Perda, untuk itu sumber daya manusia Satpol PP secara periodik perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga dapat mendukung tugas dan fungsinya agar lebih manusiawi	Untuk mendukung kelancaran fungsi dan tugas, Satpol PP secara berkala melakukan diklat bak yang dilakukan secara mandiri maupun mengikuti diklat yang diadakan di luar daerah. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah maka Kota Jambi masih kekurangan personil, untuk mengatasi kekurangan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
		b .	Dengan berkembangnya Kota Jambi sebagai representatif Provinsi Jambi untuk itu perlu penambahan personil.	tersebut pada tahun 2020 kita akan menjajaki kerja sama dengan Satpol PP provinsi
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a .	Perlu ditingkatkan pelayanan perizinan sampai ketingkat Kecamatan	a. Sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN maka pelayanan perizinan telah dilaksanakan di Kecamatan sesuai skala yang telah diatur dalam Permendagri tersebut dan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
		b .	Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, seharusnya sudah ada master plan tentang peta pengembangan bisnis (pariwisata, perbankan, dan potensi lainnya) yang dimiliki sehingga dapat merangsang investor masuk ke Kota Jambi	b. Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi telah disusun Dokumen RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) yang telah ditetapkan melalui Perwal tahun 2019
Rekomendasi Pansus II (dua) DPRD Kota Jambi				
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a .	Dalam hal mendorong produktifitas ketahanan pangan daerah, maka Pemerintah Kota Jambi agar lebih memfokuskan produk unggulan yang akan dikembangkan.	Salah satu usaha yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam hal peningkatan produktivitas adalah penggunaan benih unggul bermutu yang diberikan kepada petani padi sebanyak 200 Ha Kegiatan APBD dan 500 Ha Kegiatan APBN , benih organik (padi merah) sebanyak 16 Ha, jagung hibrida sebanyak 50 Ha Kegiatan APBN, Uji Varietas/pengenalan varietas baru padi sawah sebanyak 5 Ha dan Uji Varietas/pengenalan varietas bawang merah 0,25 Ha. Selain itu juga memberikan bantuan berupa Saprodi seperti pupuk dan obat-obatan guna menekan gangguan hama pengganggu tanaman.
		b .	Pemberian bibit kepada masyarakat atau kelompok, harus benar-benar bermanfaat dan diberi pembinaan sehingga masyarakat paham dengan apa yang diberikan kepadanya sehingga menambah ilmu dan penghasilan bagi mereka.	Pemberian bibit dilakukan kepada masyarakat atau pun kelompok sesuai prosedur yang berlaku. Juga terus dilakukan penyuluhan sehingga dari pembinaan ini kita berharap semua masyarakat maupun kelompoknya bisa menambah penghasilan bagi anggota keluarga.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
		c .	Terhadap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar di distribusikan secara efektif, efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat dan meminta kepada Pemerintah Kota Jambi untuk membangun gudang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).	Pendistribusian cadangan pangan telah dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 tahun 2017 Bab V pasal 8 tentang penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran. Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bekerjasama dengan Perum BULOG DIVRE Jambi
		d .	Meminta kepada Pemerintah Kota Jambi agar lahan pertanian yang ada di Kota Jambi dipertahankan sesuai dengan perda RTRW dan meningkatkan serta memaksimalkan hasil produksi pertanian dengan luas wilayah pertanian yang ada di Kota Jambi.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tetap mengupayakan untuk mempertahankan luas tanam dan produksi pangan di Kota Jambi melalui upaya pembinaan petani/kelompok tani agar petani tetap bergiat dalam berusaha tani dan tidak beralih guna lahan.
		e .	Pemerintah Kota Jambi wajib mempetakan lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Jambi untuk dapat dikembangkan sesuai peruntukannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan komoditi organik, hortikultural dan pangan untuk masyarakat serta dapat menekan angka inflasi pangan.	Pemetaan lahan pertanian telah di upayakan dengan bekerjasama dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi melalui kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a .	Untuk mendorong Potensi kepariwisataan Kota Jambi, meminta kepada Pemerintah agar melakukan pendataan utilitas dan percepatan pembuatan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	Dokumen RIPPDA sudah pernah dibuat tahun 2016 dan akan ada Review di Tahun 2020 ini.
		b .	Dalam hal pelaksanaan festival budaya daerah dilakukan secara kontinuitas di setiap Kecamatan yang ada di Kota Jambi	Pelaksanaan Festival Budaya sudah rutin dilaksanakan akan tetapi masih terpusat di Car Free Night Kotabaru dan menjadi catatan kami untuk dilaksanakan di masing-masing kecamatan.
		c .	Pemerintah Kota Jambi juga wajib mengeksplorasi cagar budaya serta peninggalan budaya yang ada di Kota Jambi guna promosi daerah dalam meningkatkan minat wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung, sehingga dapat menghasilkan PAD dan menyerap bantuan APBN	Saat ini kita telah berupaya untuk mempromosikan dalam bentuk video visit Kota Jambi.
		d .	Mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Pemerintah Kota Jambi telah mengadakan <i>assessment</i> secara berkala kepada pejabat eselon 2.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		Berdasarkan laporan LKPJ Walikota Tahun 2018 capaian Pendapatan Daerah dari sektor pajak melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan PAD, DPRD meminta agar Pemerintah Kota Jambi melakukan optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi dari sektor parkir, reklame dengan memenuhi sumber daya manusia pemungut pajak dan retribusi yang berkualitas serta mendorong agar ada perbaikan data pajak secara progresif setiap tahun.	Terimakasih atas saran yang diberikan, untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dilakukan dengan upaya mengirimkan ASN BPPRD Kota Jambi untuk mengikuti Bimbingan Teknis, diklat terkait perpajakan setiap tahunnya. Saat ini BPPRD terus berupaya melakukan updating pajak terutama PBB.
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	a .	Pada Bidang Pengelolaan Pasar, agar Pemerintah secara tegas dalam mengelola pasar dan dapat mengoptimalkan fungsi dan manfaat pasar-pasar yang sudah dibangun serta memberikan kenyamanan dan fasilitas pasar.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi bersama dengan tim terpadu telah melaksanakan penataan pasar dengan tetap mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar, Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan Perda Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum.
		b .	Pada Bidang Perindustrian, agar pemerintah memperhatikan potensi sumber daya IKM Kota Jambi dan melakukan pengembangan melalui bimbingan dan Fasilitas penerapan standarisasi dan sertifikasi, pendataan HKI serta perbaikan desain kemasan dan merk.	Kita tetap memperhatikan IKM melalui pembinaan atau pelatihan yang diberikan sesuai dengan usaha yang dijalani seperti Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan SDM IKM dan Pelatihan Manajemen Usaha dan juga pemberian Fasilitas, disamping itu juga meningkatkan standarisasi produk yang diberikan melalui pemberian sertifikat halal produk setiap tahunnya dan rekomendasi pengurusan HKI. Termasuk juga desain kemasan melalui fasilitas Rumas Kemasan.
		c .	Pada Bidang Metrologi, meminta kepada Pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan, memastikan pemeriksaan secara berkala sistim pengukuran dan alat-alat ukur (analog dan digitalisasi) di industri dan pelaku-pelaku usaha lainnya berfungsi dengan baik dan akurat di dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya secara benar agar tidak merugikan konsumen.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melalui UPTD Metrologi Legal Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan tera/tera ulang sejak Tahun 2017. Kegiatan tera/tera ulang dilakukan di pasar-pasar Tradisional, Modern, SPBU, dan Perusahaan/Instansi/Lembaga didalam wilayah Kota Jambi.
5	PDAM Tirta Mayang	a .	Meminta kepada PDAM untuk meningkatkan kualitas air baku dan layanan kepada konsumen	PDAM akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan melalui penambahan dan peremajaan jaringan serta <i>maintenance</i> berkala.
		b .	Meminta kepada PDAM untuk meminimalisir kebocoran air di Kota Jambi dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggan yang dapat merugikan PDAM	Kebocoran air selain karena jaringan yang sudah tua juga dikarenakan adanya pelanggan yang berbuat curang dan sejauh ini kita terus melakukan upaya penanganan dalam pelanggaran yg ada .
		c .	Meminta kepada PDAM untuk membentuk tim analisa investasi/asset	Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk segera membentuk tim investasi asset ataupun berkerjasama dengan pihak swasta.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	a .	Mengingat beban tugas di Bidang Aset yang sangat berat, meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk menambah sumber daya manusia PNS pada Bidang Aset tersebut	Untuk saat ini SDM dibidang Aset memang masih kurang, dan bidang aset sudah berkoordinasi dengan BKPSDMD terkait penambahan SDM tersebut.
		b .	Meminta Pemerintah Kota Jambi untuk menyediakan lahan beserta gedung untuk penampungan aset-aset yang tidak terpakai.	Saat ini untuk menampung aset yang ada masih menggunakan Gudang sementara yaitu Gedung Sport Hall Jelutung, namun bidang aset akan segera mengusulkan pengadaan tanah khusus untuk Gudang aset dan kegiatan aset kedepannya.
		c .	Meminta kepada Bidang Aset untuk mendata secara totalitas aset-aset selain aset bergerak dan tidak bergerak.	Untuk data-data secara keseluruhan mengenai aset bergerak dan tidak bergerak sudah tersedia. Saat ini bidang aset sedang melakukan penatausahaan, validasi dan nilai penyusutan aset tersebut.
Rekomendasi Pansus III (tiga) DPRD Kota Jambi				
1	Bappeda Kota Jambi	a .	Pansus III menilai pelaksanaan e-planning dan e-budgeting belum optimal. Untuk itu, Bappeda diminta lebih memaksimalkan pelaksanaan program e-planning dan e-budgeting dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Pelaksanaan sistem e-planning kami sadari masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dan hal ini terus menjadi perhatian kami dengan melakukan evaluasi dan pengembangan sistem e-planning yang telah ada, dan Bappeda Kota Jambi terus berusaha melakukan sosialisasi terhadap aplikasi e-planning ini terutama di saat kegiatan musrembang Kelurahan maupun Musrenbang tingkat Kecamatan.
		b .	Dalam perencanaan anggaran, Bappeda kedepannya terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan DPRD dan OPD	Dalam setiap proses perencanaan Bappeda selalu melakukan koordinasi dengan PD.
2	Dinas Perhubungan Kota Jambi	a .	Dinas Perhubungan diminta untuk segera menertibkan kemacetan di lingkup Kota Jambi, diantaranya tempat ibadah, sekolah, puskesmas dan fasilitas umum lainnya	Untuk mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan penindakan terhadap parkir liar kendaraan di jalan protokol sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi. Dan juga menempatkan petugas-petugas di lokasi yang dianggap rawan kemacetan. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga telah memiliki ruang Jambi City Operation Centre (JCOC) untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang yang bekerjasama dengan Polresta Kota Jambi.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
		b .	Jadwal Petugas Keselamatan (Paskes) di seluruh titik rawan kemacetan harus dioptimalkan dan menambah jumlah personil untuk membantu mengurai kemacetan	Dengan keterbatasan jumlah personil Dinas Perhubungan Kota Jambi selalu berusaha optimal untuk mengatasi kemacetan terutama di titik-titik rawan dan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi		Pemerintah Kota Jambi diminta untuk memprioritaskan tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar program Smart City berjalan sesuai target.	Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Smart City, Pemerintah Kota Jambi secara bertahap terus berusaha meningkatkan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informasi dengan menyesuaikan kondisi APBD dan program-program prioritas lainnya. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan smart city juga didukung oleh seluruh Perangkat Daerah lainnya melalui kegiatan Data Informasi yang ada di setiap PD di Pemerintah Kota Jambi.
4	Dinas PUPR		Terkait banyaknya titik banjir sebagai akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga saluran drainase yang ada di Kota Jambi tidak dapat menampung debit air, untuk itu Dinas PUPR Kota Jambi segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS) Kementerian PUPR RI Bidang Sumber Daya Alam (SDA) untuk merekonstruksi saluran drainase.	Saat ini terdapat 19 titik lokasi genangan/banjir di Kota Jambi. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas, maka Pemerintah Kota Jambi menetapkan indikator dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023 yaitu mengurangi daerah genangan/banjir. Terhadap hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan BWSS VI dan DPUPR Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan penanganannya.
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diminta melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas pembangunan yang dilakukan developer/pengembang perumahan. Jika ditemukan pelanggaran, Pansus III merekomendasikan agar tidak dikeluarkan izin permohonan pembangunan di lokasi lainnya	Kami berterimakasih atas saran yang diberikan dan kegiatan tersebut akan berusaha kami tingkatkan.
6	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	a .	Dinas Lingkungan Hidup diminta memaksimalkan pengangkutan sampah.	Pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 telah mencanangkan mekanisme pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien di Kota Jambi, yang selalu dievaluasi secara regular untuk perbaikannya. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan sampah di tingkat sumber juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi
		b .	Hutan Kota H. Muhammad Sabki sebagai Ruang Terbuka (RTH) ke depan harus dikelola secara profesional dan diupayakan menjadi salah satu obyek wisata masyarakat Kota Jambi, agar dapat Meningkatkan PAD	Saat ini secara bertahap Pengelolaan Hutan Kota H. M.Sabki terus ditingkatkan baik secara sarana prasarana mau pengelolaannya.
		c .	Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya bank sampah	Pemerintah Kota Jambi selalu mendorong program Bank sampah di Kota Jambi dengan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	a .	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk dapat melakukan Sosialisasi dan Koordinasi kepada pelaku usaha terkait proteksi dan Pencegahan kebakaran serta menambah personil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan	Kegiatan sosialisasi terus kami lakukan kepada pelaku usaha terutama disaat mengurus perizinan, dan kami terus berusaha meningkatkan respon time penanganan bencana.
Rekomendasi Pansus IV (satu) DPRD Kota Jambi				
1	Dinas Sosial Kota Jambi	a .	Perlu adanya peningkatan program kegiatan terhadap pelayanan dan penanganan PMKS dengan melakukan koordinasi, kerjasama, dan keikutsertaan, serta peran aktif kelembagaan kesejahteraan sosial, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial.	Untuk meningkatkan pelayanan terhadap PMKS. Setiap tahun anggaran Dinas Sosial terus melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan terhadap PMKS dan monitoring serta memvalidasi data penerima bantuan sosial. Disamping itu Pemerintah Kota juga melakukan integrasi program/kegiatan antar Perangkat Daerah dan lintas sektor. Terhadap penerima manfaat PKH dari jumlah 14.441 kk, sebanyak 288 kk telah melakukan graduasi mandiri dan 500 orang graduasi alami.
		b .	Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran program kegiatan yang sangat menyentuh pada pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada efisiensi dan rasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan sehingga pencapaian target sasaran program kegiatan dapat tercapai.	
		c .	Penerima manfaat PKH harus tepat sasaran	
		d .	Untuk mengavaluasi penerima bantuan baik APBN maupun APBD yang telah diberikan kepada masyarakat.	
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	a .	Diharapkan agar DPPKB memberikan pengetahuan/informasi tentang membangun rumah tangga kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan/calon penganten (Caten) agar tercipta keluarga kecil bahagia dengan melakukan koordinasi kepada Kementerian Agama Kecamatan.	Sudah dilakukan melalui kegiatan Pertemuan kesehatan reproduksi calon pengantin
3	Dinas Pendidikan Kota Jambi	a .	Untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik secara akademik dan non akademik.	1. Secara bertahap telah dilakukan Diklat/workshop kurikulum 13, penguatan Kelompok Kerja Guru (SD) dan penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (SMP) 2. Terkait Kepala Sekolah yang masih Pelaksana Tugas,
		b .	Untuk segera mengisi kekosongan kepala sekolah yang masih menjadi pelaksana tugas.	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
		c .	Mendorong Dinas Pendidikan untuk mencari sumber dana bantuan APBN dengan memberikan bimbingan dengan kepala sekolah cara mudah mendapatkan bantuan tersebut.	disebabkan karena belum mempunyai NUSK. 3. Akan menjadi perhatian dan akan diusulkan pada APBN 4. Untuk mengoptimalkan capaian program tahfiz, pada tahun 2020 akan disusun target untuk tingkat SD maupun SMP
		d .	Agar mengevaluasi capaian program tahfiz di SD dan SMP secara berkelanjutan.	
4	Dinas Kesehatan Kota Jambi	a .	Terhadap Program Jambi Bugar sebagai pengganti SKTM untuk ditambah kuota penerimaannya. Mengingat alokasi dana yang dikeluarkan pada tahun 2018 untuk SKTM kurang lebih 3,5 milyar seharusnya yang menerima manfaat dari kartu Jambi Bugar kurang lebih 12.000 orang, saat ini hanya di tambah 5000 orang.	1. Untuk saat ini belum ada penambahan kuota karena sedang dilakukan verifikasi dan validasi data 2. Sesuai kewenangan pengolahan data warga kurang mampu dilakukan oleh Dinas Sosial 3. Pada tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi Jambi Bugar pada 11 Kecamatan
		b .	Sistem pengolahan data bagi warga yang kurang mampu dikelola dengan baik sehingga tepat sasaran.	
		c .	Harus ditingkatkan atau dilakukan sosialisasi /pemahaman perangkat kelurahan tentang aturan penerima manfaat Jambi Bugar.	
5	RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	a .	Agar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien baik yang mandiri maupun peserta BPJS atau Jambi Bugar.	1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Manap secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana, serta meningkat profesionalitas SDM baik medis maupun non medis serta pendukung lainnya melalui diklat dan pembinaan
		b .	Peralatan medis pada RSUD H. Abdul Manap untuk dilengkapi mengingat RSUD H. Abdul Manap menjadi rujukan regional sehingga statusnya menjadi type B.	2. RSUD Manap setiap tahun melakukan pengadaan Alkes sesuai kebutuhan dan Type 3. Kesejahteraan PTT secara bertahap terus di tingkatkan dan sejak 2019 sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan
		c .	Memperhatikan kesejahteraan pekerja baik penjaga malam maupun honor lainnya yang saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.	
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	a .	Kurangnya sosialisasi kearsipan dan jumlah arsiparis di setiap Organisasi Perangkat Daerah.	1. Untuk meningkatkan penataan arsip telah dilakukan pembinaan dan pengawasan 2. Secara bertahap di akan penuhi
		b .	Meningkatnya sarana dan prasarana seperti gedung, komputer, rak arsip, lemari arsip yang masih kurang layak.	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi/Tanggapan/Saran		Tanggapan
7	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	a .	Untuk mencari sumber dana APBN dalam rangka pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas olahraga.	Kedepan akan jadi perhatian dan akan diusulkan melalui DAK
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi	a .	Melakukan evaluasi terhadap penerima honor guru PAMI yang saat ini dikelola di kecamatan meningkat jumlah penerimanya.	1. Evaluasi terhadap guru PAMI dilakukan oleh Kecamatan bekerjasama dengan LPTQ karena sejak tahun 2017 honorarium guru PAMI di anggarkan di Kecamatan 2. Untuk meningkatkan kualitas SDM guru PAMI telah dilakukan pelatihan, hingga saat ini jumlah guru PAMI yang telah mengitu pelatihan sebanyak 1000 orang
		b .	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru PAMI.	

BAB V

PENYELENGGARAN

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dana Tugas Pembantuan tersebut dikucurkan untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sebesar Rp. 559.420.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 552.936.148. Dana Tugas Pembantuan tersebut digunakan untuk kegiatan:

1. Padat Karya Infrastruktur (PK) 2 Paket, di 2 (Lokasi) yaitu :
 - RT. 05 Kel. Sejinjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi yaitu Pembuatan Jalan Rabat Beton dengan Dana Rp. 110.000.000,-
 - RT. 26 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi yaitu Pembuatan jalan Rabat Beton dengan Dana Rp. 110.000.000,-

2. Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 4 Paket yaitu :
 - Kelompok TKM I Jannah Lillah bergerak di bidang usaha menjahit / Tata Busana alamat Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Kota Jambi dengan dana Rp. 70.000.000,-
 - Kelompok TKM II Cantik bergerak di bidang usaha Tata Rias Kecantikan alamat Kel. Mayang Mengurai Kec. Alam Barajo Jambi dengan Dana Rp. 70.000.000,-
 - Kelompok TKM III Khalifah Production Square bergerak di bidang Desain Grafis Alamat Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan Dana Rp. 70.000.000,-
 - Kelompok IV Putri Kandis bergerak di bidang Usaha Tata Boga Alamat Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan Dana Rp. 70.000,000,-
3. Layanan dukungan manajemen Eselon I Rp. 59. 420.000,-

BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DENGAN PIHAK KETIGA

6.1.1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

Pasca era otonomi terjadi proses regionalisasi yang ditandai dengan keterkaitan antar daerah otonom bertetangga karena kepentingan dan ketergantungan. Desentralisasi yang terjadi juga memunculkan lokalisme dan egoisme kedaerahan yang menjadi potensi konflik dan disintegrasi. Desentralisasi juga menyebabkan disparitas sumber daya/potensi daerah dan ketimpangan pembangunan.

Sementara demokratisasi yang terjadi meningkatkan komunikasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Sedangkan globalisasi yang sulit untuk dibendung akan membawa dampak pada dinamika perekonomian nasional dan internasional serta memunculkan kompetensi lokal, nasional dan bahkan internasional.

Fakta-fakta tersebut akan menjadi dasar bagi sebuah kabupaten/kota untuk menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain di dalam dan luar negeri. Kerjasama semacam ini diyakini akan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan lintas daerah, efektivitas dan efisiensi pelayanan lintas daerah, serta manajemen konflik antar daerah.

Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antara Daerah, pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

6.1.2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk pelaksanaan Kerjasama di Kota Jambi sudah dikeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Satu Pintu. Tata cara kerja sama ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan kerjasama daerah yang tertib, terintegrasi guna menunjang pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah, serta dalam rangka mempercepat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 6.1
Memorandum Of Undersranding dan Perjanjian Kerja Sama
yang Ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan Pihak Ketiga
Selama Periode Tahun 2019

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
1.	1 Januari 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Jambi Dalam Rangka Universal Health overage	1 (satu) tahun	Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Elshe Theresia, S.Si,Apt (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi)
2.	4 Maret 2019	Antar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi	12 (dua belas) bulan	Hj. Masnah Busro (Bupati Muaro Jambi) H. Syahirsyah. Sy (Bupati Batanghari) H. Romi Hariyanto (Bupati Tanjung Jabung Timur) H. Syafril (Bupati Tanjung Jabung Barat) Rusdian, SKM (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Jambi). Al Haris (Bupati Merangin) H. Cek Endra (Bupati Sarolangun) H. Sukandar (Bupati Tebo) H. Mashuri (Bupati Bungo)`56 H. Adirozal (Bupati Kerinci) H. Syarif Fasha (Walikota Jambi) H. Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh)
3.	13 Maret 2019	Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kota Jambi Provinsi Jambi tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi	1 (satu) Tahun	Djoko Siswanto (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
4.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Drs. H. Syafe'i, MM (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari)
5.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Nur Subiyantoro, SE (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi)
6.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Syafriwan, SE (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
7.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Drs. Hero Suratman (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
8.	27 Maret 2019	Pejanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Harianto, S.Sos (Kepala Dinas Perindustrian dan

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
				Perdagangan Kota Sungai Penuh)
9.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Subhi, S.Sos, MM (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi)
10.	8 April 2019	Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Fahmi, SP (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi)
11.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) dr. Hj. Ida Yulianti, MH.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi)
12.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Sosial Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Kaspul (Kepala Dinas Sosial Kota Jambi)
13.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Fahmi, SP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi)
14.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) H. M. Rasyid Rido Siregar, SH. M.Kes (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
				Kota Jambi)
15.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Arzi Efendi, SH (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi)
16.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Drs. Nirwan, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi)
17.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) drg. Irawati Sukandar, M.Kes (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi)
18.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) dr. Rudi Maruli H. Pardede (Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi)
19.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Arman, SE, ME (Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi)
20.	15 April 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat	12 (dua belas) bulan	DR. Syarif Fasha, SE. ME (Walikota Jambi) Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D (Ketua Stikom)

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
				Dinamika Bangsa Jambi)
21.	15 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa Jambi tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendampingan, Pelatihan dan Penelitian	5 (lima) tahun	Drs. Nirwan, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi) Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D (Ketua Stikom Dinamika Bangsa Jambi)
22.	29 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri Jambi dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi tentang Koordinasi TP4D Kejaksaan Negeri Jambi Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemko Jambi Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerapan Anggaran Pemko Jambi	2 (dua) Tahun	Fredy Azhari, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Jambi) Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)
23.	23 Mei 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Jambi	1 (satu) tahun	DR. Syarif Fasha, SE. ME (Walikota Jambi) Mayriwan Eka Putra SH (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi)
24.	23 Mei 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Kader Pos Yandu	1 (satu) tahun	Mayriwan Eka Putra SH (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi) drg. Irawati Sukandar, M.Kes (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)
25.	12 Juni 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 (dua) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Fredy Azhari, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Jambi)
26.	20 Juni 2019	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan	5 (lima) tahun	H. Syarif Fasha (Walikota Jambi) Beni Hermawan (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi)
27.	20 Juni 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Jambi	5 (lima) Tahun	Subhi, S.Sos, MM (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Akmal, A.Ptnh (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi)
28.	21 Juni 2019	Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi	12 (dua belas) bulan	Drs. Agus Nugroho Yusuf, M.Si (Kepala

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
		Manusia Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi)
29.	7 Agustus 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Brawijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 (dua belas) bulan	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS (Rektor Universitas Brawijaya)
30.	22 Agustus 2019	Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel tentang Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi	6 (enam) bulan	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Primarini (General Manager Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel)
31.	26 Agustus 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tentang Koordinasi dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah	5 (lima) tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Lindawaty (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)
32.	26 Agustus 2019	Dokumen Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Guna Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik	5 (lima) tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Pangorian Marpaung, SE (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi)
33.	26 Agustus 2019	Rencana Kerja Antara Inspektorat Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi tentang Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 di Kota Jambi	18 (delapan belas) minggu	Drs. H. Hafni Ilyas (Inspektur Kota Jambi) Pangorian Marpaung, SE, (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi)
34.	3 Oktober 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Kota Jambi	1 (satu) Tahun	Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Pak Lam Brian Chan (Direktur PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari)
35.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank OCBC NISP Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank OCBC NISP untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Ka Jit, MBA (Head Of Strategy and Innovation)
36.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank Bukopin Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank Bukopin untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Waskito Utomo, ST,MM (Branc Manager PT.Bank Bukopin TBK Cabang Jambi)

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
37.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank BTN Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank BTN untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Arias Rachman, SE, MM (Branc Manager PT.Bank BTN TBK Cabang Jambi)
38.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan jasa keuangan POS INDONESIA di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) M.Rakhmat Sidik, SE (Kepala Regional 3 Palembang)
39.	17 Oktober 2019	Perjajian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank Bukopin Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank Bukopin untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Waskito Utomo, ST,MM (Branc Manager PT.Bank Bukopin TBK Cabang Jambi)
40.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank BTN Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank BTN untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Arias Rachman, SE, MM (Branc Manager PT.Bank BTN TBK Cabang Jambi)
41.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank OCBC NISP Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank OCBC NISP untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Ka Jit, MBA (Head Of Strategy and Innovation)
42.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) tentang penerimaan pembayaran pajak daerah Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Muhamad Rakhmat Sidik, SE (Kepala Regional 3 Palembang)
43.	21 Oktober 2019	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Multi Inti Digital Transportasi tentang Transportasi Capsule Bus	6 (enam) bulan	Dr. H. Syarif fasha, ME (Walikota Jambi) Subhan Novianda Mani (Direktur PT. Multi Inti Digital Transportasi)
44.	26 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pedagang Pasar dan Pelaku Usaha Daerah di Wilayah Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Supriyatno, SE (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi) Komari, SH. MH (Kepala Dinas

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
				Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)
45.	4 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Kota Jambi	12 (dua belas) bulan	Ir. H. Budidaya, M.For,Sc (Sekretaris Daerah Kota Jambi) Pak Lam Brian Chan (Direktur PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari)
46.	15 November 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 (lima) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph.D (Rektor Universitas Jambi)
47.	15 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Pendidikan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	5 (lima) Tahun	Prof. Dr. Rer.nat. Asrial, M.Si (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi) H. Arman, SE., ME (Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi)
48.	26 November 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas batanghari tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 (empat) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) H. Fachruddin Razi, SH, MH (Rektor Universitas Batanghari)
49.	26 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi tentang Kajian dan Penyusunan Alur Cerita (Storyline) Sejarah Kota Jambi	4 (empat) Tahun	Arzi Efendi, SH (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi) DR. H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi)
50.	3 Desember 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online Kota Jambi di Kabupaten Bungo	3 (tiga) Tahun	Drs. Nirwan, ME (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi) Drs. H. Ridwan IS, MM (Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo)
51.	30 Desember 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi Dengan PT.PLN (PERSERO) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi Tentang Pengawasan, Penertiban,	2 (dua) Tahun	H. Syarif Fasha (Walikota Jambi) Hanif Andrhean Abidin

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
		Pelayanan Penerangan Jalan Umum, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Sosialisasi Sertapembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Jambi		(Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jambi PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB)
52.	30 Desember 2019	Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan PT.PLN (PERSERO) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi tentang pengawasan, penertiban, pelayanan penerangan jalan umum, pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan, sosialisasi serta pembayaran rekening listrik pemerintah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	Budidaya (Sekretaris Daerah Kota Jambi) Hanif Andrhean Abidin (Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jambi PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB)

Sumber: Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi 2020

Selain kerjasama dengan Asosiasi di Indonesia, Pemerintah Kota Jambi Selama periode tahun 2019 tetap menjadi anggota *Internasional Council for Local Environmental Initiatives* (ICLEI), *United Cities Local Government Asia Pacific* (UCLG ASPAC), dan baru bergabung dengan *Democratic Local Governance in Southeast Asia* (DELGOSEA), *Green Mayor Council* dan *City Net* serta kerjasama dengan institusi internasional. Adapun kegiatan yang diikuti dalam keanggotaan tersebut, diantaranya:

- 1) Peresmian *the Global Covenant City of Mayors for Climate and Energy* (GCoM) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 21 Maret 2019.

Global Covenant City of Mayors for Climate and Energy (GCoM) adalah koalisi kerjasama internasional bagi kota-kota dan pemegang kewenangan lokal yang berbagi visi jangka panjang dalam mempromosikan dan menyokong partisipasi sukarela untuk memerangi perubahan iklim dan mewujudkan masyarakat rendah emisi dan ketahanan iklim di masa depan. Koalisi ini akan mendorong aksi iklim di tingkat lokal dan membantu membangun komunitas yang berkomitmen dalam pelaksanaan aksi tersebut.

Tujuan dari jaringan kerjasama ini adalah untuk mempromosikan kegiatan GCoM di kota-kota Malaysia ke audiens yang lebih luas baik yang berasal dari kalangan pemerintah kota, para praktisi, sektor swasta dan lainnya sekaligus meningkatkan kesadaran adanya kemungkinan kerjasama internasional baru yang bisa ditawarkan oleh GCoM yang didukung oleh Uni Eropa.

Walikota Jambi (Indonesia) sebagai anggota GCoM dalam even ini bersama dengan perwakilan dari Negara Vietnam, Singapura dan Uni Eropa diminta menjadi panelis dalam sesi “Praktek Terbaik dari Daerah/Lokal dan Uni Eropa”.

- 2) Pelatihan Internasional tentang Dasar-dasar Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah (*Sewerage Treatment Plant*), ADB Program: *the Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP), yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2019 untuk Group 1 (*Top Management*) dan tanggal 26 Mei s.d. 1 Juni 2019 untuk Group 2 (*Technical Management*).

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) merupakan kegiatan dengan pendanaan kombinasi dari pinjaman *Asian Development Bank* (ADB), Hibah Pemerintah Australia, Dana Pemerintah Pusat (APBN) serta Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD). Dana pinjaman melalui ADB sebesar USD 120 juta yang terdiri atas dana *Original Capital Resources* (OCR) sebesar USD 80 juta dan dana *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) sebesar USD 40 juta serta dana hibah dari Pemerintah Australia, melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), sebesar USD 48,83 juta. Pada mulanya, kegiatan ini akan diselenggarakan di lima kota, yaitu: Kota Cimahi, Jambi, Makassar, Palembang, dan Pekanbaru. Akan tetapi, diputuskan Kota Cimahi tidak diikutsertakan pada MSMIP karena belum siap sehingga menyisakan 4 kota yaitu Jambi, Makassar, Palembang dan Pekanbaru.

Program ini diharapkan dapat mereduksi pencemar yang dibuang secara langsung ke lingkungan di setiap kota tersebut. *Outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah Sambungan Rumah (SR) yang tersambung ke dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) skala kota di masing-masing kota tersebut. Program ini memiliki dua output antara lain (i) pengembangan infrastruktur untuk SPAL-T dan (ii) *Project Implementation Support*. Target jumlah Sambungan Rumah terbangun sejumlah 32.300 SR.

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan terpusat dan peningkatan pengelolaan septage berdasarkan rencana pembangunan sistem air limbah terpusat di Kota Jambi.

- 3) "*Resilient Cities 2019 Congress: Delivering Local Resilience*" yang dilaksanakan di Kota Bonn, Jerman. Pada tanggal 25 s.d. 29 Juni 2019

Kongres ICLEI 2019 ini juga sebagai momentum peringatan 10 tahun ICLEI dalam pengalaman dan membangun keahliannya dalam mendukung kota-kota di dunia untuk berkembang dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Kongres ini akan menghadirkan pandangan 360° tentang ketahanan perkotaan, seperti: jalur-jalur yang mengarah pada pengimplementasian ketahanan; Inovasi-inovasi di bidang ketahanan perkotaan, dan; membangun komunitas yang kohesif, sehat, dan tangguh.

Keterlibatan masyarakat dan peningkatan partisipasi sosial sangat penting untuk membangun ketahanan lokal dan mengurangi risiko dengan memberikan ikatan, menjembatani, dan mengaitkan praktik-praktik yang meningkatkan kelayakan lingkungan dan ekosistem. Komunitas yang terorganisir dan berpengetahuan dapat mengatasi bencana dengan lebih baik, belajar dari pengalaman sebelumnya, beradaptasi dengan lingkungan baru dan pada akhirnya menjadi lebih tangguh.

Melalui Transformative Actions Program (TAP), ICLEI bertindak sebagai organisasi perantara yang membantu pemerintah daerah menemukan mitra teknis dan keuangan yang cocok untuk menyusun proposal proyek iklim yang layak (bankability proyek).

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di kancah internasional, dan juga mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Jambi sesuai SDG's dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi TERKINI.

- 4) *WORLD CITIES SUMMIT MAYORS FORUM (WCSMF) 2019* yang dilaksanakan di MEDELLIN, KOLOMBIA. Pada tanggal 9 s.d. 13 Juli 2019.

World Cities Summit (WCS) adalah konferensi tingkat tinggi dua tahunan untuk kota-kota di dunia sebagai sebuah platform eksklusif bagi para pemimpin pemerintah dan pakar industri untuk mengatasi tantangan-tantangan mewujudkan kota yang ramah (nyaman dan layak huni) serta berkelanjutan, berbagi solusi perkotaan terpadu dan menjalin kemitraan baru. KTT ini diselenggarakan atas kolaborasi bersama antara *Singapore's Centre for Liveable Cities* dan *Urban Redevelopment Authority*.

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di kancah internasional, dan juga mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Jambi sesuai SDG's dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi TERKINI.

- 5) Mengikuti " *4th IMT-GT Green Council Meeting, 2nd IMT-GT Green Cities Mayor Meeting dan Sustainable Urban Development Framework Seminar*" di Penang Malaysia 22 s.d. 25 Agustus 2019

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam ikut mendukung gerakan perubahan iklim (*climate action change*), terwujudnya menuju *masyarakat rendah emisi (low-carbon society)* dan terwujudnya *Sustainable Development Goals (SDG's) No. 7 Affordable and Clean Energy* (Energi bersih dan terjangkau) dan No. 13 *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim). Diantaranya masuk menjadi anggota **Green Mayor**

Council IMT yang merupakan platform unggulan dalam *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT)* melalui *The Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT)*.

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT) bertujuan untuk mendorong partisipasi provinsi dan negara bagian yang berada di ketiga negara dalam pembangunan ekonomi. Prakarsa Rencana Aksi Kota Hijau/ *Green Cities Action Plan (GCAP)* yang saat ini telah dijalankan di Melaka, Malaysia dan Songkhla (Thailand) dan menyusul akan diimplementasikan di Medan dan Batam, Indonesia direspon sangat antusias. Namun, para pemimpin menekankan perlunya tindakan individu dan kolektif yang berkelanjutan untuk memitigasi dampak lingkungan, termasuk meningkatnya risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Para Pemimpin telah mengarahkan IMT-GT untuk meningkatkan model-model GCAP yang berhasil, dan bekerja untuk mengembangkan Kerangka Pembangunan Urban Berkelanjutan (*Sustainable Urban Development - SUD*) untuk kota-kota IMT-GT. Implementasi rencana aksi di bawah kerangka sub-regional ini dapat membuka peluang investasi baru, dengan kota-kota IMT-GT hijau dan ramah lingkungan yang menyediakan sumber pertumbuhan yang kuat di sub-wilayah.

Mengikuti kegiatan ini bagi Pemerintah Kota Jambi adalah selain semakin menunjukkan peran serta Kota Jambi dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG'S* dan *MDG's*) di kancah internasional termasuk melalui *Localise SDG'S*, mendapatkan *sharing best practices* dalam mengimplementasikan prakarsa proyek pertumbuhan hijau di tingkat lokal, termasuk mendapatkan bantuan teknis dan non teknis dari ICLEI dan ADB dalam hal peningkatan kapasitas untuk menyusun dokumen/proposal yang dibutuhkan bagi kota – kota untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan teknik dari lembaga internasional.

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Jambi kedepan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi.

- 6) Konferensi *The Liga Ilmu Serantau (LIS)* dilaksanakan di Politeknik Mersing, Johor, Malaysia pada tanggal 25 s.d 27 September 2019

Sebagai wujud kerjasama yang telah diikat oleh Pemerintah Kota Jambi dengan Dunia Pendidikan, salah satunya dengan Politeknik Jambi, melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Jambi tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:11/Mou/Hku/2018 dan 271/MoU/D/POLJAM/C-02/IX/2018 tanggal 10

September 2018 maka Wali Kota Jambi diundang oleh Direktur Politeknik Mersing Malaysia, untuk berpartisipasi sebagai Pembicara Utama dalam Konferensi ini yang akan dilaksanakan di Politeknik Mersing, Johor, Malaysia tanggal 26 September 2019 Dengan tema "MEMPERKUAT KREATIVITAS PENELITIAN DAN INOVASI MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0".

Konferensi *The Liga Ilmu Serantau* (LIS) adalah konferensi internasional tahunan yang bertujuan untuk berbagi dan mempromosikan hasil kegiatan penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh para pendidik dari Yayasan Ibnu Sina Batam, Politeknik Jambi, Politeknik dan *Community College* Malaysia dan mitra kolaboratif lainnya dari lembaga-lembaga tersebut.

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat semakin mengharumkan Pemerintah Kota Jambi di tingkat Internasional khususnya memperkenalkan konsep Smart City Kota Jambi yang mengarah ke revolusi teknologi 4.0 dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi.

- 7) *2019 E-Commerce Training Workshop* dilaksanakan di Hangzhou, China pada tanggal 28 Oktober s.d. 1 November 2019

"*2019 E-Commerce Training Workshop*" diperuntukkan bagi 2 (dua) delegasi dari setiap kota yang akan berpartisipasi, yaitu: 1(satu) orang dari pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pengembangan *e-commerce* /pembuat kebijakan dan 1(satu) orang dari pelaku usaha *e-commerce* lokal.

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan ASN Pemerintah Kota Jambi untuk menyusun kebijakan serta program dan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan dan pertumbuhan *e-commerce* lokal di Kota Jambi untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran Kota Jambi secara bersama-sama.

- 8) Mengikuti "*the Thirty-Eight Session of the Executive Committee*" dan Seminar International "*Heritage and Sustainable Tourism*" dilaksanakn di Lalitpur Nepal pada tanggal 5 s,d 10 November 2019

CITYNET *The Regional Network of Local Authorities for the Management of Human Settlements* adalah asosiasi/organisasi jaringan pemerintah kota tingkat dunia yang berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. CITYNET mempunyai misi menghubungkan para aktor perkotaan dan memberikan solusi nyata untuk kota-kota di seluruh kawasan Asia Pasifik. Saling bertukar pengetahuan dan membangun komitmen untuk membangun kota yang lebih berkelanjutan dan berketahanan melalui pengembangan kapasitas, kerjasama antar kota dan proyek-proyek nyata, membantu para anggota dalam menanggapi perubahan

iklim, bencana, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kebutuhan Infrastruktur.

CITYNET didirikan pada tahun 1987 dengan dukungan UNESCAP, UNDP dan UN-Habitat. Asosiasi jaringan antar kota ini telah berkembang dengan total anggota saat ini sebanyak 150, yang terdiri atas 99 *full members*, 55 *associate members*, dan 2 *corporate members* yang berasal dari Kota-kota, NGO - NGO, sektor swasta dan riset centre di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen bergabung dalam keanggotaan CityNet. Sebagai tindak lanjut Komite Eksekutif CityNet--badan pengelola tertinggi CityNet yang mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas arah dan strategi CityNet kedepan. Dalam pertemuan ini para anggota Komite Eksekutif CityNet akan merumuskan program kerja dua tahunan sesuai dengan Rencana Jangka Menengah, menyetujui masuknya keanggotaan baru, dan menetapkan pedoman kebijakan untuk Sekretariat--melalui surat dari Wali Kota Metropolitan Lalitpur Nepal (anggota Komite Eksekutif CityNet) dan Sekretaris Jenderal CityNet mengundang Wali Kota Jambi menghadiri Pertemuan Komite Eksekutif CityNet ke-38 dan Seminar Internasional: "Pusaka dan Pariwisata Berkelanjutan" tanggal 06 s.d 08 November 2019 di Lalitpur Nepal.

Dengan bergabung sebagai anggota CityNet diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menjalin kerja sama internasional dengan kota-kota lainnya di dunia untuk pembangunan dan kemajuan Kota Jambi yang lebih berkelanjutan dan berketahanan.

9) *Workshop for Thought Leaders Urban Regeneration: The Way to Vibrant City* dilaksanakan di Guangzhou, China pada tanggal 1 s.d. 7 Desember 2019

Workshop for Thought Leaders yang disusun dan dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan dan keputusan belajar dari inovasi-inovasi luar biasa dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dipandu oleh Institut Inovasi Perkotaan Guangzhou, Sekretariat Daerah METROPOLIS Asia Pasifik, UCLG ASPAC, Komunitas Inovasi Perkotaan UCLG, Komite Tetap UCLG-ASPAC Perempuan dalam Pemerintah Daerah (SCWLG), dan diorganisir oleh Universitas Sun Yat-sen, seminar ini mencakup sesi pembelajaran, panel diskusi, studi kasus, kunjungan lapangan, dan perencanaan tindakan.

Dalam konteks kelompok kota yang baru muncul dan wilayah metropolitan yang lebih besar, pembaruan perkotaan saat ini juga diberdayakan oleh teknologi dan industri modern yang lebih baik, dan ditantang dengan kebutuhan untuk mengadopsi model pembangunan yang lebih inovatif dan kooperatif dengan negara kota tetangga. Dalam workshop tahun ini, kami akan menyediakan platform bagi para pemimpin kota,

pakar dan praktisi untuk berbagi kebijakan, strategi, dan praktik inovatif untuk regenerasi perkotaan yang memperkuat kota-kota untuk masa depan yang lebih bersemangat. Dengan partisipasi SCWLG, diskusi ini juga akan dipandu oleh SDGs (*Sustainable Development Goals* – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tentang kesejahteraan perempuan dan mencakup sub-topik penting tentang “Perencanaan Perkotaan yang Ramah Keluarga dan Regenerasi Perkotaan”.

Workshop berorientasi solusi ini akan sangat membantu Kepala Daerah dalam menemukan jawaban dari tantangan regenerasi perkotaan dan meningkatkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dengan menghadiri undangan *Workshop Guangzhou Award* diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menjalin kerja sama internasional dengan kota-kota lainnya di dunia untuk pembangunan dan kemajuan Kota Jambi yang lebih berkelanjutan dan berketahanan serta membantu menemukan solusi dalam tantangan regenerasi perkotaan.

6.2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi Vertikal yang diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi vertikal antara lain:

Tabel 6.2
Kegiatan yang Dilaksanakan secara Bersama-sama dengan Instansi Vertikal

No	Kegiatan	Tujuan
1	Melaksanakan pemantauan orang asing	Mengetahui jumlah dan aktivitas orang asing
2	Penanganan konflik sosial	Untuk menjaga stabilitas keamanan daerah
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan umat beragama di Kota Jambi	Menjaga dan meningkatkan toleransi beragama
4	Melaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan	Meningkat rasa nasionalisme ASN dan masyarakat
5	Melaksanakan rapat koordinasi Forkompinda	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum
6	Melaksanakan pemantauan dan sosialisasi politik	- Untuk mengetahui perkembangan dan situasi politik (stabilitas politik) - Pendidikan politik bagi pemilih pemula
7	Melaksanakan bantuan keuangan parpol	Pembinaan terhadap sekretariat Parpol
8	Melaksanakan pemantauan terhadap Orkemas	Legalitas orkemas

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi 2020

6.3. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kota Jambi merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi, hal ini diresmikan dengan dikeluarkannya UU No. 61 tahun 1968 pada tanggal 6 Januari 1957. Dengan luas wilayah $\pm 205,38 \text{ km}^2$ (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986), Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada $01^{\circ}30'2,98''$ - $01^{\circ}40'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ - $103^{\circ}40'0,22''$ Bujur Timur. Dimana seluruh wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kabupaten Muaro Jambi dapat diartikan sebagai kawasan interland dimana Kota Jambi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Seiring perjalanan waktu, luas Kota Jambi mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 tentang batas daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, Luas wilayah Kota Jambi mengalami perubahan Luas yang semula $\pm 205,38 \text{ Km}^2$ menjadi Luasnya $169,91 \text{ Km}^2$ Pemerintah Kota Jambi sangat berkepentingan atas hasil penegasan batas wilayah tersebut dan sangat mendukung atas upaya-upaya dalam pencapaian kesepakatan baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan, hal ini terkait dengan kegiatan Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan pemeliharaan tugu batas serta rencana Pemerintah Kota Jambi untuk menyelesaikan pelaksanaan perapatan Pilar Batas Antara (PBA)

Disamping itu, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah jumlah Kecamatan di Kota Jambi saat ini terbagi menjadi 11 Kecamatan. Dimana sebelumnya berjumlah 8 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

Selain itu dalam rangka permasalahan batas wilayah melalui bagian kerjasama melakukan kajian Kerjasama Daerah Perbatasan Di Wilayah Perbatasan Kota Jambi dengan untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan serta pemasaran potensi sumber daya daerah terutama di wilayah perbatasan yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Adapun tujuannya antara lain mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan, sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan investasi, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang bersifat kontra produktif

(persaingan yang tidak sehat antar daerah), membangun kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah di tingkat nasional maupun internasional.

6.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Pulau Sumatera dan termasuk dalam lingkup Provinsi Jambi, dibagian Barat Provinsi Jambi terdapat pegunungan Bukit Barisan yang dibatasi oleh Gunung Kerinci dan Bagian Timurnya langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan hilir dan selalu menerima kiriman air dari beberapa anak sungai di bagian hulunya sehingga rawan akan banjir, perubahan iklim juga sering berpengaruh langsung sebagai penyebab timbulnya bencana, oleh karena itu Kota Jambi dikategorikan masih termasuk dalam lingkaran ancaman bencana terutama yang disebabkan oleh alam, kerawanan Kota Jambi terhadap bencana dapat dilihat juga dari sering terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, bencana angin puting beliung dan bencana kabut asap.

Pada tahun 2019 tingkat kejadian kebakaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 56 kejadian menjadi 85 kejadian. Dari 85 kejadian, penyebab kebakaran yang paling tinggi masih dipengaruhi oleh Korsleting Listrik sebanyak 44 kejadian, dengan jumlah kejadian terbesar berada di Kecamatan Kota Baru, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Kejadian Kebakaran Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian
1	Pasar	6 Kejadian
2	Jambi Timur	10 Kejadian
3	Telanaipura	9 Kejadian
4	Jambi Selatan	11 Kejadian
5	Kotabaru	25 Kejadian
6	Pelayangan	0 Kejadian
7	Danau Teluk	6 Kejadian
8	Jelutung	14 Kejadian
9	Alam Barajo	23 Kejadian
10	Danau Sipin	6 Kejadian
11	Paal Merah	19 Kejadian
12	Muaro Jambi	3 Kejadian
	Jumlah	130 Kejadian

Sumber: Disdamkar Kota Jambi 2020

Dalam kejadian kebakaran selama tahun 2019 tidak menimbulkan korban jiwa, dan kerugian materi diperkirakan sebesar Rp 2.541.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dan masyarakat secara umum, di Kota Jambi telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang anggotanya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang terkait dan berbagai unsur masyarakat.

Dalam menghadapi bencana, Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Provinsi, hal ini bermanfaat karena jika pada saat terjadi bencana Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi bisa mendapatkan bantuan dengan cepat utamanya untuk penanggulangan tanggap darurat.

Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penanggulangan bencana di Kota Jambi adalah :

1. Telah disiapkan satu regu Tim SAR dari Personil Kodim 0415 Batanghari Khusus untuk penanganan banjir Aliran Sungai Batanghari ini dan bila terjadi keadaan memaksa maka dapat diturunkan Tim dari Pol Airud.
2. Telah disiapkan Tim Siaga Satuan Penanggulangan Bencana yang posko utamanya berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, anggotanya terdiri dari lintas sektoral Instansi dalam Kota Jambi termasuk dari TNI dan Polri.
3. Telah disiapkan Tim Pemantau Daerah Rawan Bencana khususnya Banjir untuk melihat situasi dan Kondisi dinamika ketinggian air terutama pada saat musim hujan.
4. Melaksanakan Tindakan Pemadaman kebakaran sesuai dengan data bencana kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia, dan juga memberikan bantuan peduli bencana bagi masyarakat yang terkena bencana khususnya kebakaran.

Tabel 6.4
Perbandingan Kejadian Kebakaran Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Tahun 2018	Jumlah Kejadian Tahun 2019	Keterangan
1	Pasar	4 Kejadian	6 Kejadian	Kenaikan
2	Jambi Timur	7 Kejadian	10 Kejadian	Kenaikan
3	Telanaipura	6 Kejadian	9 Kejadian	Kenaikan
4	Jambi Selatan	5 Kejadian	11 Kejadian	Kenaikan
5	Kotabaru	15 Kejadian	25 Kejadian	Kenaikan
6	Pelayangan	1 Kejadian	0 Kejadian	Penurunan
7	Danau Teluk	5 Kejadian	6 Kejadian	Kenaikan
8	Jelutung	7 Kejadian	14 Kejadian	Kenaikan
9	Alam Barajo	13 Kejadian	23 Kejadian	Kenaikan
10	Danau Sipin	7 Kejadian	6 Kejadian	Penurunan
11	Paal Merah	9 Kejadian	19 Kejadian	Kenaikan
12	Perbatasan	6 Kejadian	3 Kejadian	Penurunan
	Jumlah	85 Kejadian	130 Kejadian	

Sumber: Disdamkar Kota Jambi 2020

6.5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.5.1 GANGGUAN YANG TERJADI

Secara umum kondisiketentraman dan ketertibanumum di Kota Jambi cukup baik. Terlihat pada tahun 2019 terdapat beberapa gangguan pada ketentraman dan ketertibanumumyang relatif masih rendah dan tentunya dapat dikendalikan, gangguan ketertiban yang terjadi berupa pelaksanaan aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib, penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai dengan peruntukan, masih banyaknya pengemis dan pengamen jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, kenakalan remaja dan anak sekolah, selain itu juga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota.

6.5.2 OPD YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sedangkan Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi dilaksanakan secara lintas sektoral artinya ditangani oleh beberapa OPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, DinasSosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan

berkoordinasi dengan TNI serta Polri. Dalam pelaksanaan pengamanan keamanan dan ketertiban secara langsung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, sedangkan untuk kegiatan yang berbentuk pemantauan dan koordinasi seperti pembentukan komisi intelijen daerah, forum komunikasi antar umat beragama, badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6.5.3 PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut pedagang kaki lima. Seperti kita ketahui bersama tingkat pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat dari setiap tahunnya dan asumsikan pada beberapa tahun kedepan akan semakin tumbuh pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disisi lain pertumbuhan pedagang kaki lima juga menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir. Adapun area yang telah dilakukan penataan PKL antara lain:

- a. Pasar Talang Banjar dan sekitarnya;
- b. Pasar Keluarga, Tugu Juang dan sekitarnya;
- c. Pasar Simpang Pulai dan sekitarnya;
- d. Pasar Kebon Andil dan sekitarnya;
- e. Pasar Simpang Bata dan sekitarnya;
- f. Pasar Mayang sari dan sekitarnya;
- g. Daerah-daerah sepanjang Jalan Protokol seperti: UNJA dan sekitarnya; IAIN dan sekitarnya; Sukorejo dan sekitarnya; Bandara dan sekitarnya;
- h. Daerah sepanjang Jalan Pattimura (STM, Mayang dan Nusa Indah);
- i. Daerah sepanjang jalan Kuburan Cina dan sekitarnya;

- j. Daerah Perbatasan dengan Muara Jambi dan Terminal Alam Barajo;
- k. Daerah Paal V dan Jenderal Basuki Rahmat;
- l. Pasar Jelutung dan sekitarnya;
- m. Taman Jomblo dan sekitarnya;
- n. Taman Remaja dan sekitarnya.

Satuan Polisi Pamong Praja juga mengadakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang sudah diberlakukan di Kota Jambi, seperti izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembangunan di Kota Jambi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu perkembangan anak jalanan, pengemis dan pekerja seks komersial yang pertumbuhannya cukup tinggi. Berkaitan dengan pekerja seks komersial Pemerintah Kota Jambi telah melakukan penutupan lokasi Payo Sigadung dan Langit Biru serta penghapusan praktek prostitusi sesuai dengan PERDA Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dan terus melakukan razia, pengawasan, penyuluhan dan pembinaan dengan bekerja sama antar aparat keamanan (Poltabes), Dinas Sosial dan unsur pemerintah lainnya.

6.5.4 KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan razia dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai wilayah dalam Kota Jambi dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unsur-unsur lain dalam pemerintahan termasuk aparat keamanan (POLRI dan TNI-AD). Tim Penertiban Pelanggaran Perda terdiri dari berbagai unsur Pemerintah termasuk aparat keamanan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

7.1. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan materi narasi dan data pada bab-bab terdahulu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2019 ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi terus menunjukkan tren positif. Hal ini bisa dilihat dari LPE Kota Jambi tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,33% naik dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,26%. LPE Kota Jambi sebesar 5,33% ini berada di atas LPE Provinsi Jambi dan Nasional, dimana pada tahun 2019 LPE Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,4% dan LPE Nasional sebesar 5,1%.
2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi pada tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari 8 (delapan) IKU, terdapat 6 (enam) IKU yang terealisasi di atas target; 1 (satu) IKU yang belum ada data realisasi, dikarenakan belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB; dan 1 (satu) IKU yang terealisasi di bawah target.
 - a. IKU yang terealisasi di atas target:
 - Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; target 9% terealisasi 24,66%;
 - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI); target 5,1 terealisasi 7,22;
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; target 52,06 terealisasi 52,46
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi; target 5,28% terealisasi 5,33%
 - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); target 8% terealisasi 16,13%;
 - Indeks Pembangunan Manusia; target 77,14 terealisasi 78,26.
 - b. IKU yang belum ada data realisasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dikarenakan data belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB.
 - c. IKU yang terealisasi di bawah target adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.
3. Adapun capaian indikator sasaran RPJMD Kota Jambi pada tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Sasaran RPJMD, terdapat 26 (dua puluh enam) indikator yang terealisasi sesuai atau di atas target; 2 (dua) indikator yang belum ada data realisasi, dikarenakan belum dikeluarkan oleh instansi berwenang; dan 6 (enam) indikator yang terealisasi sedikit di bawah target.

4. Untuk pelaksanaan Kerjasama di Kota Jambi sudah dikeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Satu Pintu. Selama Periode Tahun 2019 telah ditandatangani lebih dari 50 (lima puluh) *Memorandum Of Understanding* dan atau Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi dengan berbagai pihak.

7.2. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa seiring upaya optimalisasi sumber-sumber potensi PAD untuk menjaga arah positif laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan.
2. Dalam mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD maupun Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi, setiap Perangkat Daerah harus mengetahui apa dan bagaimana mencapai setiap indikator tersebut, sesuai dengan peran dan porsi masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya agar terus ditingkatkan;
3. Dalam hal MoU dan atau Kerjasama yang sudah ditandatangani, agar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Demikianlah beberapa kesimpulan maupun saran sebagai penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2019 ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima Kasih.

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

LAMPIRAN I

REALISASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI

1. URUSAN WAJIB

1.1. URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			7.319.084.700	6.726.640.411	91,91	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air, listrik	1 Tahun	325.000.000	194.806.447	59,94	100
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjang STNK kendaraan dinas operasional	108 Kendaraan	35.000.000	17.850.900	51,00	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	1 Tahun	744.560.000	594.563.000	79,85	100
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	198.500.000	198.331.000	99,91	100
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	46.641.700	46.381.000	99,44	100
	6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	15.000.000	14.810.000	98,73	100
	7 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	1 Tahun	25.000.000	24.935.000	99,74	100
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	5.200.000	3.054.000	58,73	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun	97.100.000	85.743.000	88,30	100
	10 Penyediaan jasa penunjang Adm/teknis Pemerintah	Tersedianya Jasa Pendukung ADM	1 Tahun	4.430.172.000	4.195.902.000	94,71	100
	11 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	1 Tahun	165.420.000	120.240.000	72,69	100
	12 Perjalanan Dinas	Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	1.231.491.000	1.230.024.064	99,88	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.234.346.600	1.218.486.720	98,72	
	1 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 Pekerjaan	125.750.000	125.750.000	100,00	100
	2 Pengadaan mebeleur	Mebeleur Kantor	191 Buah	280.790.000	278.350.000	99,13	100
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	235.250.000	235.000.000	99,89	100
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	108 Kendaraan	534.243.600	521.206.720	97,56	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	1 Tahun	25.313.000	25.180.000	99,47	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat kantor	Terpeliharanya alat- alat kantor	1 Tahun	33.000.000	33.000.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			117.895.000	104.611.000	88,73	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	234 Orang	117.895.000	104.611.000	88,73	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			222.879.500	139.617.000	62,64	100
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	160 Orang	77.062.500	11.000.000	14,27	100
	2 Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit	1 Kegiatan	145.817.000	128.617.000	88,20	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			154.370.000	151.367.500	98,05	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Pengembangan Data/Informasi	Pendataan Dapodik dan Update data	740 Orang	154.370.000	151.367.500	98,05	100
6	PROGRAM PENINGKATAN AKSES, MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN			121.980.846.698	112.892.497.196	92,55	
	1 Penyelenggara akreditasi SD	Meningkatnya akreditasi SD	35 Sekolah	25.862.500	24.502.500	94,74	100
	2 Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta penilaian pelaksanaan kurikulum	Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan Peserta didik kursus, PKG, LKP, PKBM	278 Orang	97.248.000	88.822.900	91,34	100
	3 Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS	Presentase Tercapainya peningkatan Sarana dan prsarana PAUD dan DIKMAS sesuai SPM	1 Kegiatan	1.387.565.000	1.189.534.774	85,73	100
	4 Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD	BOP PAUD dan Bosda PAUD	345 Lembaga PAUD, 300 Pendidik PAUD, dan 880 Orang tua PAUD	1.379.735.500	1.276.741.600	92,54	100
	5 Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan DIKMAS	Lomba atau Gebyar peserta didik PAUD dan Peserta didik DIKMAS	10 Mata lomba	386.080.000	380.280.000	98,50	100
	6 Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan kurikulum	Terlaksananya kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal SD	180 Peserta	86.781.000	45.181.000	52,06	100
	7 Peningkatan sarana prasarana SD	Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SD	14 Pekerja	14.188.654.500	10.912.888.470	76,91	100
	8 Pengembangan Kelembagaan SD	Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SD	3 Kegiatan	98.612.000	78.862.000	79,97	100
	9 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	BOS Transper Daerah dan BOSDA	187 Sekolah	56.751.592.398	53.838.750.384	94,87	100
	10 Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD	Lomba-lomba, O2SN, dan kreatifitas	5 Lomba	307.067.000	277.036.800	90,22	100
	11 Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	Terlaksananya ujian sekolah	3 Kegiatan	238.561.000	234.726.000	98,39	100
	12 Perlindungan penghargaan dan apresiasi Peserta Didik SD berprestasi tingkat Nasional	Peserta Didik berprestasi tingkat nasional	1 Kegiatan	269.462.700	269.462.700	100,00	100
	13 Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP serta penilaian pelaksanaan kurikulum	Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan	80 Peserta	158.020.000	138.400.000	87,58	100
	14 Peningkatan sarana prasarana SMP	Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SMP	25 Sekolah	17.351.755.800	17.301.898.860	99,71	100
	15 Pengembangan Kelembagaan SMP	Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SMP	2 Kegiatan	101.575.000	101.575.000	100,00	100
	16 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	BOS Transfer Daerah dan BOSDA	25 Sekolah	26.810.725.100	24.710.336.432	92,17	100
	17 Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga Peserta didik SMP	Lomba-lomba, O2SN dan kreatifitas	10 Lomba	470.069.000	442.269.659	94,09	100
	18 Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru	Terselenggaranya PPDB yang sesuai SNP SMP	1 Kegiatan	234.619.000	230.319.000	98,17	100
	19 Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	Peningkatan Hasil Kelulusan SMP	2 Kegiatan	38.785.000	38.785.000	100,00	100
	20 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Lulusan Paket A, B dan C	3 Kegiatan	447.819.000	245.818.500	54,89	100
	21 Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	100 Peserta	133.185.000	133.185.000	100,00	100
	22 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Peningkatan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	40 Lembaga	32.132.500	26.632.500	82,88	100
	23 Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS	Terlaksananya Pembinaan PAUD di lokasi P2WKSS, Pelatihan Mitra PAUD dan DIKMAS, Lomba Bunda PAUD dan Parenting	33 Guru PAUD, 73 Workshop Bunda PAUD, 22 Lembaga parenting, 22 Lomba Bunda PAUD, dan 40 Mitra PAUD dan Dikmas	150.368.500	148.917.000	99,03	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	24 Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD	Terlaksananya Bimtek Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	169 Orang	82.361.500	82.361.500	100,00	100
	25 Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan	Terlaksananya Rakor Perencanaan, Monev dan Publikasi Pendidikan	232 Orang	140.560.000	130.360.000	92,74	100
	26 Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP tingkat Nasional	Pemberian Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat Nasional	1 Kegiatan	197.317.500	145.317.500	73,65	100
	27 Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	Terlaksananya sosialisasi tunjangan profesi guru	150 Orang	51.613.200	51.613.200	100,00	100
	28 Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	Terlaksananya penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	4 Kegiatan	65.597.000	62.972.000	96,00	100
	29 Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Layanan Pendidikan Bagi Anak/Masyarakat Putus Sekolah	140 Orang	297.122.000	284.946.917	95,90	100
JUMLAH				131.029.422.498	121.233.219.827	92,52	100

1.2. URUSAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	4		5	6	7	8
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN			4.645.776.500	4.072.182.884	87,65	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	100%	1.185.496.500	901.298.365	76,03	100
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Ops	Tersedianya perawatan kendaraan Dinas	100%	50.000.000	42.548.600	85,10	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan admintrasi keuangan	100%	811.600.000	559.965.000	69,00	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlakananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	412.040.000	412.039.600	100,00	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya atk Dinkes	1th	110.000.000	109.684.300	99,71	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinya barang cetak dan penggandaan	100%	120.000.000	119.981.250	99,98	100
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya peralatan listrik gedung kantor	100%	15.000.000	15.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman kantor	1 th	80.000.000	51.496.500	64,37	100
	9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Tersedinya tenaga pendukung administrasi perkantoran	26 orang	452.760.000	452.760.000	100,00	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya tenaga jasa pengaman, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam puskesmas dan dinkes	44 org	638.880.000	637.670.000	99,81	100
	11 Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	1 th	770.000.000	769.739.269	99,97	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR			1.422.700.000	1.298.498.200	91,27	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	19.500.000	960.000	4,92	100
	2 Pengandaan peralatan perkantoran	Tersedinya alat-alat perkantoran	1 tahun	540.800.000	526.877.950	97,43	100
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan instalasi listrik kantor	1 th	130.000.000	129.658.100	99,74	100
	4 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedinya Pemeliharaan kendaraan dinas	42 mobil,165 motor	432.400.000	346.579.150	80,15	100
	5 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor	Tersedianya pemeliharaan alat-alat Kantor	1 th	100.000.000	95.590.000	95,59	100
	6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dinas	1 unit	200.000.000	198.833.000	99,42	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			72.000.000	71.775.000	99,69	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Harian pegawai	941 potong	72.000.000	71.775.000	99,69	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			201.379.000	177.136.060	87,96	100
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 tahun	160.554.000	137.166.000	85,43	100
	2 Perumusan Produk hukum	Tersedianya opearsional perumuan produk hukum bid kes	1 th	5.030.000	4.605.500	91,56	100
	3 Pengembangan sistem informasi kepegawaian dan ketatausahaan	Tersedianya sistim manajemen kepgawaian dan ketatausahaan Kantor dinkes	1 tahun	35.795.000	35.364.560	98,80	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			5.000.000	4.820.000	96,40	100
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokkumen laporan	3 dokumen	5.000.000	4.820.000	96,40	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			6.500.000	6.487.500	99,81	
	1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	1 dokumen	6.500.000	6.487.500	99,81	100
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			82.264.650	72.193.000	87,76	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data yang akurat dan tepat waktu	20 Pkm/Dinkes	82.264.650	72.193.000	87,76	100
9	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			84.826.823.531	70.820.636.108	83,49	
	1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Obat PKD,BMHP,Regensia	10 pkm dan 39 pustu	3.286.300.000	3.189.104.494	97,04	100
	2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya Sosialisasi Permenkes No.09 Tahun 2017 tentang Apotek, Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, Terlaksananya Pelatihan POR bagi Petugas Puskesmas, Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pertemuan PIO, Terlaksananya Pertemuan SIPNAP berbasis WEB, Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.	20 Puskesmas, 60 Sarana Apotek, 60 Sarana Toko Obat, 6 kecamatan	78.443.000	70.393.000	89,74	100
	3 Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 24 Jam, Khitanan Massal, Pengobatan Massal, Meningkatnya Perawatan Kesehatan Masyarakat, Pertemuan Petugas Haji, Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tingkat Kota, Meningkatnya Pelayanan Puskesmas Rawat Inap, Peresmian Puskesmas Rawat Inap	20 Puskesmas . 4 kali, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 5 Puskesmas, dan 2 Puskesmas Rawat Inap	250.900.000	189.880.750	75,68	100
	4 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	Terlaksananya Puskesmas yang Terakreditasi, Pelaksanaan citra pelayanan publik di Puskesmas, Penilaian Puskesmas berprestasi, Evaluasi kinerja Puskesmas, Pembinaan FKTP (Fasilitas KesehatanTingkat Pertama) dan Manajemen Puskesmas	20 puskesmas, 8 Puskesmas yang terakreditasi, FKTP Swasta	1.823.486.718	1.624.093.800	89,07	100
	5 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Terlaksananya Pembinaan RS Pemerintah & Swasta, Pertemuan Koordinasi SPGDT, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Medis, Evaluasi Pelaksanaan PSC 119 JES	17 RS (Pemerintah & Swasta), 40 Peserta, 50 Peserta, 20 Peserta, 40 Peserta dan 1 RSUD	17.447.257.800	13.910.776.601	79,73	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	6 Penyuluhan dan pengembangan Medis Promosi Kesehatan	Terlaksananya penyediaan media penyuluhan, lomba kelurahan ber-PHBS dan survei pemantauan PHBS Rumah tangga di Puskesmas/Kelurahan.	1 tahun	180.330.000	134.869.000	74,79	100
	7 Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Terlaksananya pelayanan posyandu terintegrasi dan desa siaga secara mandiri	100%	149.932.500	102.523.000	68,38	100
	8 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya perawatan balita gizi buruk. Terlaksananya penimbangan berat badan balita. Terlaksananya pemberian ASI eksklusif usia 0 - 6 bulan. Terlaksananya pemberian kapsul Vit- A usia 6 - 59 bulan. Terlaksananya pemberian FE 90 pada bumil. Terlaksananya Surveilans GIZI pada puskesmas. Terlaksananya MP ASI pada usia 6 - 24 bulan dan PMT bumil dari keluarga miskin. Terlaksananya pemberian tablet tambah darah pada remaja putri	100%. 85%. 85%. 85%. 100%. 100%. 80%. 25%	99.653.000	97.598.000	97,94	100
	9 Penyehatan Lingkungan	Terbentuknya Kelurahan yang melaksanakan STBM, Forum Kota Sehat, POKJA Pasar Sehat dan Pengetahuan Industri RumahTangga tentang Keamanan Pangan	20 Kelurahan, 8 Kecamatan, 1 Pasar, 80 IRT	260.775.300	181.956.970	69,78	100
	10 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya angka penyakit Malaria,Chikungunya, penyakit rabies dan filariasis serta menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD dan	1 tahun	419.885.000	387.453.350	92,28	100
	11 Pencegahan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3i) dan pengendalian penyakit tidak menular	Tercapainya persentase pemberian imunisasi pada bayi, balita, anak sekolah, WUS dan bumil serta terlaksananya kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	100%	593.705.260	357.784.500	60,26	100
	12 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya pengamatan rutin penyakit, pelatihan petugas surveilans, umpan balik laporan, Monev, pelacakan jemaah haji, PE, Investigasi penyakit di masyarakat yang dapat menimbulkan KLB	1 tahun	56.100.000	54.810.000	97,70	100
	13 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB paru, Kusta, HIV/AIDS, ISPA dan Diare	1 tahun	445.058.740	386.954.216	86,94	100
	14 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Meningkatnya Puskesmas yang memenuhi standar Sarana dan Prasarana Kesehatan	100%	2.444.716.000	2.207.884.280	90,31	100
	15 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu	Meningkatnya pembangunan gedung Puskesmas dan Pustu	1 tahun	934.000.000	932.665.500	99,86	100
	16 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pasien kurang mampu	Terpenuhinya pembayaran premi masyarakat miskin dan pengobatan pasien kurang mampu, sosialisasi jaminan kesehatan masyarakat	1 tahun	8.098.851.574	7.934.644.374	97,97	100
	17 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan keluarga berencana	Terlaksananya Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana	90%	523.500.000	510.901.300	97,59	100
	18 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja dan lansia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia	20 Pkm	112.100.000	89.300.000	79,66	100
	19 Bantuan Opearsional Kesehatan (BOK)	Terpenuhinya dana BOK untuk 20 PKM dan 1 Dinas	1 tahun	11.733.000.000	8.762.235.918	74,68	100
	20 Peningkatan pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional, pelatihan asuhan mandiri bagi petugas Puskesmas dan Kader TOGA, tersosialisasi asuhan mandiri dan TOGA bagi lintas sektor se Kota Jambi	20 Pkm dan 11 Kec	93.254.000	79.887.860	85,67	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	21 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan olah raga	Terlaksananya Kesehatan Kerja pada Perusahaan dan fanyankes serta Kesehatan olah raga pada Sekolah, remaja dan peserta posyandu	30 perusahaan/fanyankes, 10 sekolah, 20 puskesmas	61.595.000	57.449.970	93,27	100
	22 Pengendalian Penyakit tidak menular dan pelayanan kesehatan jiwa	Terlaksananya kegiatan dan pelatihan posbindu, pelatihan teknis pelayanan hipertensi, pengelolaan DM dan terbentuknya desa siaga sehat jiwa di tiap kelurahan serta alat kesehatannya.	1 tahun	838.627.000	469.661.995	56,00	100
	23 Operasional BLUD	Terlaksananya BLUD	20 Pkm	34.895.352.639	29.087.807.231	83,36	100
TOTAL				91.262.443.681	76.523.728.752	83,85	100

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ABDUL MANAF KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.673.264.000	1.414.808.000	84,55	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	100%	4.000.000	-		
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 Tahun	537.664.000	475.008.000	88,35	100
	3 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti, dan penjaga malam	Tersedianya kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti, dan penjaga malam	1 Tahun	1.131.600.000	939.800.000	83,05	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			42.846.514.114	42.445.274.846	99,06	
	1 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung kantor	100%	42.387.669.114	42.098.135.000	99,32	100
	2 Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebeleur	100%	119.750.000	118.962.250	99,34	100
	3 Pengadaan peralatan perkantoran	Terlaksana kegiatan pengadaan peralatan perkantoran	100%	239.095.000	228.177.596	95,43	100
	4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			100.000.000			
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			450.686.000	438.925.000	97,39	
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bintek dan pelatihan bagi PNS di Rumah Sakit	100%	450.686.000	438.925.000	97,39	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2.000.000	2.000.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LAKIP	8 Dokumen	2.000.000	2.000.000	100,00	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			2.500.000	2.500.000	100,00	
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja	100%	2.500.000	2.500.000	100,00	100
6	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANA KESEHATAN MASYARAKAT			60.954.564.444	53.877.886.508	88,39	
	1 Pengendalian mutu pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan pengendalian mutu Rumah Sakit	1 Tahun	3.514.800.000	2.384.900.000	67,85	100
	2 Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan pengadaan ambulance dan genset	100%	2.362.611.143	2.257.049.208	95,53	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Pengadaan alat-alat Rumah Sakit dan alat-alat kesehatan lainnya	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat kesehatan	100%	5.408.919.743	5.279.674.344	97,61	100
	4 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	Terlaksana kegiatan pelayanan Rumah Sakit	1	4.547.962.200	4.388.382.742	96,49	100
	5 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit	100%	576.000.000	207.000.000	35,94	100
	6 Penyediaan dan tenaga pendukung administrasi Rumah Sakit/Puskesmas dan tenaga teknis Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan tenaga teknis Rumah Sakit	1 Tahun	1.320.000.000	959.600.000	72,70	100
	7 Dukungan pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan dukungan pelayanan BLUD	100%	43.224.271.358	38.401.280.214	88,84	100
JUMLAH				105.929.528.558	98.181.394.354	92,69	100

1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.897.792.000	2.429.375.547	83,84	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Sumberdaya Listrik	100%	477.400.000	285.015.174	59,70	100
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa.	100%	1.340.421.000	1.080.315.450	80,60	100
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	150.300.000	149.976.800	99,78	100
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan penggandaan	100%	53.000.000	52.999.400	100,00	100
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan pengelolaan administrasi kantor	100%	24.000.000	23.999.600	100,00	100
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen / peralatan listrik kantor	100%	10.000.000	9.997.000	99,97	100
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.135.000	835.000	73,57	100
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamuserta harian	100%	15.000.000	14.988.600	99,92	100
	9 Penyediaan Jasa pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan penjaga Malam	Terlaksananya keamanan dan kelancaran kantor	100%	90.396.000	75.330.000	83,33	100
	10 Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi konsultasi	100%	736.140.000	735.918.523	99,97	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana prasarana kantor yang representatif		1.796.350.000	1.703.068.348	94,81	
	1 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	1.Jumlah Pembangunan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor 2.Pemeliharaan Gedung/Bangunan Utilitas Kantor 3.Perencanaan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor 4.Pengawasan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	49.000.000	48.837.000	99,67	100
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasional 2. Bahan Bakar R2,R3,R4 dan R6	100%	572.450.000	532.778.948	93,07	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Pengadaan Peralatan Perkantoran	1. Jumlah Tabung Pemadam perlengkapan kantor	100%	899.400.000	854.248.500	94,98	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	50.000.000	49.780.000	99,56	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor	100%	15.000.000	14.586.000	97,24	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya jasa dan perbaikan peralatan kerja	100%	30.000.000	29.998.500	100,00	100
	7 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	100%	180.500.000	172.839.400	95,76	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Disiplin Sumber Daya Aparatur		125.000.000	102.489.750	81,99	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	125.000.000	102.489.750	81,99	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya kemampuan sumber daya aparatur		200.000.000	196.347.800	98,17	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	100%	200.000.000	196.347.800	98,17	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Tersedianya pedoman Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi		10.000.000	9.999.250	99,99	
	1 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	100%	10.000.000	9.999.250	99,99	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya Penyusunan data base infrastruktur ke-Puan		5.964.000	5.961.000	99,95	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Penyusunan data base infrastruktur ke-Puan	100%	5.964.000	5.961.000	99,95	100
7	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatnya pembangunan jalan di Kota Jambi	100%	142.325.736.400	139.573.366.700	98,07	
	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan dalam Kota Jambi	100%	129.643.781.400	127.409.420.530	98,28	100
	2 Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan dalam Kota Jambi	100%	10.349.575.000	10.165.167.450	98,22	100
	3 Oprasional dan pemeliharaan Unit Pengelolaan Campuran Aspal (UPCA)	Memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemerintah dan swasta	100%	2.332.380.000	1.998.778.720	85,70	100
8	PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG	Tersedianya saluran drainase yang baik		25.840.300.000	25.523.328.103	98,77	
	1 Pembangunan / Pemeliharaan, Jaringan Sungai, Saluran Drainase / Gorong - Gorong	1. Pembangunan baru daerah irigasi rawa	100%	25.840.300.000	25.523.328.103	98,77	100
		2. Pembangunan baru saluran drainase					
		3. Pembangunan baru box/gorong-gorong					
		4. pembangunan baru turap/perkuatan dinding sungai/saluran					
		5. Rahab saluran sungai					
		6. Normalisasi sungai					
		7. Pembersihan					
		8. Jembatan penyebrangan					
9	PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN UTILITAS PERKOTAAN	Terbangunnya pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan utilitas perkotaan	67,39%	100.973.303.650	98.904.540.900	97,95	
	1 Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Penduduk	Terlaksananya pelayanan sanitasi untuk masyarakat dalam Kota Jambi	0,97	24.740.000.000	24.402.371.900	98,64	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	2 Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1. Pembangunan jaringan pipa	100%	6.021.544.000	5.862.769.500	97,36	100
		2. Pemasangan SR Air Bersih					
		3. Pembuatan Sumur Bor					
		4. Pengawasan Jasa konsultasi					
		5. Peremajaan Pipa PDAM					
	3 Pembangunan Gedung/Utilitas Pemerintahan	Tersedianya infrastruktur gedung Pemerintah dalam kondisi baik	53,37	65.551.078.350	64.603.825.650	98,55	100
	4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Angkutan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana angkutan persampahan	100%	100.000.000	99.857.450	99,86	100
	5 Peningkatan Operasional IPLT	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan IPLT	100%	1.922.838.250	1.337.956.350	69,58	100
	6 Peningkatan Operasional TPA	Terlaksananya pemeliharaan TPA Talang Gulo	100%	2.637.843.050	2.597.760.050	98,48	100
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KAWASAN	Meningkatnya infrastruktur kota		1.137.720.600	1.063.062.300	93,44	
	1 Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke Pu an	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan infrastruktur ke PU an	kurang lebih 20 KM	1.052.720.600	979.463.750	93,04	100
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya laporan SIMEP, TEFRA, RUP, RFK, LAKIP, IKU, TAPKIN, LPPD	1 Jembatan	85.000.000	83.598.550	98,35	100
11	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Kota		534.000.000	326.552.500	61,15	
	1 Kegiatan Penataan Ruang	Tersusunnya RDTR	2 BWK	534.000.000	326.552.500	61,15	100
12	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya Pengawasan pemanfaatan ruang		370.097.000	176.113.700	47,59	
	1 Pengawasan pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 tahun	370.097.000	176.113.700	47,59	100
JUMLAH				276.216.263.650	270.014.205.898	97,75	100

1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.399.244.000	1.296.006.787	92,62	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor	1.333 Lembar	4.000.000	3.998.100	99,95	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi sumber daya air, listrik kantor dan internet	1 Rekening Telepon, 1 Rekening Air, 2 Rekening Listrik, dan 4 Rekening Internet	204.145.000	124.189.280	60,83	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	15.000.000	13.140.600	87,60	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	8 Orang Tim Pengadaan Barang/Jasa, 24 Orang Tim Pengelola Keuangan, 2 Orang Tim Pengelola Barang Dan Jasa Miliki Daerah, 5 Orang Operator SIKPD Non PNS dan 1 Orang Admin Pembangunan.	317.244.000	314.371.841	99,09	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	4 Orang Cleaning Service Dan 1 Orang Pemotong Rumput Beserta Peralatannya.	70.820.000	70.668.442	99,79	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	27.000.000	26.999.830	100,00	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.000.000	19.991.383	99,96	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan Ruangan Kantor	1 Tahun	5.000.000	4.997.025	99,94	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di kantor	1 Tahun	25.000.000	21.951.000	87,80	100
	10 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran kantor	7 Orang SLTA, 1 Orang D III Dan 1 Orang Sarjana.	229.080.000	229.080.000	100,00	100
	11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya pengaman dan Pengemudi kantor	3 Orang Tenaga Pengaman/Penjaga Malam Kantor Dan 1 Orang Tenaga Sopir	60.264.000	48.964.500	81,25	100
	12 Perjalanan Dinas	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	421.691.000	417.654.786	99,04	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	886.740.000	855.316.550	96,46	
	1 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya Pengadaan Peralatan Perkantoran Spanduk, Umbul-umbul dan Tiang	100%	192.050.000	172.529.950	89,84	100
	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Brangkas Kantor	1 Unit Brankas	33.600.000	32.967.000	98,12	100
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	320.740.000	317.070.000	98,86	100
	4 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor	1 Tahun	15.000.000	14.999.200	99,99	100
	5 Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gudang (APBD Murni), Rehab Toilet dan Rehab Ruang Kadis serta Pembangunan Toilet DPRKP	3 paket	325.350.000	317.750.400	97,66	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	40.500.000	40.392.000	99,73	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	54 Stel	40.500.000	40.392.000	99,73	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pengiriman Aparatur untuk Bimbingan Teknis	100%	85.000.000	84.500.120	99,41	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	1 Tahun	85.000.000	84.500.120	99,41	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	7.000.000	6.981.257	99,73	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Rumusan Lakip, RKT, Tapkin dan IKU	4 Jenis Dokumen	7.000.000	6.981.257	99,73	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan SKPD	100%	25.000.000	24.978.892	99,92	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya Rencana Strategis Dinas	1 Dokumen	15.000.000	14.986.737	99,91	100
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya Rumusan Renja, RKA, DPA dan Laporan Tahunan	Dokumen Renja, Dokumen RKA Murni Dan Perubahan, Dokumen DPA Murni dan Perubahan dan Laporan Tahunan SKPD	10.000.000	9.992.155	99,92	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase Penyusunan Arsip Keuangan dan Aset Kantor	100%	15.000.000	14.944.732	99,63	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Tertatanya Arsip Keuangan dan Aset Kantor	Dokumen Renja, Dokumen RKA Murni Dan Perubahan, Dokumen DPA Murni dan Perubahan dan Laporan Tahunan SKPD	15.000.000	14.944.732	99,63	100
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KAWASAN	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	100%	4.250.501.000	3.928.816.915	92,43	
	1 Penyelenggaraan perumahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	Terlaksananya Pengawasan Perumahan Melalui Monitoring dan Evaluasi : Dokumen Laporan	751.360.000	734.944.605	97,82	100
			Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga, Instansi Teknis, Pengembang dan Stakeholder yang berkaitan dengan Pembangunan Perumahan : 10 Kali Pertemuan				
	2 Penyelenggaraan permukiman	Terwujudnya Permukiman yang layak huni	Terlaksananya Koordinasi Dengan KOTAKU: 6 Kali	Rp3.236.046.000	3.038.132.810	93,88	100
			Terlaksananya Koordinasi Dengan BPS: 7 Kali				
			Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni: 202 Unit				
			Terlaksananya Perencanaan Permukiman Kumuh: 7 Kawasan				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
			Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan: 2 Kawasan				
			Terlaksananya Pendataan Permukiman: 1 Kecamatan				
	3 Pengawasan bangunan	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan IMB	200 Pendataan Bangunan, 30 Pembongkaran Reklame	263.095.000	155.739.500	59,20	100
9	PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN UTILITAS PERKOTAAN	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	100%	28.258.245.000	27.893.672.017	98,71	
	1 Peningkatan dan pemeliharaan LPJU	Terpeliharanya LPJU dan Lampu Hias Taman Kota Jambi	16.652 Titik	25.603.245.000	25.266.225.537	98,68	100
	2 Peningkatan dan pemeliharaan makam	Terawatnya dan Tertatanya TPU	15 Lokasi	2.655.000.000	2.627.446.480	98,96	100
JUMLAH				34.967.230.000	34.145.609.270	97,65	100

1.5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			623.746.000	549.771.395	88,14	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat izin senjata	8 Pucuk Senjata	22.000.000	22.000.000	100,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	147.000.000	87.789.139	59,72	100
	3 Lama penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa.	27 Orang	209.240.000	195.460.000	93,41	
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor, barang-barang peralatan kebersihan	2 Orang	27.200.000	26.400.000	97,06	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	19.937.700	99,69	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan OPD	1 Tahun	24.526.020	24.522.320	99,98	100
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	12.000.000	12.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	-	-	0,00	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta harian	1 Tahun	16.000.000	15.937.000	99,61	100
	10 Perjalanan dinas luar daerah, dalam provinsi, dalam Kota Jambi	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah, dalam provinsi, dalam Kota Jambi	1 Tahun	145.779.980	145.725.236	99,96	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.207.598.000	1.101.445.500	91,21	
	1 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	35.000.000	35.000.000	100,00	100
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	486.800.000	463.386.600	95,19	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersedianya sarana perkantoran yang memadai	1 Tahun	25.000.000	24.855.000	99,42	
	4 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	25 Unit	60.000.000	59.945.000	99,91	100
	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda enam dan roda dua	3 Unit	521.000.000	443.599.900	85,14	100
	6 Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan penunjang perkantoran	6 Unit	79.798.000	74.659.000	93,56	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			31.000.000	31.000.000	100,00	
	1 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	100 Stel Jas Hujan	31.000.000	31.000.000	100,00	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUM, SERTA PENEGAKAN REGULASI DAERAH	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	92,70%	5.149.586.000	5.009.828.000	97,29	
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Jambi	97,90%				
	1 Sosialisasi pengawasan, penyidikan dan penegakan regulasi daerah	Terlaksananya pengawasan penyidikan dan penegakan regulasi daerah	16 Kali	4.540.586.000	4.445.280.000	97,90	100
	2 Pengaman, pengawalan dan penertiban serta pendataan dan pemetaan rawan Trantibum dan Tranmas	Terlaksananya pengamanan, pengawalan, dan penertiban serta pendataan dan pemetaan rawan Trantibum dan Tranmas	21 Kali	609.000.000	564.548.000	92,70	100
5	PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	98,90%	773.718.800	765.984.800	99,00	
		Jumlah GAKLIN dan pencitraan Satpol PP Kota Jambi	99,30%				
	1 Pembinaan , pengawasan, evaluasi dan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	1 Tahun	195.000.000	193.650.000	99,31	100
	2 Pendataan, pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan	Terlaksananya pendataan, pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan	1 Tahun	578.718.800	572.334.800	98,90	100
JUMLAH				7.785.648.800	7.458.029.695	95,79	100

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			923.170.000	830.457.531	89,96	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Belanja Perangko & Materai		2.400.000	1.800.000	75,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Komunikasi Telepon Kantor		162.000.000	128.245.350	79,16	100
		Terlaksananya air bersih Kantor					
		Terlaksananya Listrik dan Penerangan Kantor					
		Terlaksananya Jasa Perizinan Pesawat HT					
	3 Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Retribusi PPP/APK dan Peningkatan PAD Sektor Pencegahan Kebakaran		1.650.000	1.650.000	100,00	100
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pajak, Asuransi kendaraan operasional dan Perpanjangan SIM		60.000.000	45.433.000	75,72	100
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Keu. secara efisien		224.423.000	190.103.000	84,71	100
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor		84.989.000	84.951.900	99,96	100
		Tersedianya peralatan kebersihan kantor					

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Kantor	27.000.000	27.000.000	100,00	100
		Tersedianya Kop Surat, Disposisi, Karcis Retribusi & Kwitansi Dinas				
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan/Photocopy	22.506.000	22.503.600	99,99	100
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	13.000.000	12.939.850	99,54	100
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perkantoran	19.750.000	19.662.500	99,56	100
	11 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Kegiatan Operasional Rumah Tangga Kedinasan dan Tersedianya Gas Elpiji	20.252.000	20.247.700	99,98	100
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Rapat Dinas secara optimal	10.000.000	8.121.400	81,21	100
	13 Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan secara baik dan optimal luar daerah	275.200.000	267.799.231	97,31	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.058.295.000	929.313.950	87,81	
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung berupa teralis jendela, R. Dapur, Papan Merk, Papan Struktur, dan perlengkapan gedung lainnya.	85.000.000	84.688.500	99,63	100
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan pada Gedung Kantor dan Posyankar Kecamatan	20.000.000	19.780.200	98,90	100
	3 Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Meubeler perkantoran dan Kursi Tamu	177.870.000	177.544.000	99,82	100
	4 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran berupa White Board, Lemari Arsip, Kursi Lipat dan Tempat Tidur Tamu dan Asrama	22.500.000	22.081.500	98,14	100
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Ruang Kerja Yag Baik	100.000.000	99.346.975	99,35	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya BBM dan Pelumas kendaraan dinas dan operasional yang siap pakai	355.800.000	234.300.000	65,85	100
	7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor siap pakai	7.000.000	6.996.000	99,94	100
	8 Pemeliharaan rutin / berkala alat alat kantor	Tersedianya Peralatan Elektronik yang siap pakai	47.975.000	44.464.775	92,68	100
	9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptanya suasana kerja yang baik dan asri	242.150.000	240.112.000	99,16	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		426.750.000	426.370.100	99,91	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya SDM yang berdisiplin berpakaian dalam pelaksanaan tugas kedinasan	243.000.000	242.775.900	99,91	100
	2 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Sarana Proteksi Diri Petugas Pemadam dan Penyelamat Kebakaran	183.750.000	183.594.200	99,92	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		278.100.000	188.500.000	67,78	
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas	278.100.000	188.500.000	67,78	70
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		4.550.000	4.538.525	99,75	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan RKA, AKIP, KEU, & TAHUNAN yang berkualitas	4.550.000	4.538.525	99,75	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD		5.500.000	5.499.500	99,99	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	3.000.000	2.999.500	99,98	100
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renja SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00	100
7	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DINI DAN MANAJEMEN LOGISTIK KEBENCANAAN		6.010.645.000	4.492.624.850	74,74	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual kebencanaan	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan SOP kebencanaan, rencana Aksi daerah tentang penanggulangan Bencana dan Pemetaan daerah rawan bencana	1 tahun	14.650.000	14.295.800	97,58	100
	2 Bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi penanganan bencana	Persentase Peningkatan Keterampilan Personil PB dalam Tekhnik Penyelamatan/Evakuasi Korban Bencana	1 tahun	92.670.000	81.638.250	88,10	100
		Terlaksananya Diklat Satgas, Dikjur Pemadam dan Diksar Pemadam Kebakaran					
		Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Relawan Kebakaran					
		Sosialisasi Daerah Rawan Bencana					
		Kegiatan Gladi dan Simulasi Bencana, Pengurangan Resiko Bencana dan Latihan Gabungan					
		Terlaksananya Penyuluhan Rutin Kampanye Kebakaran dan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan bahaya Kebakaran. Penyuluhan Keliling=24 kali penyuluhan/tahun, Penyuluhan ke sekolah 6 x setahun					
	3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Rutin Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung dan Penagihan Retribusi Kebakaran/Peningkatan PADkebakaran	1 tahun	16.500.000	16.467.100	99,80	100
	4 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana kebakaran	Tingkat Waktu Respon Time	1 tahun	461.700.000	459.197.400	99,46	100
	5 Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan	Pelayana Operasi Pemadam Kebakaran	1 tahun	27.900.000	27.900.000	100,00	100
	6 Rekrutmen Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana/Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	Kecukupan Aparatur dalam operasi pemaadam kebakaran	1 tahun	3.099.525.000	3.099.525.000	100,00	100
	7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	1 tahun	2.300.000	2.298.250	99,92	100
	8 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebencanaan	Tersedianya Sarana Alat Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (Selang, Nozel dan Pompa Portable)	1 tahun	1.746.000.000	243.926.150	13,97	15
		Tersedianya Peralatan Rescue dan Evakuasi Korban Bencana					
		Tersedianya Peralatan Pendukung Operasioanal Kebencanaan					
		Tersedianya Kendaraan Operasional Mobil Tangga Kebakaran					
	9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebencanaan	Tersedianya Armada Mobil Pemadam yang Siap Pakai		300.500.000	298.476.900	99,33	100
	10 Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat		248.900.000	248.900.000	100,00	100
		Fasilitasi Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi dan sebagai Pusat data Kebencanaan Kota Jambi					
JUMLAH				8.707.010.000	6.877.304.456	78,99	96,97

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase administrasi perkantoran yang tertib dilingkungan Kesbangpol	100%	1.048.832.000	1.012.937.340	96,58
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, internet, air dan listrik	telp, internet 20 mbps, air 360 m ³ , dan listrik 13.200 KWH	60.000.000	50.661.340	84,44
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pembayaran pajak	Roda 4 = 6 unit Roda 2 = 10 unit	11.000.000	5.852.000	53,20
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur internal OPD yang dilayani	41 orang	410.636.000	389.228.000	94,79
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang dibutuhkan	28 item	5.000.000	5.000.000	100,00
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan yang diservice	5 unit komputer, 9 unit laptop, dan 8 unit printer	12.500.000	12.500.000	100,00
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan materai yang disediakan	1 paket	30.000.000	30.000.000	100,00
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan	11 item cetak dan sesuai kebutuhan	13.473.000	13.473.000	100,00
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	9 item	2.900.000	2.900.000	100,00
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bungkus/kotak makanan dan minuman yang disediakan	360 kotak snack, 200 nasi kotak, 160 nasi bungkus, dan 72 galon	17.000.000	17.000.000	100,00
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubakti, dan penjaga malam	Jumlah penjaga keamanan kantor	2 orang	15.060.000	15.060.000	100,00
	11 Perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	40 kali	471.263.000	471.263.000	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja	100%	371.574.000	360.224.200	96,95
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit lemari arsip dan 50 m bendera merah putih	1.500.000	1.500.000	100,00
	2 Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 unit mesin air, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit UPS, 2 baterai laptop, dan 1 harddisk eksternal	64.550.000	59.550.000	92,25
	3 Pengadaan meubeleur	Jumlah pengadaan meubeleur	1 unit rak tv	11.500.000	11.500.000	100,00
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian gedung yang dilakukan perbaikan	Pengecatan pagar, gedung, perbaikan pembuangan limbah, serta perbaikan dek kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	6 unit mobil dan 10 unit motor	161.100.000	154.827.000	96,11
	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	14 unit AC	6.300.000	6.300.000	100,00
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagian yang dilakukan rehab	Pembuatan ruang Musholla	117.624.000	117.547.200	99,93
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	100%	20.000.000	20.000.000	100,00
	1 Pengadaan pakaian dinas harian	Jumlah pengadaan pakaian dinas	40 stel PDH	20.000.000	20.000.000	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	100%	5.000.000	3.050.200	61,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang	5.000.000	3.050.200	61,00	100
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			588.019.000	551.563.900	93,80	
	1 Fasilitasi, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	130.529.000	124.644.000	95,49	100
	2 Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	56 kali rapat	141.750.000	132.300.000	93,33	100
	3 Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Bangsa	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK, 4 kali silaturahmi kebangsaan, 4 kali pembinaan ideologi Pancasila	250.560.000	243.419.900	97,15	100
	4 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	3 kali rapat	65.180.000	51.200.000	78,55	100
6	PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN FASILITASI BAGI ORKESMAS DAN PARPOL			255.885.000	232.425.000	90,83	
	1 Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	Pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol	14 kali rapat, 12 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan pemilu	183.548.000	161.150.000	87,80	100
	2 Pembinaan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Bagi Partai Politik	Pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan	28.412.000	27.350.000	96,26	100
	3 Pemantauan Orkesmas	Pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol	8 kali rapat, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing, dan 6 kali pembinaan	43.925.000	43.925.000	100,00	100
JUMLAH				2.289.310.000	2.180.200.640	95,23	100

1.6. URUSAN SOSIAL

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.018.998.000	954.357.682	93,66	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi surat menyurat	1200 surat	4.500.000	4.500.000	100,00	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik.	Air= 1 Rekening, Internet 5 rekening, Listrik 5 rekening, telepon 3 rekening dan tv kabel 2 rekening	208.200.000	151.872.445	72,95	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan SKPD	PA,PPK, PPKom, PPBJ,PPHP, Pengurus Barang, Pemb Pengurus barang Pembantu Operator SIPKD dan Admin Administrasi Pembangunan	175.250.000	174.340.000	99,48	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor dan perlatan kebersihan kantor	1. Barang Kebersihan Kantor, 2. 3 Orang CS	70.000.000	70.000.000	100,00	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya kebutuhan ATK Dinas	Kertas, Tinta Printer Pena, Buku dan ATK lainnya	40.000.000	40.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya brg cetak dan penggandaan	90.820 lbr	40.000.000	40.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik dan Penerangan Kantor	Lampu, MCB dan Komponen Listrik lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-	-	#DIV/0!	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum rapat.	80 Kali	40.000.000	33.766.000	84,42	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramu bakti dan penjaga malam	tersedianya tenaga keamanan kantor,	10 Orang	135.000.000	135.000.000	100,00	100
	11 Perjalanan dinas	Tersedianya biaya Perjalanan Dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi	40 Kali	296.048.000	294.879.237	99,61	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR		606.200.000	591.640.385	97,60	
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan perkantoran	Filling Cabinet 5 Unit	30.000.000	29.865.000	99,55	100
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan perkantoran yang memadai	Ac Stand 1 Unit	15.000.000	14.940.000	99,60	100
	3 Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana Perkantoran yang memadai	Meja Kerja 5 Unit Meja Receptionist 1 Unit, Kursi kerja 5 Unit dan Kursi Rapat Stenlies 56 Unint	45.400.000	45.265.000	99,70	100
	4 Pengadaan peralatan perkantoran	tersedianya peralatan perkantoran yang memadai	Komputer All In One 2 Unit Printer 2 Unit Mesin Absen 1 set dan sound system wirels 1 buah	53.000.000	52.655.900	99,35	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengecetan Gedung	66.400.000	66.400.000	100,00	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	R2=15 Unit, R4= 12 Unit	350.000.000	337.187.485	96,34	100
	7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Racun Api dan Tabung Gas	4.400.000	3.375.000	76,70	100
	8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	AC	15.000.000	15.000.000	100,00	100
	9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meja Kerja Kursi lemari	12.000.000	12.000.000	100,00	100
	10 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer PC, Laptop, Notebook,,Printer	15.000.000	14.952.000	99,68	100
						#DIV/0!	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA DISPLIN APARATUR		34.800.000	34.771.000	99,92	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya	tersedianya pakaian dinas	58 Stell	34.800.000	34.771.000	99,92	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		15.000.000	-	#DIV/0! 0,00	100 100
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya Keikutsertaan Bimtek	3 Orang	15.000.000		0,00	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		2.900.000	2.900.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	2.900.000	2.900.000	100,00	100
						#DIV/0!	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN		2.900.000	2.900.000	100,00	
	1 Penyusunan Rencana kerja SKPD	Terlaksananya pembuatan Renja SKPD	6 Dok	2.900.000	2.900.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN		8.000.000	8.000.000	100,00	
	1 Pengembangan data/informasi	informasi data Dinas Sosial yang akurat	Pembuatan artikel dan Operator Web	8.000.000	8.000.000	100,00	100
8	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Tertangani Per Tahun	65	3.568.102.000	3.329.677.111	93,32	
	1 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dan jumlah taruna siaga bencana (Tagana) yang telah mengikuti pemantapan	100%	554.560.000	550.998.950	99,36	100
	2 Perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah keluarga penerima manfaat PKH yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	250 org	1.130.750.000	1.081.870.000	95,68	100
	3 Pemberdayaan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang mendapatkan pemberdayaan dan pembinaan	38 org	197.422.000	179.757.100	91,05	100
	4 Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang difasilitasi dan dipulangkan	200 orang	170.000.000	163.210.000	96,01	100
	5 Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak bermasalah sosial dan lansia	- Jumlah anak balita terlantar diluar panti, - Anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani - Jumlah anak jalanan yang mendapatkan bimbingan dan bantuan - Jumlah lansia yang mendapatkan perlindungan, pendampingan dan bantuan	- 150 anak - 55 lansia terlantar	300.950.000	285.709.661	94,94	100
	6 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Persentase Gepeng, Tuna Sosial, Eks Napi, dan Tuna Wisma yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	20%	426.000.000	382.836.300	89,87	100
	7 Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza	Persentase penyandang disabilitas dan korban napza yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	20%	59.000.000	58.250.000	98,73	100
	8 Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, keuangan dan kesetiakawanan sosial	- Jumlah keluarga veteran yang mendapatkan bantuan - Jumlah generasi muda yang telah mengikuti	80 org	194.170.000	188.919.700	97,30	100
	9 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan mengenai izin pengumpulan uang dan barang	75 org	52.250.000	48.618.000	93,05	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	10 Pendataan dan informasi fakir miskin	Jumlah keluarga miskin yang telah diverifikasi dan validasi data sesuai dengan basis data terpadu (BDT) melalui Siks-NG	7000 KK	153.000.000	93.476.000	61,10	100
	11 Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin	Jumlah orang miskin yang sudah mendapatkan penyuluhan, pelatihan, bantuan dan jumlah kube yang mendapatkan pembinaan dan bantuan	42 org	230.000.000	225.341.400	97,97	100
	12 Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (Rekomendasi SKTM) dan jumlah pembinaan e-warung	- 100 org - 4 e-warung	100.000.000	70.690.000	70,69	100
JUMLAH				5.256.900.000	4.924.246.178	93,67	100

1.7. URUSAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.353.632.000	1.282.908.981	94,78	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa administrasi surat menyurat	3203 surat	3.400.000	3.288.000	96,71	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		100%	160.140.000	126.996.081	79,30	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi pengelola keuangan	100%	196.152.000	171.858.000	87,61	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya barang dan jasa kebersihan pemeliharaan kantor	3 org tenaga kebersihan	56.060.000	53.920.000	96,18	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	53.804.000	53.804.000	100,00	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung pengelolaan administrasi kantor untuk administrasi kantor	8 item belanja cetak dan penggandaan	51.245.000	48.070.000	93,80	100
	7 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 item	9.400.000	9.400.000	100,00	100
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	18 kali rapat	17.507.000	17.022.000	97,23	100
	9 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya pengemudi, penjaga malam dan tenaga kontrak	14 orang	246.444.000	243.144.000	98,66	100
	10 Perjalanan dinas	Tersedianya penunjang koordinasi, konsultasi dan urusan dinas lainnya	(38 kali luar daerah, 92 kali dalam daerah)	559.480.000	555.406.900	99,27	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR NEGARA			503.873.000	479.179.800	95,10	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	60.000.000	56.800.000	94,67	100
	2 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	121.782.000	117.123.000	96,17	100
	3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM, suku cadang dan service, accessoris dan perlengkapan kendaraan dinas /operasional	100	292.091.000	276.991.800	94,83	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kantor	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan alat-alat kantor	100%	20.000.000	18.265.000	91,33	100
	5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya ruang dapur dan ruang menyusui	100%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			43.400.000	38.500.000	88,71	100
	1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik teluk belango	56 stel	43.400.000	38.500.000	88,71	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			113.000.000	110.825.000	98,08	
	1 Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan diklat dan bimtek bagi aparatur	11 orang	113.000.000	110.825.000	98,08	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			2.588.000	2.213.000	85,51	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan tahunan LAKIP (LKJ), IKU, PK, RKA dan LPPD	6 dokumen	2.588.000	2.213.000	85,51	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			9.136.000	8.704.000	95,27	
	1 Penyusunan rencana strategis SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan renstra	1 dokumen	7.500.000	7.284.000	97,12	100
	2 Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya dokumen renja	1 dokumen	1.636.000	1.420.000	86,80	100
7	PROGRAM PENGMBANGAN DATA/INFORMASI			15.000.000	15.000.000	100,00	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi OPD	5 aplikasi,3 medsos	15.000.000	15.000.000	100,00	100
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS, PERLINDUNGAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			796.731.500	744.605.250	93,46	
	1 Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja,	140 orang	430.225.250	397.148.000	92,31	100
	2 Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antar Kerja & Terselenggaranya Job Fair Kota Jambi dan sistem manajemen Mutu ISO 9001-2015 Bidang Penempatan Kerja	20 perusahaan	217.810.250	207.097.250	95,08	100
	3 FasilitasPenyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81%	108.250.000	104.500.000	96,54	100
	4 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan	40.446.000	35.860.000	88,66	100
JUMLAH				2.837.360.500	2.681.936.031	94,52	100

1.8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.263.919.000	1.217.811.406	96,35	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	4 Orang, Surat Masuk : 1283 dan Surat Keluar : 898	69.320.000	69.318.000	100,00	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Penyediaan Air, Listrik, Telpo	Air= 1.191. M3, Internet 1560 Mbps, Listrik 41.500 KWH	287.000.000	261.611.304	91,15	100
	3 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya penyediaan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	R4 = 7 Unit, R2 = 16 Unit	15.200.000	10.867.100	71,49	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan SKPD	PA,PPK,PPKOM,PPBJ,PPH P, Pengurus Barang, Pemb Pengurus barang (29 orang)	413.674.000	402.670.000	97,34	100
	5 Penyedian jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan pelatan kebersihan kantor	Barang Kebersihan Kantor dan 2 Orang CS	65.720.000	65.714.000	99,99	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kertas, Tinta Printer Pena, Buku dan ATK lainnya	17.000.000	16.983.000	99,90	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Peggandaan	28.000 Lbr	17.000.000	16.991.000	99,95	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Bahan Suku Cadang Peralatan Listrik	Lampu pijar, Battery kering/accu dan Alat Listrik Elektronik lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat	12 Kali	30.000.000	29.869.000	99,56	100
	10 Perjalanan Dinas	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi/konsultasi dan studi banding berjalan dengan baik	5 Bidang	282.925.000	277.708.002	98,16	100
	11 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramu bakti dan penjaga malam	Terwujudnya Tenaga Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	5 Bidang	58.080.000	58.080.000	100,00	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.250.765.000	1.235.169.300	98,75	
	1 Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Gedung Kantor	388.500.000	378.400.000	97,40	100
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	18 Unit	199.000.000	198.500.000	99,75	100
	3 Pengadaan peralatan perkantoran	Terpenuhinya Peralatan Kantor	Komputer, Laptop, Printer, Website, Mic Wireless, Sound System dan Proyektor	178.545.000	175.500.800	98,29	100
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	24 Unit	237.720.000	235.968.500	99,26	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	50 Kali	15.000.000	15.000.000	100,00	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja	34 Unit	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Rehap Aula dan Perbaikan Saluran Got Pembuangan Air Kantor	Ruang Aula, Saluran Got Pembuangan Air	222.000.000	221.800.000	99,91	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			61.200.000	59.944.500	97,95	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai DPMPPA Kota Jambi	102 Stell	61.200.000	59.944.500	97,95	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			16.000.000	14.650.000	91,56	
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pegawai	4 orang	16.000.000	14.650.000	91,56	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			5.000.000	4.992.000	99,84	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	5.000.000	4.992.000	99,84	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			8.000.000	8.000.000	100,00	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya Penyusunan Buku Renstra dan KUA PPAS	10 Buku	4.000.000	4.000.000	100,00	100
	2 Penyusunan Rencana kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buku Renja dan KUA PPAS	10 Buku	4.000.000	4.000.000	100,00	100
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			118.725.000	98.900.000	83,30	
	1 Pengembangan data/informasi	Tersedianya Buku Profil Kelurahan, Tersedianya Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan, Data Profil Kelurahan Secara Online	118.725.000	98.900.000	83,30	100
8	PROGRAM PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					91,46	
	a. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Tersedianya data indikator pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender	0,023 100%	3.771.390.000 919.730.000	3.449.209.700 870.919.844	91,46 94,69	100
		Persentase OPD yang telah memiliki focal point PUG	20%				
		Persentase OPD yang memiliki data terpilah	20%				
		Jumlah organisasi perempuan yang terbina	4				
	b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak			427.135.000	425.995.000	99,73	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100%	282.160.000	256.090.000	90,76	100
		Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani	100%				
	d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Persentase jumlah TP PKK Aktif	100%	2.142.365.000	1.896.204.856	88,51	100
		Persentase kelurahan Dasa Wisma yang berprestasi di wilayah P2WKSS	100%				
JUMLAH				6.494.999.000	6.088.676.906	93,74	100

1.9. URUSAN PANGAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.188.184.000	2.087.055.318	95,38	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa telepon, air bersih, dan wifi kantor	38 rekening	344.100.000	296.930.740	86,29	100
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	42 Orang	338.384.000	295.026.800	87,19	100
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembelian peralatan kebersihan	25 item	14.200.000	14.194.250	99,96	100
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	30 item	48.520.000	47.872.000	98,66	100
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Cetak Dan Penggandaan Dokumen Kantor	6 item	47.940.000	47.920.000	99,96	100
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian Komponen Peralatan Listrik	14 item	63.000.000	63.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Rutin Dan Penerimaan Tamu	1 Tahun	12.000.000	11.999.000	99,99	100
	8 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Pembayaran Gaji Tenaga Harian Lepas (THL)	27 Orang	475.200.000	465.960.000	98,06	100
	9 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Penyediaan Jasa Pengaman Kator,Pengemudi,Pramubhaktida Penjaga Malam	24 Orang	348.480.000	348.480.000	100,00	100
	10 Perjalanan Dinas	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	1 Tahun	496.360.000	495.672.528	99,86	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			970.410.000	912.685.550	94,05	
	1 Pengadaan Peralatan perkantoran	Pembelian Peralatan Kantor	1 Paket	110.940.000	78.697.250	70,94	100
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pembaayaran Biaya Operasional Kendaraan Dinas - Roda Dua - Roda Empat	1 Tahun	826.070.000	800.588.300	96,92	100
	3 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1 Tahun	33.400.000	33.400.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			135.000.000	128.400.000	95,11	
	1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai PNS Dan Non Pns	225 stell	135.000.000	128.400.000	95,11	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			33.750.000	11.775.000	34,89	
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-Undangan	Jumlah Kali ASN DPKP Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	83 Kali	33.750.000	11.775.000	34,89	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			1.000.000	1.000.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja aparatur	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6 Dokumen	1.000.000	1.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			9.060.000	8.124.000	89,67	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra DPKP Yang Di Cetak	1 Buku	750.000	750.000	100,00	100
	2 Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Yang Tercetak	1 Buku	8.310.000	7.374.000	88,74	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			15.600.000	15.519.000	99,48	
	Pengembangan Data/informasi	Jumlah Postingan Kegiatan OPD	48 postingan	15.600.000	15.519.000	99,48	100
8	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PETANI			1.123.319.000	1.027.066.460	91,43	
	1 Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	56 kelompok	161.183.000	153.131.300	95,00	100
	2 Pengembangan cadangan pangan pemerintah	Peningkatan cadangan pangan daerah	10 Ton	129.248.000	119.283.460	92,29	100
	3 Pengembangan Desa mandiri pangan	Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	4 Kelurahan	122.250.000	109.799.200	89,82	100
	4 Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pangan segar yang diuji	80 Sampel	128.700.000	122.785.100	95,40	100
	5 Penyuluhan sumber pangan alternatif	Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA berbasis sumber daya lokal : - Energi	2150 k kal	127.625.000	117.193.000	91,83	100
		Protein	57 gr				
	6 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani	45%	109.960.000	80.310.000	73,04	100
	7 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah Kecamatan yang dibina oleh penyuluh	11 Kecamatan	138.992.000	121.417.000	87,36	100
	8 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	36 KK	168.241.000	166.777.400	99,13	100
	9 Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 Kali	37.120.000	36.370.000	97,98	100
JUMLAH				4.476.323.000	4.191.625.328	93,64	100

1.10. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.751.085.584	1.612.734.105	92,10	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 rekening listrik (kwh), 7 rekening air (m3), 1 rekening telepon, internet unlimited (Mb)	425.100.000	330.536.956	77,76	100
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan dan aset	1 tahun	495.739.000	478.428.000	96,51	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	41.745.000	41.695.000	99,88	100
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	98.018.584	97.970.000	99,95	100
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	26.240.000	26.240.000	100,00	100
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 buah lampu philips, 2 buah senter besar, 6 buah gulungan kabel standar, 50 pcs battery type AAA, 50 pcs Battery AA, 40 pcs Battery petak	8.085.000	8.085.000	100,00	100
	6 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun	80.000.000	58.259.755	72,82	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	7 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya jasa pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	2 penjaga malam, 1 penjaga speedboat, 2 sopir	76.158.000	72.074.500	94,64	100
	8 Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	1 Tahun	500.000.000	499.444.894	99,89	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			926.400.000	851.460.811	91,91	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit podium	10.000.000	9.900.000	99,00	100
	1 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur .	1 unit meja rapat, 4 unit kursi, 10 unit kursi rapat, 1 set sofa, 1 paket meja pengujian preparasi.	77.500.000	76.050.000	98,13	100
	2 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan kantor	2 unit AC 2 pk, 2 unit AC 1 pk, 3 unit komputer, 7 unit laptop, 4 unit printer, 6 unit scanner, 3 unit UPS/Stabilizer, 1 unit proyektor, 1 unit handycam, 1 unit GPS, 1 unit hand phone/smartphone	325.500.000	289.964.013	89,08	100
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	1 tahun	25.000.000	25.000.000	100,00	100
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya alat-alat kantor	1 tahun	238.050.000	200.833.708	84,37	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	5 unit kendaraan dinas roda empat, 13 unit kendaraan dinas roda dua, 1 unit genset, 1 unit gerobak motor	30.000.000	29.953.090	99,84	100
	6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	3 paket pekerjaan	220.350.000	219.760.000	99,73	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			108.750.000	107.662.500	99,00	
	1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	145 Stel	108.750.000	107.662.500	99,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			180.000.000	179.609.260	99,78	
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus	1 Tahun	180.000.000	179.609.260	99,78	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2.498.000	2.498.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 dokumen laporan tahunan, 1 dokumen lakip, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen Renja	2.498.000	2.498.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			3.884.400	3.884.400	100,00	
	1 Kegiatan Penyusunan renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	4 dokumen	2.767.000	2.767.000	100,00	100
	2 Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya standart pelayanan minimal (SPM)	1 dokumen	1.117.400	1.117.400	100,00	100
7	PROGRAM PENURUNAN BEBAN PENCEMAR			2.027.579.666	1.970.029.425	97,16	
	1 Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Terlaksananya pemantauan sumber pencemaran	1 laporan	669.956.600	631.679.147	94,29	100
		Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	100%				
	2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Tercapainya jumlah sampel yang diuji	250 sampel, 91 titik	1.357.623.066	1.338.350.278	98,58	100
		In house training	3 kali				
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN, RTH RUANG PUBLIK DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI			11.418.783.200	11.125.865.332	97,43	
	1 Pelaksanaan konservasi dan AMDAL	Terbitnya hasil penilaian/ pembahasan akhir dokumen lingkungan hidup	50 dokumen	510.105.600	484.384.746	94,96	100
		Diperolehnya anugerah adipura	anugerah adipura				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terbinanya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup	30 sekolah				
		Tersusunnya dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah	5 buku				
	2 Penegakan hukum dan komunikasi lingkungan	Pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan	96 perusahaan	123.260.000	107.022.000	86,83	100
		Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	100% penanganan kasus				
	3 Peningkatan kinerja pengelola RTH	Terlaksananya pembuatan taman kota	7 taman	9.189.483.250	8.979.825.036	97,72	100
		Terlaksananya penataan taman kota	11 taman				
	4 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah penyuluhan proklamasi	5 lokasi	316.625.000	305.975.000	96,64	100
		Jumlah peserta pemilihan duta lingkungan Kota Jambi	50 orang				
	5 Pengembangan, penanaman dan pengadaan ruang terbuka hijau hutan kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan taman hutan kota M. Sabki, RTH Bagan Pete dan Hutan Rengas	3 Lokasi	1.279.309.350	1.248.658.550	97,60	100
9	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			33.187.591.300	28.930.553.019	87,17	
	1 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Limbah B3	1 kali	32.855.505.800	28.710.513.019	87,38	100
		Pelatihan pengolahan sampah	10 lokasi				
		Terlaksananya pengelolaan persampahan dan limbah B3	1 tahun				
	2 Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah	Terlaksananya pengurangan sampah melalui Bank Sampah	10 ton/tahun	332.085.500	220.040.000	66,26	100
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				49.606.572.150	44.784.296.852	90,28	100

**1.11. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2		3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.916.990.000	1.658.104.473	86,50	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi surat menyurat tepat waktu	12 OB	2.400.000	2.400.000	100,00	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas ADM perkantoran	12 Bulan	332.400.000	223.936.628	67,37	100
	3	Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	20.000.000	14.857.600	74,29	100
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD	382 OB	229.472.000	202.212.000	88,12	100
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan kantor	12 Bulan, 24 OB	53.726.000	53.726.000	100,00	100
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelaksanaan ADM perkantoran	12 Bulan	130.048.000	130.048.000	100,00	100
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran	105.360 lembar,38 Buah, 400 Blok	57.494.000	56.065.000	97,51	100
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kenyamanan	12 Bulan	6.600.000	6.600.000	100,00	100
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan jamuan rapat/tamu	12 Bulan	22.000.000	9.674.000	43,97	100
	10	Perjalanan Dinas	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	262.000.000	246.068.745	93,92	100
	11	Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	492 OB	725.520.000	658.530.000	90,77	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2		3		4	5	6	7
	12	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramu bakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan kantor	60 OB	75.330.000	53.986.500	71,67	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR				1.759.156.000	1.661.436.000	94,45	
	1	Pengadaan peralatan perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	56 Unit, 4 Set	1.038.071.700	977.686.000	94,18	100
	2	Pengadaan meubeleur	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	34 Buah, 1 Set	55.500.000	52.782.000	95,10	100
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	2 Buah, 2 Unit	176.000.000	175.980.000	99,99	100
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	50.000.000	50.000.000	100,00	100
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kondisi kendaraan dinas	12 Bulan, 35 Unit/Tahun	273.900.000	247.268.000	90,28	100
	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kualitas gedung kantor	12 Bulan, 1 Unit/Tahun	52.000.000	44.090.000	84,79	100
	7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan perkantoran	3 Paket	113.684.300	113.630.000	99,95	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				67.200.000	58.200.000	86,61	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	112 Stel	67.200.000	58.200.000	86,61	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				10.000.000	9.000.000	90,00	100
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai	12 Bulan	10.000.000	9.000.000	90,00	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				5.000.000	5.000.000	100,00	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan kinerja	12 Bulan, 1304 Lembar, 71 Buku	5.000.000	5.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN				7.000.000	7.000.000	100,00	
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Terpenuhinya Renstra SKPD	12 Bulan, 5202 Lembar, 20 Buku	4.000.000	4.000.000	100,00	100
	2	Penyusunan Rencana kerja SKPD	Meningkatnya kualitas Renja SKPD	12 Bulan, 2746 Lembar, 10 Buku	3.000.000	3.000.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				96.250.000	96.050.000	99,79	
	1	Pengelolaan informasi data, dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas laporan dan informasi data kependudukan		96.250.000	96.050.000	99,79	100
8	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			93%, 82%, 87%	2.550.648.000	2.440.082.651	95,67	
	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya pelayanan publik di bidang pencatatan sipil	93%, 82%, 87%	87.875.000	86.465.000	98,40	100
	2	Pembinaan dan pengembangan pelayanan kependudukan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kependudukan	11 Kecamatan	163.275.000	160.550.000	98,33	100
	3	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen kependudukan administrasi kependudukan	93%	838.684.000	794.124.000	94,69	100
	4	Pengembangan sistem administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta persentase validitas database kependudukan	85%, 90,5%, 77,5%	1.460.814.000	1.398.943.651	95,76	100
JUMLAH					6.412.244.000	5.934.873.124	92,56	100

1.12. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2		3		4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				4.750.049.550	4.319.218.675	90,93	100
	1	Bersih aman dan pintar (Bantar)	Jumlah RT yang Mengikuti Program Kampung	468	1.903.535.000	1.550.227.000	81,44	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Persentase kelurahan aktif yang mengikuti program BBGRM	35%	155.000.000	127.195.000	82,06	100
	3 Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Persentase KPM Aktif di Kecamatan	80%	2.484.514.550	2.460.788.675	99,05	100
	4 Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan TTG	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	79%	207.000.000	181.008.000	87,44	100
		Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan TTG	70,96%				
	J U M L A H			4.750.049.550	4.319.218.675	90, 93	100

1.13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			921.815.000	815.079.446	88,42	
	1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun (3000 surat)	4.500.000	4.500.000	100,00	100
	2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kelancaran pelayanan rutin perkantoran	1 Tahun (1.044 M3, 4.320.000 VA, Unlimited)	128.400.000	92.849.153	72,31	100
	3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	12 Kendaraan roda empat, 69 Kendaraan roda dua	19.300.000	13.418.100	69,52	100
	4 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	35 Orang/petugas	291.644.000	226.665.000	77,72	100
	5 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	1 Orang/petugas	26.820.000	26.645.000	99,35	100
	6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	34.391.000	34.391.000	100,00	100
	7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	8.600.000	8.600.000	100,00	100
	8 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	9.000.000	8.960.000	99,56	100
	9 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan rapat dan koordinasi rutin	1 Tahun	15.600.000	15.600.000	100,00	100
	10 Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti, dan penjaga malam	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	3 Orang/petugas	43.560.000	43.560.000	100,00	100
	11 Kegiatan penyediaan perjalanan dinas	Meningkatnya kelancaran koordinasi dan tupoksi	1 Tahun	340.000.000	339.891.193	99,97	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			94.100.000	90.347.720	96,01	
	1 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	21 Meja kerja, 21 Kursi kerja	94.100.000	90.347.720	96,01	100
	2 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	1 Tahun (4 AC, 1 Mesin absen, 2 Tenda, 1 Jaringan fiber optik, 6 Laptop, 6 Printer, 1 Kamera, 1 Layar proyektor, 20 Tempat penyimpanan alat & Obat kontrasepsi, 165 Sarana kerja PPKBD, 16 BKB kit, 24 BKL kit)	1.458.000.000	1.311.155.000	89,93	100
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Kendaraan roda empat, 69 Kendaraan roda dua	455.200.000	415.645.681	91,31	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	4 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Meningkatnya kenyamanan kerja	1 Gedung (25 PC, server, laptop & server, 10 AC dan kamera, 16 Sound system wireless)	26.640.000	26.640.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		93.750.000	78.650.000	83,89	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin berpakaian PDH	125 Stel	93.750.000	78.650.000	83,89	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			13.210.000	11.610.000	87,89	100
	1 Penilaian Angka Kredit	Tersedianya data hasil penilaian angka kredit Penyuluh KB dan meningkatnya pengetahuan PNS tentang kepegawaian	1 tahun	13.210.000	11.610.000	87,89	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			276.230.000	238.520.000	86,35	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya kader pendataan, orientasi pencatatan & pelaporan	1 Tahun	276.230.000	238.520.000	86,35	100
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4.413.643.000	4.197.282.855	95,10	
	1 Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan peserta KB aktif dan KB baru	1 Tahun	670.650.000	647.395.800	96,53	100
	2 Institusi dan partisipasi masyarakat dan KIE	Terlaksananya Pembinaan dan penilaian kader IMP,PPKBD, dan Sub PPKBD, saka kencana dan posdaya	1 Tahun	922.100.000	919.020.000	99,67	100
	3 Bantuan Operasional KB	Penyuluhan dan pendistribusian alat kontrasepsi	1 Tahun	2.393.933.000	2.227.007.055	93,03	100
	4 Pembinaan dan Operasional Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan catur bina dan orientasi KS	1 Tahun	426.960.000	403.860.000	94,59	100
JUMLAH				7.752.588.000	7.184.930.702	92,68	100

1.14. URUSAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya administrasi perkantoran dengan		2.047.456.000	1.986.476.801	97,02	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perpanjangan izin senjata api peluru karet	750 buah, 12 buah	27.900.000	27.000.000	96,77	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Telepon	12 Bulan	301.060.000	283.381.163	94,13	100
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	19 unit R4,46 unit R2, 5 unit R6	50.000.000	49.482.300	98,96	100
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	315.650.000	315.650.000	100,00	100
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan lingkungan kerja terpelihara dan terjaga	5 Lokasi	187.900.000	186.038.000	99,01	100
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	45 Jenis	108.600.000	108.185.000	99,62	100
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	64.675.000	52.029.250	80,45	100
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	15.000.000	14.859.500	99,06	100
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan rapat dan makan tamu	12 Bulan	36.271.000	35.997.950	99,25	100
	10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Pegawai Tidak Tetap	2 Orang	43.560.000	32.750.000	75,18	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya petugas jaga keamanan lingkungan kantor dan terminal, sopir dan kernet	14 org 5 lokasi jaga, 5 org sopir umum, 5 org sopir bus, 2 org kernet	427.068.000	411.430.900	96,34	100
	12 Perjalanan Dinas	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pendidikan Pelatihan Formal	1 Tahun	469.772.000	469.672.738	99,98	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana dan Prasarana Aparatur semakin baik		2.016.080.000	1.914.138.977	94,94	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Pengawasan Parkir	5 Unit	75.000.000	74.037.500	98,72	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	34 buah kursi, 2 unit lemari arsip, 3 unit lemari arsip dorong, 1 unit brankas, 11 unit meja dan 1 set kursi tamu	120.300.000	118.653.500	98,63	100
	3 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan UPS	2 unit mesin absen, 15 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit tablet, 34 unit printer, 12 unit UPS, 20 unit HT dan 1 paket CCTV	545.700.000	494.912.600	90,69	100
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	5 Gedung	192.000.000	186.278.300	97,02	100
	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	5 unit R6, 19 unit R4, 51 unit R2, 2 unit Speed boat	1.001.400.000	960.923.227	95,96	100
	6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	25 unit AC, 1 set soud system, 3 sumur bor, 5 tabung pemadam kebakaran	20.000.000	18.853.950	94,27	100
	7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor	30 unit computer, 20 unit printer, 15 bh HT, 1 paket CCTV, 1 paket Mesin Absen, 1 set peralatan pengujian	61.680.000	60.479.900	98,05	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		545.295.000	528.428.650	96,91	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian lengkap dengan atribut	353 stel	445.520.000	428.976.650	96,29	100
	2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	307 stel	99.775.000	99.452.000	99,68	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kapasitas Sumberdaya Aparatur sesuai dengan bidang teknis pekerjaan		50.000.000	48.366.668	96,73	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	50.000.000	48.366.668	96,73	100
7	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Capaian Ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	4.462.030.000	4.331.649.537	97,08	100
		Cakupan yang terlayani angkutan umum	41,39%				
	1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pemeliharaan alat uji dan kalibrasi, pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang kendaraan Bensin, genset, CCTV, Running Text	65%	3.788.630.000	3.678.194.437	97,09	100
	2 Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Tersedianya dokumen study dan sistim aplikasi perhubungan	3 Dok	673.400.000	653.455.100	97,04	100
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN	Jumlah Pengurangan Titik Kemacetan		5.343.890.000	5.241.277.022,90	98,08	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	80%	4.568.390.000	4.488.840.022,90	98,26	100
	2 Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Operasional Perhubungan	Terlaksananya Razia Penertiban Angkutan Umum dan Pengendalian Kelancaran Arus Lalu Lintas	31%	775.500.000	752.437.000	97,03	100
9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN			2.390.714.000	2.239.420.231	93,67	100
	1 Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Persentase Peningkatan PAD Parkir	80%	1.806.964.000	1.716.324.059	94,98	100
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Parkir	80%	230.750.000	221.671.272	96,07	100
	3 Penertiban Sarana Parkir	Jumlah Titik Parkir yang Tertata	80%	353.000.000	301.424.900	85,39	100
JUMLAH				16.855.465.000	16.289.757.887	96,64	100

1.15. URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kinerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	1.161.790.000	1.067.783.002	91,91	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	100%	7.800.000	3.300.000	42,31	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	114.000.000	101.472.063	89,01	100
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	267.020.000	232.962.000	87,25	100
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	49.070.000	48.969.000	99,79	100
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	63.908.000	63.522.500	99,40	100
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	14.000.000	13.885.000	99,18	100
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	15.000.000	14.728.000	98,19	100
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	3.500.000	-	0,00	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	110.000.000	73.010.000	66,37	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	100%	30.132.000	28.876.500	95,83	100
	11 Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	100%	487.360.000	487.057.939	99,94	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	339.220.000	334.203.826	98,52	100
	1 Pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya pengadaan komputer dan printer	100%	50.000.000	49.879.200	99,76	100
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	229.920.000	225.347.626	98,01	100
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat alat kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	100%	59.300.000	58.977.000	99,46	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	100%	42.000.000	41.888.000	99,73	100
	Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 56 stel	100%	42.000.000	41.888.000	99,73	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	25.000.000	24.500.000	98,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Bimbingan Tekhnis implementasi peraturan perundangn undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	100%	25.000.000	24.500.000	98,00	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.400.000	-	0,00	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	100%	1.400.000	-	0,00	
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	1.800.000	1.160.000	64,44	100
	1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja	100%	1.800.000	1.160.000	64,44	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Terlaksananya pengembangan Data/Informasi	100%	105.150.000	90.717.400	86,27	100
	1 Pengkoordinasian pelaksanaan surfey, ferivikasi, kompilasi dan desiminasi data statistik	Terlaksananya pengkoordinasian pelaksanaan survey, verifikasi, kompilasi dan diseminasi statistik	100%	10.000.000	5.000.000	50,00	100
	2 Pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Terlaksananya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	100%	95.150.000	85.717.400	90,09	100
8	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan TI		4.100.165.000	3.943.809.455	96,19	100
	1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	800 Informasi, 620 Informasi	566.395.000	551.787.500	97,42	100
	2 Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya optimalisasi penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	2 Paket Koneksi Internet, 12 FO OPD, 6 Titik CCTV Perkotaan	3.127.340.000	3.021.653.071	96,62	100
	3 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2 kali Sosialisasi, 1 Dokumen Perda Smartcity	406.430.000	370.368.884	91,13	100
JUMLAH				5.776.525.000	5.504.061.683	95,28	100

1.16. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH			859.445.250	749.314.990	87,19	
	a. Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik bagi UMKM berupa alat tenun	666 UMKM	140.400.000	137.273.445	97,77	100
	b. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	- Terlaksananya pendataan UMKM	12.014 UKM 60 Orang	270.284.500	242.784.500	89,83	100
	c. Penguatan pemasaran bagi produk UMKM	Terlaksananya penguatan pemasaran/promosi pada produk koperasi dan UMKM	7 Kali	448.760.750	369.257.045	82,28	100
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			609.120.250	561.240.150	92,14	
	a. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya sosialisasi tentang perkoperasian	185 koperasi	101.380.000	89.622.000	88,40	100
	b. Penguatan Struktur Permodalan Koperasi	Terlaksananya fasilitasi peningkatan dan perluasan akses permodalan koperasi	185 koperasi	138.102.000	126.752.000	91,78	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	c. Pembinaan dan pengawasan koperasi	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengurus koperasi	168 koperasi	333.170.250	313.333.150	94,05	100
	d. Monitoring evaluasi dan pelaporan	Tersedianya peningkatan kualitas SDM koperasi	150 Koperasi	36.468.000	31.533.000	86,47	100
JUMLAH				1.468.565.500	1.310.555.140	89,24	100

1.17. URUSAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.517.971.500	1.396.753.654	92,01	100
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi surat menyurat	100%	4.860.000	4.860.000	100,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	100%	310.300.000	229.727.427	74,03	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	100%	12.750.000	6.753.300	52,97	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	262.236.000	248.868.000	94,90	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	100%	130.134.000	130.134.000	100,00	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	100%	77.426.000	76.580.800	98,91	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100%	99.188.000	97.748.700	98,55	100
	8 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	100%	20.000.000	19.995.000	99,98	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Pelayanan rapat dan koordinasi rutin	100%	42.446.000	39.743.500	93,63	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	12 orang	168.631.500	167.318.000	99,22	100
	11 Perjalanan dinas	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	390.000.000	375.024.927	96,16	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.129.783.000	1.002.369.499	88,72	100
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	100%	36.000.000	35.400.000	98,33	100
	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	100%	532.183.000	416.952.600	78,35	100
	3 Pengadaan Mebeller	Tersedianya Mebeller	100%	142.600.000	140.663.000	98,64	100
	4 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantoran	100%	148.200.000	142.458.399	96,13	100
	5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	190.800.000	190.018.000	99,59	100
	6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	100%	45.000.000	42.080.000	93,51	100
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kantor	Terpeliharanya alat alat kantor	100%	35.000.000	34.797.500	99,42	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			189.965.000	176.742.000	93,04	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%	189.965.000	176.742.000	93,04	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000	-	0,00	100
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			20.000.000		0,00	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			80.000.000	78.000.000	97,50	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Pengembangan Data/Informasi	terbangunnya informasi pelayanan perizinan melalui jaringan elektronik sehingga bisa diakses publik	100%	80.000.000	78.000.000	97,50	100
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK			785.760.000	718.142.200	91,39	100
	1 Verifikasi, penerbitan, identifikasi dokumen perizinan	Tersedianya blanko perizinan dan terlaksananya penerbitan dokumen perizinan	100%	302.243.000	275.687.000	91,21	100
	2 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Terlaksananya forum konsultasi publik dan terlaksananya publikasi pelayanan publik	100%	282.980.000	254.633.200	89,98	100
	3 Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	Tersedianya Informasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Terlaksananya tindak lanjut Pengaduan Perizinan	100%	162.122.000	159.407.000	98,33	100
	4 Pengelola data dan penataan arsip perizinan	Terkelolanya data dan arsip perizinan	100%	38.415.000	28.415.000	73,97	100
9	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI			269.955.500	247.970.000	91,86	100
	1 Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Promosi Investasi dan tersedianya Video potensi daerah	100%	199.697.000	185.848.000	93,06	100
	2 Sosialisasi penanaman modal	Terlaksananya Sosialisasi Penanaman Modal	100%	39.843.500	35.123.000	88,15	100
	3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100%	27.465.000	26.999.000	98,30	100
	4 Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Terlaksananya pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Penanaman Modal	100%	2.950.000	-	0,00	-
JUMLAH				3.993.435.000	3.619.977.353	90,65	100

1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.202.662.500	1.179.741.127	98,09	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Telepon, Air Bersih, Listrik dan Wifi/ Jaringan Internet beserta jaringan	12 bulan	86.000.000	76.469.535	88,92	100
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan	9.500.000	6.711.900	70,65	100
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Laporan Keuangan, LRA, Neraca, CALK	12 bulan	373.836.000	366.552.000	98,05	100
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	12 bulan	43.362.500	43.350.000	99,97	100
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	100%	45.000.000	45.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	105.000.000	104.142.500	99,18	100
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	30.000.000	30.000.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	10 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramuhakhti dan Penjaga Malam	Terlaksananya Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramuhakhti dan Penjaga Malam	1 tahun	60.264.000	60.264.000	100,00	100
	11 Perjalanan Dinas	Terlaksananya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi	1 tahun	434.700.000	432.251.192	99,44	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.010.090.000	1.000.387.700	99,04	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	53.500.000	52.990.000	99,05	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Mebeleur	1 tahun	79.318.020	78.657.200	99,17	100
	3 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Perkantoran	1 tahun	135.000.000	131.334.000	97,28	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	11.941.000	99,51	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 tahun	192.500.000	188.728.500	98,04	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	1 tahun	15.000.000	15.000.000	100,00	100
	7 Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Kantor	1 tahun	522.771.980	521.737.000	99,80	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			37.500.000	29.250.000	78,00	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%	37.500.000	29.250.000	78,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			25.000.000	19.500.000	78,00	
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pendidikan SDM/ Aparatur Pemerintah		25.000.000	19.500.000	78,00	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN			5.477.557.500	5.261.378.205	96,05	
	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1.055.306.620	1.052.261.400	99,71	100
	2 Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	Meningkatnya Cabang Olahraga, Sumber Daya Manusia yang Dibina, dan Prestasi Olahraga	1 Tahun	3.322.503.380	3.121.052.900	93,94	100
	3 Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Pemuda yang Produktif dan Berprestasi	1 Tahun	1.003.697.500	1.002.530.905	99,88	100
	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Rakor Olahraga dan Rakor Pemuda	1 Tahun	96.050.000	85.533.000	89,05	100
JUMLAH				7.752.810.000	7.490.257.032	96,61	100

1.19. URUSAN KEBUDAYAAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			978.924.000	948.401.105	96,88	
	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Internet, listerik dan air		81.489.000	57.703.696	70,81	100
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dapat di operasionalkan		10.000.000	6.664.400	66,64	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penugasan pengelola keuangan dinas yang dapat dikelola		383.446.000	381.946.000	99,61	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peningkatan kebersihan kantor		17.000.000	17.000.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	5 Penyediaan alat tulis kantor	umlah pemenuhan kebutuhan peralatan alat tulis kantor		20.000.000	19.160.820	95,80	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan		10.000.000	9.715.000	97,15	100
	7 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen bangunan kantor		2.500.000	2.500.000	100,00	100
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan permakanan makan dan minum		10.000.000	10.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Prosentase pemenuhan pengamanan kantor, Pengemudi, Parmubhakti dan penjaga malam		60.264.000	60.264.000	100,00	100
	10 Perjalanan dinas	Prosentase terpenuhinya undangan, koordinasi, studi pembelajaran diluar daerah		384.225.000	383.447.189	99,80	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR NEGARA			650.541.500	486.746.000	74,82	100
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional						
	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan perperlengkapan Gedung		100.152.000	19.500.000	19,47	100
	3 Pengadaan Mebeller	Jumlah peningkatan pengadaan mabeleur		77.090.000	76.953.000	99,82	100
	4 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Prosentase pemenuhan peralatan perkantoran		195.670.500	184.335.000	94,21	100
	5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan layak jalan		202.770.000	196.348.000	96,83	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan alat Alat kantor		10.000.000	9.610.000	96,10	100
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan gedung kantor		64.859.000		0,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			36.000.000	35.904.000	99,73	100
	1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya		36.000.000	35.904.000	99,73	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			10.000.000	9.500.000	95,00	100
	Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase pemenuhan bintek kebutuhan Implementasi Perundang undangan		10.000.000	9.500.000	95,00	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			10.000.000	9.995.241	99,95	100
	1 Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra Dinas		5.000.000	4.995.990	99,92	100
	2 Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dinas		5.000.000	4.999.251	99,99	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			99.922.500	86.553.460	86,62	100
	1 Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Data pariwisata dan pengelolaan Media Elektronik		99.922.500	86.553.460	86,62	100
7	PROGRAM PEMBINAAN, PENINGKATAN DAN PELUASAN PENGELOLAAN BUDAYA DAN PARIWISATA			893.100.000	854.984.920	95,73	100
	1 Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni Budaya	4 Kali	893.100.000	854.984.920	95,73	100
		Jumlah Pelatihan Tim Kesenian	14 Kali				
		Jumlah Penyelenggaraan Penyambutan Tamu Kehormatan dan Pisah Sambut Forkompomda	28 kali				
		Jumlah Promosi Seni Budaya ke Luar Daerah	5 Kali				
		Jumlah Peninggalan Budaya yang di Pugar dan di Pelihara.	0%				
JUMLAH				2.678.488.000	2.432.084.726	90,80	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

1.20. URUSAN PERPUSTAKAAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN			1.269.916.500,00	1.233.854.533,00	97,16	
	1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Terselenggaranya kegiatan pengolahan buku dan layanan kunjungan pustaka dan literasi, motivasi, penambahan koleksi	100%	1.039.916.000	1.004.829.033	96,63	97,00
	2 Pembinaan Pengembangan Perpustakaan, Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca	Terselenggaranya pustaka dinamis	1. 5 Kegiatan; 2. 2 Kegiatan; 3. 59 Sekolah; 4. 76 Sekolah; 5. MOU;	230.000.500	229.025.500	99,58	100,00
JUMLAH				1.269.916.500	1.233.854.533	97,16	98,50

1.21. URUSAN KEARSIPAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.071.740.000	1.028.682.308	95,98	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	313.000.000	297.937.108	95,19	100
	2 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	1 Tahun	31.000.000	15.423.800	49,75	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		173.298.000	161.298.000	93,08	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Gedung kantor	72.000.000	72.000.000	100,00	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	15.900.000	15.900.000	100,00	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	1 Tahun	22.860.000	22.860.000	100,00	100
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. 102000 KWH 2. 1320 kubik 3. 1 Paket 4. Rp. 250.000,- 5. 1 Tahun	9.400.000	9.294.000	98,87	100
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	10.000.000	9.980.000	99,80	100
	9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	38 Orang	120.528.000	120.528.000	100,00	100
10	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	40 Kali	303.754.000	303.461.400	99,90	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			935.985.100	910.702.238	97,30	100
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1. 2 Unit	49.800.000	47.922.000	96,23	100
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan	2. 2 Unit 3. 12 Unit	586.032.500	578.955.238	98,79	100
	3 Pemeliharaan berkala kendaraan mobil dinas dan operasional	Terlaksananya perawatan dan perbaikan kerusakan ringan kendaraan dinas	1. 28 Unit 2. 1 Tahun	288.152.600	271.825.000	94,33	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	4 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor		12.000.000	12.000.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			41.500.000	40.450.000	97,47	100
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	92 Stel	1.000.000	950.000	95,00	100
	2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianyapakaian khusus hari-hari tertentu		40.500.000	39.500.000	97,53	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			6.000.000	-		
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam Bimtek	1 Tahun	6.000.000	-		
5	PROGRAM PENGELOLAAN, PENYELAMATAN, PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH			692.138.400	671.547.900	97,03	100
	1 Akuisisi, Pengolahan dan Layanan Kearsipan Kota Jambi	Terselenggaranya pendataan arsip daerah	1. 4 Buku Perwal, 2. 1 Buku, 3. 1.200 Berkas, 4. 1 OPD, 5. 30 Orang,	416.900.000	396.949.700	95,21	100
	2 Pembinaan dan Pengawasan Pengarsipan	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tentang kearsipan	1. 22 PD/Bagian/Kelurahan 2. 19 Ormas/Orpol 3. 20 PD, 4. 10 Ormas dan Perusahaan 5. 60 Orang, 6. 60 Orang, 7. 60 Orang, 8. 60 Orang, 9. 60 Orang.	275.238.400	274.598.200	99,77	100
JUMLAH				2.747.363.500	2.651.382.446	96,51	100

2. URUSAN PILIHAN

2.1. URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBINAAN, PENINGKATAN DAN PELUASAN PENGELOLAAN BUDAYA DAN PARIWISATA			1.492.587.000	1.471.244.200	98,57	
	1 Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Jumlah Even Pariwisata Tahunan	4 kali	551.821.000	542.604.500	98,33	100
		Jumlah Peningkatam Pelayanan TDUP	82 Rekom				
		Pelatihan Pemandu pariwisata	1 Kali				
		Jumlah Pengembangan Kampung Wisata	1 Kelurahan				
		Jumlah Sosialisasi Kampung Wisata /Sadar Wisata	1 Kelurahan				
	2 Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Jumlah Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	3 Kali	940.766.000	928.639.700	98,71	100
		Jumlah Pemilihan Bujang Gadis	1 Kali				
		Jumlah Penampilan Bujang Gadis	19 Kali				
		Jumlah Carnaval Pariwisata unggulan	1 Kali				
JUMLAH				1.492.587.000	1.471.244.200	98,57	100

2.2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU PRODUK DAN DIVERSIFIKASI SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN			3.466.070.000	3.325.424.230	95,94	
	1 Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah peningkatan produksi benih di UPTD BBI	1.400.000 Ekor	216.337.000	216.052.450	99,87	100
	2 Pembinaan dan pengembangan Perikanan	Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	2.437 ton	1.268.227.000	1.257.714.826	99,17	100
	3 Optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan produktivitas hasil perikanan bernilai tambah	2.040 ton	95.600.000	87.285.400	91,30	100
		Peningkatan konsumsi ikan	33,1 kg/kap/th				
	4 Pendamping pada kelompok tani pembudidayaan ikan	Peningkatan produktivitas perikanan perairan umum	0,61 ton	1.885.906.000	1.764.371.554	93,56	100
JUMLAH				3.466.070.000	3.325.424.230	95,94	100

2.3. URUSAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU PRODUK DAN DIVERSIFIKASI SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN			3.144.072.000	2.933.078.300	93,29	
	1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil pertanian	120 Orang	85.200.000	77.441.000	90,89	100
	2 Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan	Jumlah produksi bibit unggul	3000 Batang	310.040.000	307.819.000	99,28	100
	3 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk	37 Kelompok	1.174.174.000	1.053.587.000	89,73	100
	4 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Luasan pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan pengendalian hama terpadu	5 Ton	140.927.000	135.206.450	95,94	100
	5 Penyediaan sarana produksi pertanian	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	5,1 Ton	440.000.000	399.121.500	90,71	100
	6 Pengembangan agribisnis peternakan	Peningkatan mutu dan jumlah ternak sapi melalui IB	60 Eko	170.806.000	165.771.000	97,05	100
	7 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diperiksa	80 sampel	146.064.000	142.285.350	97,41	100
		jumlah pemeriksaan hewan penular rabies	800 ekor				
	8 Pengadan sarana dan prasarana peternakan dan pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan	Optimalisasi pengolahan produk hasil ternak	5.300 kg	127.961.000	124.001.000	96,91	100
		Optimalisasi pelaku usaha peternakan	300 org				
	9 Pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan	Jumlah pemotongan hewan Sapi, Kerbau dan Babi di RPH	5.000 ekor	548.900.000	527.846.000	96,16	100
JUMLAH				3.144.072.000	2.933.078.300	93,29	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

2.4. URUSAN PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	KEUANGAN	FISIK (%)
1	2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KEUANGAN	(%)	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3		4	5	6	7
				2.180.130.500	1.994.897.002	91,50	100
	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase kelancaran pelaksanaan aktivitas kantor	100%	357.000.000	281.236.247	78,78	100
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase tertib pengelolaan administrasi keuangan, barang dan jasa serta aset yang tepat waktu	100%	265.960.000	242.476.300	91,17	100
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase kebersihan dan kerapian lingkungan kantor	100%	96.150.000	77.191.900	80,28	100
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Persentaset terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor	100%	63.667.000	63.617.400	99,92	100
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor	100%	27.567.000	27.565.100	99,99	100
	6 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya kelancaran kerja	100%	9.840.000	9.620.300	97,77	100
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya informasi		2.900.000			
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Persentase terwujudnya kelancaran kerja	100%	25.000.000	21.634.000	86,54	100
	9 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Persentase tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	100%	566.620.000	535.982.400	94,59	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Persentase terwujudnya keamanan, kenyamanan kerja	100%	154.826.500	127.205.500	82,16	100
	11 Perjalanan dinas	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi/konsultasi/pameran/studi banding/kompetisi/bintek/workshop	100%	610.600.000	608.367.855	99,63	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA			1.440.826.560	1.361.994.383	94,53	100
	1 Pembangunan gedung kantor	Persentase kebutuhan bangunan/gedung/ruang kantor	100%	330.000.000	329.488.500	99,85	100
	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor	100%	44.700.000	32.555.260	72,83	100
	3 Pengadaan Mebeller	Persentase ketersediaan mebeleur	100%	50.000.000	49.915.000	99,83	100
	4 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Persentase ketersediaan peralatan kantor	100%	118.546.560	91.787.600	77,43	100
	5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi laik pakai	100%	431.900.000	395.033.800	91,46	100
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	45.680.000	43.535.223	95,30	100
	8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase ruang kerja yang representatif	100%	420.000.000	419.679.000	99,92	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			144.400.000	133.980.000	92,78	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase keseragaman pakaian kerja pegawai	100%	144.400.000	133.980.000	92,78	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			15.000.000	-		
	1 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase SDM aparatur yang mengikuti bintek	100%	15.000.000	-		
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			5.400.000	5.393.850	99,89	100
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase terwujudnya peningkatan kualitas pertanggungjawaban kegiatan	100%	5.400.000	5.393.850	99,89	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			3.600.000	3.541.750	98,38	100
	1 Penyusunan rencana strategis SKPD	Persentase kesesuaian perencanaan strategis OPD dengan RPJMD	100%	2.250.000	2.193.750	97,50	100
	2 Penyusunan rencana kerja SKPD	Persentase kesesuaian perencanaan tahunan OPD dengan renstra OPD dan RPJMD	100%	1.350.000	1.348.000	99,85	100
8	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.			2.392.040.500	2.369.908.250	99,07	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan	150 pelaku usaha	209.320.000	207.924.000	99,33	100
	2 Pelatihan, sosialisasi, seminar, dan penyuluhan perdagangan	Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	135 pelaku usaha	152.000.000	148.760.900	97,87	100
	3 Promosi/Pameran produk Jambi	Persentase sarana dan prasaran perdagangan	11 unit IKM	304.110.500	302.900.700	99,60	100
	4 Sarana dan prasarana industri dan perdagangan	Persentase sarana dan prasaran perdagangan	100%	1.581.927.000	1.566.653.500	99,03	100
		Cakupan Bina IKM	30,39 %				
	5 Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrolagian	Jumlah UTTP yang ditera tera ulang	5729 unit UTTP	144.683.000	143.669.150	99,30	100
9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN PERPASARAN			4.911.533.500	4.231.016.942	86,14	100
	1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Operasional Perpasaran	Realisasi penerimaan retribusi pasar	4,186 M	346.650.000	277.249.750	79,98	100
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Bedug	Jumlah lokasi pasar bedug	2 lokasi	16.225.000	15.775.000	97,23	100
	3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran	Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih	8 unit pasar	3.606.563.500	3.015.217.592	83,60	100
	4 Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL dilingkungan Pasar Daerah.	Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban	8 unit pasar	942.095.000	922.774.600	97,95	100
JUMLAH				11.092.931.060	10.100.732.177	91,06	100

2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.			1.736.048.000	1.645.718.620	94,80	
	1 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan dan pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina	Jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina	35.097.500	34.630.000	98,67	100
	2 Kegiatan Pembinaan, pengembangan dan peningkatan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka kerajinan	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina	26.377.500	24.842.500	94,18	100
	3 Kegiatan Ekspose Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha	Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha	1.465.125.000	1.386.980.800	94,67	100
	4 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan	Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan	66.318.000	66.185.220	99,80	100
	5 Monitoring dan evaluasi industri kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi	Jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi	77.000.000	76.984.600	99,98	100
	6 Peningkatan, Pengembangan SDM industri kecil dan menengah	Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah	Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah	25.000.000	21.030.000	84,12	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	7 Pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah	Pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah	Pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah	25.000.000	19.594.000	78,38	100
	8 Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan	122 pelaku usaha	16.130.000	15.471.500	95,92	100
JUMLAH				1.736.048.000	1.645.718.620	94,80	100

3. URUSAN PENUNJANG

3.1. INSPEKTORAT

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.315.610.000	1.270.569.102	96,58	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan perkantoran		3.000.000	2.982.000	99,40	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan speedy		114.000.000	94.561.168	82,95	100
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan kegiatan dan keuangan		150.980.000	142.743.000	94,54	100
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		83.895.000	74.843.750	89,21	100
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	terlaksananya pengadaan alat tulis kantor		88.575.500	88.409.622	99,81	100
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan		63.749.500	63.536.120	99,67	100
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan alat listrik		5.175.000	5.125.325	99,04	100
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		26.895.000	23.748.600	88,30	100
	9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terlaksananya keamanan gedung kantor		79.200.000	77.494.800	97,85	100
	10 Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		700.140.000	697.124.717	99,57	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			1.274.610.000	1.162.719.338	91,22	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas		705.000.000	705.000.000	100,00	100
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		244.030.000	201.385.750	82,52	100
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan BBM		236.580.000	169.268.788	71,55	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya pembayaran terdistribusi racun api dan service peralatan kantor		34.000.000	33.434.800	98,34	100
	5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan gedung		55.000.000	53.630.000	97,51	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			34.000.000	33.022.000	97,12	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian satpam		34.000.000	33.022.000	97,12	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			186.600.000	132.321.500	70,91	
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	Meningkatnya pengetahuan aparat pengawas		68.100.000	13.821.500	20,30	100
	2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Terlaksananya pengiriman Aparatur yang memenuhi syarat		118.500.000	118.500.000	100,00	100
5	PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN, PEMBINAAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			2.582.480.000	2.449.529.200	94,85	
	1 Pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan internal	Jumlah pengawasan internal secara berkala sesuai PKPT	430 laporan	1.494.600.000	1.480.050.000	99,03	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	25 kasus	240.375.000	237.575.000	98,84	100
	3 Koordinasi pengawasan secara komprehensif	Terselenggaranya rapat pengawasan daerah	1 kali	7.965.000	7.870.500	98,81	100
	4 Evaluasi LAKIP dan Review laporan keuangan pemerintah	Tersedianya laporan hasil evaluasi LKJ dan review LKPD secara tepat waktu	83 laporan	113.750.000	101.050.000	88,84	100
	5 Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya FGD SPIP di OPD	16 laporan	240.225.000	175.515.000	73,06	100
	6	Terselenggaranya kegiatan pengawasan pungli					
	7 Tindaklanjuti hasil temuan pengawasan	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	265 temuan	348.400.000	345.075.000	99,05	100
	8 Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Terlaksananya Evaluasi PMPRB	1 kali	137.165.000	102.393.700	74,65	100
		Terselenggaranya Survey Penilaian Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi					
		Jumlah Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Zona Integritas (ZI) dan Memperoleh Prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)					
JUMLAH				5.393.300.000	5.048.161.140	93,60	100

3.2. PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.884.378.000	1.744.409.461	92,57	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	1 tahun	240.000.000	167.529.454	69,80	100
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan barang/jasa yang tertib dan baik	1 tahun	260.312.000	250.088.000	96,07	100
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	1 tahun	119.000.000	119.000.000	100,00	100
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	110.000.000	110.000.000	100,00	100
	5 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor	1 tahun	50.000.000	50.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagian kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	70.000.000	70.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu serta makanan dan minuman rapat	1 tahun	90.000.000	33.020.000	36,69	100
	8 Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengamanan /penjaga malam kantor	1 orang	15.066.000	15.066.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	9 Perjalanan Dinas	koordinasi, konsultasi dan urusan tugas lainnya	1 tahun	930.000.000	929.706.007	99,97	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas	1 tahun	2.533.040.000	2.427.265.949	95,82	100
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	3 bulan	1.151.500.000	1.151.500.000	100,00	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pelaksanaan mebeleur	100%	231.200.000	208.759.850	90,29	100
	3 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan kantor	1 tahun	520.120.000	510.895.500	98,23	100
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya usia pakai Gedung kantor dan taman kantor	1 tahun	65.000.000	52.138.000	80,21	100
	5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya mobilitas kantor	100%	240.720.000	181.938.599	75,58	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	1 tahun	174.500.000	172.295.000	98,74	100
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai Gedung kantor Bappeda Kota	1 tahun	150.000.000	149.739.000	99,83	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	58.500.000	51.000.000	87,18	100
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman berpakaian dinas	100%	58.500.000	51.000.000	87,18	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai Bappeda Kota	100%	40.000.000	15.842.000	39,61	100
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	100%	40.000.000	15.842.000	39,61	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	1 tahun	265.000.000	264.000.000	99,62	100
	1 Pengembangan data/informasi	Tersedianya aplikasi perencanaan dan website	3 aplikasi dan 1 wbsite	265.000.000	264.000.000	99,62	100
6	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	3.664.663.245	3.346.607.800	91,32	100
	1 Penyusunan Doukumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Tersedianya RKPD, RPJMD dan KUA PPAS	7 Dokumen	1.604.109.245	1.435.746.300	89,50	100
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, laporan pertanggungjawaban walikota (LKPJ), kumpulan pidato	4 Dokumen	413.950.000	387.031.000	93,50	100
	3 Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi pembangunan bidang Ekonomi	- Terlaksananya rakor bidang ekonomi dan SDA - Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA	10 Urusan dan 6 Dokumen	432.653.000	410.797.000	94,95	100
	4 Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan	- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosbud - Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan	6 Urusan dan 4 Dokumen	334.100.000	275.871.000	82,57	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	5 Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi pembangunan manusia dan masyarakat	- Terlaksananya rakor bidang pembangunan manusia dan masyarakat	15 Urusan dan 3 Dokumen	303.462.000	285.528.000	94,09	100
		- Tersusunnya kajian di bidang pembangunan manusia dan masyarakat					
	6 Perencanaan, Koordinasi dan Survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	- Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10 Urusan dan 4 Dokumen	576.389.000	551.634.500	95,71	100
		- Jumlah Kajian/dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah					
JUMLAH				8.445.581.245	7.849.125.210	92,94	100

3.3. KEUANGAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			3.116.763.850	2.641.308.575	84,75	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	3800 surat masuk, 800 surat keluar	6.600.000	1.924.000	29,15	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening Listrik, 1 Jaringan Internet , 1 Jaringan instalasi listrik, 1 sewa webhosting	264.000.000	201.102.495	76,18	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	7 Kendaraan Roda 4, 18 Kendaraan Roda 2	30.000.000	16.243.700	54,15	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	PA,PPK,PPKOM,PPBJ,P PHP, Staf Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pemb Pengurus barang (30 orang)	993.120.000	684.779.200	68,95	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2 petugas kebersihan	46.000.000	45.982.600	99,96	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kertas, Tinta Printer Pena, Buku dan ATK	72.860.000	72.433.470	99,41	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Map, Disposisi, Amplop, Kertas logo Garuda, dll dan Penggandaan	66.717.000	66.662.000	99,92	100
	8 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu, Kabel, Saklar, Stop Kontak, Batre Kering, dll	22.000.000	21.795.800	99,07	100
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman			47.600.000	45.661.550	95,93	100
	10 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kantor	29 orang Tenaga Pendukung	618.030.000	568.891.500	92,05	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	11 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	1 Pengemudi	45.198.000	15.066.000	33,33	100
	12 Perjalanan dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	4 Bidang, 1 Sekretariat	904.638.850	900.766.260	99,57	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR NEGARA			5.195.251.292	5.048.029.019	97,17	100
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit Mobil, 30 Unit Motor, 2 Gerobak Motor	1.670.150.000	1.641.450.000	98,28	100
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kotak Saran, 1 Kotak Pendapat, 2 Kotak P3K, 2 Exhaust fan, 1 Almari Besi, 1 almari, 1 Akses Kontrol Pintu (Kunci dan Kartu RFID), 1 Paket Papan Merek Ruangan, 1 Paket Almari ruang rapat, 1 Paket teralis, 1 Paket Kitchen set, 1 Paket Hordeng	118.361.292	114.004.500	96,32	100
	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	2 AC 2 PK, 3 AC 1 PK, 1 Paket CCTV	39.500.000	39.500.000	100,00	100
	4 Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	25 Kursi Rapat, 2 Meja Rapat, 2 Kursi Kerja Kasubbid	33.500.000	33.241.000	99,23	100
	5 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya Peralatan Kantor	20 Box Plastik, 4 paket Hibah Barang, 1 Pelobang Kertas, 1 Magnetic Whiteboard, 5 Komputer PC, 13 Komputer Notebook, 13 Printer, 3 UPS, 2 Hard Disk Eksternal, 2 Wifi Router, 1 Kulkas, 4 Dispenser, 4 Termos Listrik, 2 Kamera, 3	2.456.000.000	2.386.028.300	97,15	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Gedung, 1 Sewa Kantor	283.680.000	252.500.000	89,01	100
	7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /operasional BPKAD	7 Kendaraan Roda 4, 18 Kendaraan Roda 2	312.060.000	301.690.169	96,68	100
	8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Genset	26.000.000	25.976.550	99,91	100
	9 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	Pemeliharaan, AC, TV, Komputer, Laptop, Printer, dll	50.000.000	48.188.500	96,38	100
	10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Gedung	206.000.000	205.450.000	99,73	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			118.000.000	114.800.000	97,29	
	1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	80 PDH dan 80 Pakaian Olahraga	80 PDH dan 80 Pakaian Olahraga	118.000.000	114.800.000	97,29	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			82.500.000	81.270.100	98,51	
	1 Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	4 Bidang, 1 Sekretariat	82.500.000	81.270.100	98,51	100
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH			2.922.041.150	2.359.437.536	80,75	
	1 Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Laporan Implementasi Peraturan Walikota Analisa Standar Belanja pada SKPD, Laporan Implementasi Peraturan Walikota Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pada SKPD	2 Laporan	81.185.250	48.298.000	59,49	100
	2 Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Keputusan Walikota Tentang Standar harga Barang/jasa	1 Keputusan Walikota	57.727.250	51.054.500	88,44	100
	3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Peraturan Daerah	69.990.000	68.887.000	98,42	100
	4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	135.812.000	104.371.500	76,85	100
	5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Peraturan Daerah	86.490.000	85.952.000	99,38	100
	6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	156.081.500	127.194.350	81,49	100
	7 Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD	Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatusahaan dan pertanggungjawaban APBD, Pemeliharaan Aplikasi Pengelola	Pendampingan 1 Tahun	358.800.000	209.937.050	58,51	100
	8 Monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Daerah	4 Laporan	58.301.750	30.641.100	52,56	100
		2.Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%				
	9 Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	Jumlah Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM OPD, Dokumen register Pengeluaran Keuangan Daerah	5.808 Dokumen SP2D, 40 register SPP, SPM dan SP2D	155.683.000	133.726.100	85,90	100
	10 Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR	Jumlah Penyelesaian Pembebanan kasus TPTGR	20 SK, 20 Surat Pembebanan	107.562.750	103.461.600	96,19	100
	11 Pembinaan administrasi Gaji PNSD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah yang tertib dan akurat	41 Dokumen	115.850.000	112.844.500	97,41	100
	12 Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan Penatusahaan Pengelolaa Keuangan daerah pada OPD, Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD	2 Kali Pembinaan untuk 40 OPD, 2 Dokumen	110.670.000	105.494.750	95,32	100
	13 Kegiatan Pengelolaan Perbendahaaaran dan Kas Umum Daerah	Jumlah Terbitnya berita acara rekonsiliasi, Surat Keputusan dan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran	144 Dokumen Berita Acara Penerimaan, 1008 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 38 SK	68.360.150	68.360.000	100,00	100
		3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 OPD				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	14 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dari Penilai Brang Milik Daerah	2 Jenis Dokumen (Dokumen PM dan GB)	109.578.000	53.869.500	49,16	100
	15 Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi barang Milik Daerah, Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Aset OPD di Lingkup Pemerintah Kota Jambi, Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Aset	38 Berita Acara, 1 Sosialisasi, segera dilaksanakan 38 Berita Acara telah disampaikan 2 Berita Acara belum disampaikan dari awal bulan, 1 kali Pemeliharaan Aplikasi	279.265.000	253.185.900	90,66	100
	16 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Terlaksananya Penertiban Aset yang Tidak Digunakan dan Difungsikan lagi di OPD melalui Peminahatan dan penghapusan BMD	11 OPD (8 OPD yang telah dilelang dan 3 OPD yang telah dihibahkan)	122.910.000	79.997.500	65,09	100
	17 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Terbitnya SK Penetapan Status Barang Milik Daerah di setiap OPD Tahunan, Pemasangan Plang/Papan Batas Tanah Pemerintah Kota, Terbitnya pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	7 OPD Penetapan Status, 25 Papan/Plang, 10 Sertifikat	235.835.000	136.133.420	57,72	100
		4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK					
	18 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda	114.828.500	111.328.500	96,95	100
	19 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperkada	87.170.000	87.154.100	99,98	100
	20 Koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	4 Laporan Triwulan	20.420.000	18.060.750	88,45	100
	21 Penyusunan laporan realisasi penerimaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Jambi	12 Laporan Bulanan	15.700.000	15.668.450	99,80	100
	22 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12	87.589.000	76.716.266	87,59	100
	23 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Aset ke OPD , Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD , 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD, 1 Aplikasi	250.182.000	241.429.200	96,50	100
	24 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Pendapatan dan Belanja ke OPD, LRA, LO SKPD, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 1 Kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 38 LO OPD	36.050.000	35.671.500	98,95	100
JUMLAH				11.434.556.292	10.244.845.230	89,60	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.106.323.000	1.830.006.329	86,88	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	10.000.000	9.513.500	95,14	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96,000 Kwh, 1.440 Kubik, 150 Mbps	510.000.000	320.801.325	62,90	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	246.780.000	235.916.250	95,60	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor , alat dan bahan pembersih	3 Orang	95.000.000	59.995.110	63,15	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	400.000.000	398.134.000	99,53	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	230.035.000	229.373.250	99,71	100
	7 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	30.000.000	29.170.000	97,23	100
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	12 Bulan	11.800.000	10.997.000	93,19	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 Bulan	84.000.000	69.878.425	83,19	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor pengemudi pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengaman, pengemudi, pramubhakti, dan penjaga malam	9 Orang	135.594.000	119.272.500	87,96	100
	11 Perjalanan dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	353.114.000	346.954.969	98,26	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR NEGARA			1.822.598.000	1.576.407.831	86,49	
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	8 Unit	604.000.000	580.500.000	96,11	100
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	25.938.000	19.931.557	76,84	100
	3 Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair	100%	37.000.000	36.850.000	99,59	100
	4 Pengadaan peralatan perkantoran	Terlaksananya Peralatan Kantor	40 Unit	461.960.000	440.909.060	95,44	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	461.700.000	318.660.514	69,02	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	12 Bulan	107.000.000	54.574.700	51,00	100
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	1 Tahun	125.000.000	124.982.000	99,99	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			100.150.000	94.950.000	94,81	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	131 Stell	100.150.000	94.950.000	94,81	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			35.000.000	13.500.000	38,57	100
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparatur dalam Bintek	12 Bulan	35.000.000	13.500.000	38,57	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			199.000.000	87.051.000	43,74	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Kinerja dan Keuangan (LKIP, Tapkin, IKU, LPPD, Laporan Tahunan)	4 Dokumen	33.000.000	14.250.000	43,18	100
	2 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya laporan piutang pajak daerah.	3 Dokumen	41.000.000	37.810.000	92,22	100
	3 Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Kordinasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Pajak Daerah 2018)	9 Kali, 1 Dokumen	125.000.000	34.991.000	27,99	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			10.000.000	10.000.000	100,00	100
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	100,00	100
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			4.195.268.000	3.205.386.800	76,40	100
	1 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi Pajak Daerah, Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	6 Jenis, 3 Dokumen	747.150.000	667.476.300	89,34	100
	2 Pengendalian Pajak Daerah	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban ,Penindakan serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	134.992 WP	578.166.000	530.115.500	91,69	100
	3 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya Pendataan dan penilaian pajak daerah, Jumlah verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak	400 Kali,8000 berkas	1.807.452.000	1.065.967.000	58,98	100
	4 Penagihan pajak daerah	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim, Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	121,838 SPPT PBB, 350 Surat Tagihan	669.000.000	555.083.000	82,97	100
	5 Pengembangan sistem informasi pajak daerah	Penyediaan paket pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah	13 Paket	393.500.000	386.745.000	98,28	100
JUMLAH				8.468.339.000	6.817.301.960	80,50	100

3.4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.632.959.000	1.537.119.160	94,13	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teragendakan dan terdistribusikan	6000 Dok	3.000.000	3.000.000	100,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000 KWH 80 Mbps 2 Rek telp	201.000.000	123.388.503	61,39	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	19 Motor, 7 Mobil	20.000.000	8.704.600	43,52	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani	65 Orang	210.000.000	210.000.000	100,00	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 Orang	95.400.000	92.900.000	97,38	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	42 Jenis	107.031.000	107.031.000	100,00	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	11 bahan	25.000.000	25.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Jenis	6.000.000	6.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	800 Orang	60.000.000	59.897.000	99,83	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengaman kantor	8 Orang	120.528.000	120.528.000	100,00	100
	11 Perjalanan dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	785.000.000	780.670.057	99,45	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			880.142.500	780.775.880	88,71	
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Jenis perlengkapan gedung	33.400.000	28.988.000	86,79	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubelair	9 Jenis meubelair	194.087.500	167.165.000	86,13	100
	3 Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	6 Jenis peralatan perkantoran	132.655.000	117.020.980	88,21	100
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	19 Motor, 7 Mobil	250.000.000	220.038.900	88,02	100
	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 Gedung	50.000.000	49.502.500	99,01	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	71 Unit	60.000.000	38.720.500	64,53	100
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 Gedung	160.000.000	159.340.000	99,59	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			46.000.000	41.600.000	90,43	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	80 Stel	46.000.000	41.600.000	90,43	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000	14.650.000	73,25	
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	15 ASN	20.000.000	14.650.000	73,25	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			3.150.000	3.060.000	97,14	100
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan SKPD	3 Laporan	3.150.000	3.060.000	97,14	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD			6.490.000	6.400.000	98,61	
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	3 Dokumen	3.245.000	3.245.000	100,00	100
	2 Penyusuna renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	3.245.000	3.155.000	97,23	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			316.491.000	300.963.500	95,09	
	1 Pengembangan data/informasi	Terlaksananya data ASN yang lengkap dan akurat	70%	316.491.000	300.963.500	95,09	100
		Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan data/informasi	38 OPD				
		Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian online	5 Aplikasi/				
			1Aplikasi				
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan dan rakor kepegawaian	3 Kali				
		Terlaksananya penataan arsip kepegawaian	40%				
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			4.963.584.000	3.409.329.284	68,69	
	1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi jabatan	2 Dokumen	643.000.000	325.960.584	50,69	100
		Terpenuhinya kebutuhan jabatan administrasi sesuai dengan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi	1 Dokumen				
	2 Seleksi penerimaan CPNS	Penyusunan formasi dan seleksi penerimaan CPNS	250 Orang	54.250.000	23.573.500	43,45	100
	3 Pelayanna dan pembinaan CPNS, PNS, da tenaga kontrak	Persentase administrasi pangkat PNS selesai tepat waktu	87%	100.760.000	100.760.000	100,00	100
		Persentase ASN yang memperoleh SK kenaikan gaji berkala tepat waktu	100%				
		Persentase administrasi pensiun PNS selesai tepat waktu	87%				
	4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran sisiplin PNS dan pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan masa keerja pegawai serta pemantauan evaluasi SKP	Terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran disiplin	78%	170.000.000	155.420.100	91,42	100
		Terlaksananya penegakan atas pelanggaran kode etik/perilaku ASN	4 Dokumen				
		Terlaksananya penyampaian laporan kinerja ASN	80%				
		Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya	240 Orang				
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pembinaan disiplin ASN	40 Dokumen				
	5 Pembinaan korpri dan kesejahteraan pegawai	Jumlah ASN Kota Jambi yang menjadi duta atlit korpri	51 Orang	200.000.000	196.000.000	98,00	100
		Jumlah ASN yang diambil sumpah/janji PNS	160 Orang				
		Jumlah ASN yang konseling	20 Orang				
		Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan mental	200 Orang				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Jumlah ASN yang mengikuti workshop pembekalan ASN yang akan memasuki usia pensiun	40 Orang				
	6 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	29%	250.000.000	183.903.500	73,56	100
	7 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	60%	3.545.574.000	2.423.711.600	68,36	100
		Persentase CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan	100%				
JUMLAH				7.868.816.500	6.093.897.824	77,44	100

4. URUSAN PENDUKUNG

4.1. SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN UMUM

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	7.536.226.500	6.528.893.556	86,63	
	1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya belanja perangko KDH, WKDH dan Setda Kota Jambi	1 Tahun	21.100.000	12.004.000	56,89	100
		Terlaksananya pengiriman paket KDH, WKDH dan Setda	5 Kali				
	2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran listrik	1 Tahun	2.330.000.000	2.256.559.978	96,85	100
		Terlaksananya pembayaran rekening air gedung Setda, rumah dinas KDH, WKDH, Sekda	1 Tahun				
		Terlaksananya pembayaran kartu telepon (kartu prabayar)	1 Tahun				
		Terlaksananya pembayaran speedy rumah dinas KDH, WKDH dan kantor Sekretariat Daerah	1 Tahun				
	3 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna keperluan operasional Setda Kota Jambi	1 Tahun	535.000.000	502.584.951	93,94	100
	4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan untuk menghasilkan rasa nyaman dan bersih	1 Tahun	943.120.000	926.286.950	98,22	100
	5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Sekretariat Daerah	11 Bagian	110.000.000	109.536.950	99,58	100
	6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Daerah Kota Jambi	1 Tahun	150.000.000	149.590.700	99,73	100
	7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik elektronik keperluan kantor Setda Kota Jambi, Rumah Dinas KDH, WKDH dan Sekda	1 Tahun	252.500.000	252.467.000	99,99	100
	8 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya kebutuhan makan minum tamu dan rapat Pemerintah Kota Jambi	1 Tahun	2.822.312.000	1.970.874.127	69,83	100
	9 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Tersedianya pembayaran gaji tenaga pendukung administrasi perkantoran	3 Orang	66.800.000	45.172.250	67,62	100
	10 Kegiatan Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Terpenuhinya pemenuhan tenaga pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	17 Orang	305.394.500	303.816.650	99,48	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor walikota, rumah dinas KDH, WKDH serta Sekda, kepelruan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	100%	7.173.732.400	6.512.031.912	90,78	
	1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terciptanya kelancaran bertransportasi dalam melaksanakan tugas kedinasan	2 Unit	895.000.000	875.218.000	97,79	100
	2 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 Lokasi	639.100.000	528.502.530	82,69	100
		Terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga	3 Lokasi				
		Terlaksananya pembelian pengadaan karpet	1 Paket				
	3 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pembelian lemari arsip	2 Unit	300.514.000	284.782.400	94,77	100
		Terlaksananya pembelian tenda samafil	11 Unit				
	4 Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Meningkatnya kebutuhan peralatan rumah dinas KDH, WKDH dan Sekda	12 Unit	444.380.000	443.984.000	99,91	100
	5 Kegiatan Pengadaan mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	358.420.000	355.860.000	99,29	100
	6 Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan kebutuhan aparatur Setda Kota Jambi dalam menunjang tugas kedinasan	1 Tahun	274.024.400	268.437.214	97,96	100
	7 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah jabatan	3 Lokasi	230.000.000	113.153.925	49,20	100
	8 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung Sekretariat (Rehab kecil, bocor, dll)	5 Unit	240.000.000	219.167.699	91,32	100
		Terlaksananya servis peralatan di Putro retno (Service AC)	2 Unit				
		Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan gedung Putro Retno	72 Jenis				
	9 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya premi asuransi untuk mobil dinas KDH dan WKDH	1 Tahun	192.900.000	165.568.116	85,83	100
		Terlaksananya pergantian suku cadang kendaraan KDH dan WKDH	1 Tahun				
		Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan KDH dan WKDH	1 Tahun				
		Terlaksananya belanja acesoris kendaraan KDH dan WKDH	1 Tahun				
		Terlaksananya pembayaran BBM KDH dan WKDH	1 Tahun				
	10 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional se-sekretariat	1 Tahun	1.971.594.000	1.779.296.647	90,25	100
		Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas operasional Setda Kota Jambi	1 Tahun				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terlaksananya pembelian acesoris dan perlengkapan kendaraan dinas operasional	1 Tahun				
		Terlaksananya service kendaraan Setda operasional	1 Tahun				
	11 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pembelian BBM genset untuk rumah dinas KDH, WKDH, Sekda dan kantor Walikota	1 Tahun	52.800.000	52.800.000	100,00	100
	12 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya service peralatan di rumah jabatan	2 Lokasi	267.000.000	192.754.724	72,19	100
	13 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan secara berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	258.000.000	183.505.657	71,13	100
	14 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehab pintu, jendela, dek, atap, aula/mushola	1 Tahun	950.000.000	949.113.000	99,91	100
	15 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ruang kerja dan WC Ruang Pola	1 Paket	100.000.000	99.888.000	99,89	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur Sekretariat Daerah	100%	212.040.000	203.361.066	95,91	
	1 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pembelian pakaian dinas KDH WKDH	8 Stell	196.800.000	188.121.066	95,59	100
		Terlaksananya Pembelian pakaian dinas (PSH) Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	9 Stell				
		Terlaksananya Pembelian pakaian dinas, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	9 Stell				
		Terlaksananya pembelian pakaian dinas pegawai di Lingkungan Setda Kota Jambi	250 Stell				
	2 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya sarana pendukung kerja sumber daya aparatur	6 Orang	15.240.000	15.240.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN, SETDA DAN KERUMAHTANGGAAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan kesehatan dan perlengkapan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.597.950.000	1.439.434.602	90,08	
	1 Kegiatan belanja pemeliharaan kesehatan	Terciptanya tertib pendataan dan penataan dokumen/arsip KDH, WKDH, Sekda dan Bagian Umum Setda	1 Tahun	25.000.000	7.004.990	28,02	100
	2 Kegiatan Rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terpenuhinya kebutuhan kesehatan KDH dan WKDH	1 Tahun	1.296.000.000	1.162.029.612	89,66	100
	3 Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH sehari-hari	1 Tahun	276.950.000	270.400.000	97,63	100
5.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKDA, APARATUR DAN KEPROTOKOLAN	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	48.200.000	-		
		Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/ rekomendasi				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Kegiatan pemberdayaan kapasitas staf ahli walikota	Jumlah rapat koordinasi lurah, camat, kepala OPD	1 Kali	48.200.000	-		
		Jumlah seminar stah ahli walikota	1 Kali				
		Jumlah FGD yang dilaksanakan	1 Kali				
JUMLAH				16.568.148.900	14.683.721.136	88,63	100

BAGIAN ORGANISASI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas SDM yang berkualitas	71%	259.000.000	254.321.343	98,19	
	1 Kegiatan Bimbingan teknis impementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	18 Orang	259.000.000	254.321.343	98,19	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peringkat penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat 45	164.000.000	126.300.750	77,01	
		Rasio meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks B				
		Terciptanya penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota	25%				
	1 Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Dokumen LKJ Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018	1 Dokumen	164.000.000	126.300.750	77,01	100
		Sosialisasi SAKIP	1 Kali				
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase monitoring tindaklanjut pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	58%	524.380.000	509.445.897	97,15	
	1 Kegiatan Penataan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah	Terlaksananya fasilitasi penerapan SP dan SOP	1 Tahun	338.880.000	338.638.700	99,93	100
	2 Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Terlaksananya survey IKM	1 Tahun	185.500.000	170.807.197	92,08	100
4	PROGRAM TATA KELOLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kinerja kelambagaan pengadaan	16,00%	352.620.000	253.633.350	71,93	100
	1 Kegiatan Roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah	Rapat koordinasi evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Jambi	1 Kali	92.000.000	77.894.750	84,67	100
	2 Kegiatan Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tersusunnya laporan AD-PPK dan laporan data wajib LHKPN	1 Tahun	60.000.000	40.651.600	67,75	100
	3 Kegiatan Penataan kelembagaan perangkat daerah	Terbayarnya kontribusi/ iuran Forsesdasi	1 Kali	55.620.000	42.695.000	76,76	100
		Tersedianya buku Peraturan	150 Buku				
	4 Kegiatan Penataan instrumen analisis jabatan PNS	Tersedianya aplikasi Anjab	3 Aplikasi	145.000.000	92.392.000	63,72	100
		Terlaksananya workshop pemutakhiran Anjab	1 Kali				
JUMLAH				1.300.000.000	1.143.701.340	87,98	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

BAGIAN PEMERINTAHAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peringkat penyelenggaraan pemerintah daerah	Peringkat 45	268.540.000	217.282.000	80,91	
		Rasio meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks B				
		Terciptanya penyusunan laporan keuangan seretariat daerah Kota	25%				
	1 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya penyusunan buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2018	120 Buku	268.540.000	217.282.000	80,91	100
		Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2019 terhadap buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2018					
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN DAN	Ketetapan waktu penyampaian LPPD	48%	10.578.300.000	10.431.687.017	98,61	
		Persentase ketersediaan lahan tanah untuk pelayanan masyarakat	13%				
		Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	3 Kecamatan				
	1 kegiatan penilaian aparatur teladan/berprestasi	penilaian aparatur teladan/berprestasi dalam Kota Jambi tahun 2019	11 kecamatan dalam Kota Jambi	175.000.000	159.891.000	91,37	100
	2 kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan	1 rakor camat dan lurah Se-Kota Jambi	2 semester rakor camat dan lurah	617.300.000	562.157.400	91,07	100
		2 pembinaan dan monitoring administrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan	11 kecamatan dan 62 kelurahan dalam Kota Jambi				
	3 kegiatan pelayanan terpadu administrasi kecamatan	monitoring evaluasi PATEN, optimalisasi PATEN	11 kecamatan dalam Kota Jambi	120.000.000	85.050.637	70,88	100
	4 Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian	penataan batas wilayah administrasi	30 Titik	9.666.000.000	9.624.587.980	99,57	100
		pengadaan tanah	10 Hektar				
		Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2019 terhadap buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2018	20 penamaan unsur rupa bumi				
		Penyelesaian sengketa tanah	10 Persil				
JUMLAH				10.846.840.000	10.648.969.017	98,18	100

BAGIAN PROTOKOL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	KEUANGA	FISIK (%)
----	--------------------	-----------------	---------	-----------	---------	-----------

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKDA,	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	5.385.000.000	5.139.752.619	95,45	
		Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintahan daerah	1 Telaah/ Rekomendasi				
	1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan keprotokolan kepala daerah yang optimal	100%	380.000.000	317.087.040	83,44	100
	2 Kunjungan Kerja Inspkasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi perjalanan dinas kepala daerah	100%	5.005.000.000	4.822.665.579	96,36	100
JUMLAH				5.385.000.000	5.139.752.619	95,45	100

BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM TATA KELOLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kinerja kelembagaan pengadaan	19,13%	2.297.450.000	2.194.513.100	95,52	
		Persentase tertib administrasi pembangunan	70%				
	1 Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya pemantauan/ pengendalian fisik program pembangunan	1 Tahun	200.000.000	184.943.750	92,47	100
		Terlaksananya workshop pengadaan barang/jasa pemerintah	2 Kali				
		Terlaksananya penyusunan standar LPSE dan pelatihan	4 Standar dari 11				
		Rehab ruang dan instalasi LPSE	1 Paket				
	2 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Tersediannya data monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan SKPD	1 Tahun	145.000.000	140.245.000	96,72	100
		Terlaksananya konsolidasi input SIMEP	40 SKPD				
	3 Pengelola Administrasi Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	1.952.450.000	1.869.324.350	95,74	100
		Terlaksananya update data TEPR	MOU, Pelatihan survey, data dan FGD				
		Terlaksananya update data SIPJAKI dan penyusunan regulasi jasa konstruksi	1 Kali				
		Terlaksananya verifikasi SIKAP	125 Orang				
		Terlaksananya e-catalog daerah	1 Dokumen				
		Terlaksananya survellen penilaian ISO 9001;2015	40 SKPD				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terlaksananya pembinaan administrasi pembinaan SKPD	5 Kali				
		Penyusunan revisi perubahan Perwal Kota Jambi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Kota Jambi	22 Indikator				
		Koordinasi pemaketan dan perencanaan pengadaan barang/jasa					
		Sosialisasi/desiminasi informasi peraturan terkait pengadaan barang/jasa					
		Penilaian/Self Assesment kelembagaan ULP					
JUMLAH				2.297.450.000	2.194.513.100	95,52	100

BAGIAN KEUANGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi perkantoran ssuai dengan ketentuan	100%	5.193.990.000	5.007.232.235	96,40	
	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1.290.800.000	1.105.176.000	85,62	100
	2 Kegiatan Perjalanan dinas	Tertersedianya perjalanan dinas	1 Tahun	3.903.190.000	3.902.056.235	99,97	100
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peringkat penyelenggaraan pemerintah daerah	Peringkat 45	756.010.000	565.216.037	74,76	100
		Rasio meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks B				
		Terciptanya penyusunan laporan keuangan seretariat daerah Kota	25%				
	1 Penyusunan laporan keuangan sekretariat Kota Jambi	Tersedianya penyusunan RPA/DPA/ DPPA, Laporan keuangan dan pembinaan penata usahaan keuangan	120 Buku	756.010.000	565.216.037	74,76	100
JUMLAH				5.950.000.000	5.572.448.272	93,65	100

BAGIAN HUMAS

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM OPTIMALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Tercapainya penyebaran informasi pembangunan daerah	71,43%	8.604.234.000	8.596.027.785	99,90	
	1 Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tertersedianya publikasi media cetak	1000 Kali Terbit	7.365.000.000	7.359.333.785	99,92	100
		Tertersedianya publikasi media elektronik	1000 Kali Terbit				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terlaksananya publikasi media luar ruang	1 Paket				
		Cetak foto kepala daerah	1 Paket				
		Tersedianya peralatan pendukung kerja (komputer/PC)	2 Unit				
		Tersedianya kamera	1 Unit				
		Tersedianya Handycam	1 Unit				
		Tersedianya perlengkapan kamera dan studio	1 Unit				
		Tersedianya perlengkapan kerja (komputer notebook)	2 Unit				
		Tersedianya perlengkapan kerja (printer)	1 Unit				
		Tersedianya perlengkapan komputer (hardisk eksternal)	5 Unit				
	2 Pengembangan data dan informasi komunikasi sosial	Tersedianya surat kabar/majalah	16 Media massa Kota Jambi	1.239.234.000	1.236.694.000	99,80	100
		Tersedianya majalah Kota Jambi	1000 Buku MKJ				
		Tersedianya kalender	3750 Kalender				
JUMLAH				8.604.234.000	8.596.027.785	99,90	100

BAGIAN PEREKONOMIAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	Monitoring tindak lanjut pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	75%	799.850.000	678.048.130	84,77	
	1 Kegiatan pemantauan dan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, CSR dan BUD	Terlaksananya inventarisasi data pelaku usaha yang berkontribusi dalam program CSR	5 Pelaku Usaha	250.000.000	166.969.330	66,79	100
		Terlaksananya sosialisasi CSR	1 Kali				
		Terlaksananya seleksi pengangkatan kembali dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta	1 Kali				
	2 Kegiatan pembinaan pemantauan penyelenggaraan kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat	Terlaksananya rapat koordinasi forum pengembang an ekonomi daerah	2 Kali	250.000.000	223.889.460	89,56	100
		Terlaksananya rapat fasilitasi dan koordinasi di bidang perekonomian antar instansi di lingkup Pemerintah Kota Jambi	2 Kali				
		Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	2 kali				
		Terlaksananya koordinasi dan pembinaan penyaluran kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat	2 Kali				
	3 Pengendalian produksi dan distribusi	Terlaksananya rakor prekonomian	1 Tahun	299.850.000	287.189.340	95,78	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terlaksananya pengendalian pelaku barang bersubsidi					
		Terlaksananya penyuluhan ketahanan energi					
JUMLAH				799.850.000	678.048.130	84,77	100

BAGIAN KERJASAMA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH	Persentase fasilitas kerja sama luar negeri	100%	725.000.000	641.360.900	88,46	
		Persentase kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti	66,67%				
		Persentase fasilitas kerja sama pemerintah daerah	100%				
	1 Fasilitas dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	Terselenggaraya fasilitas kerjasama luar negeri	2 fasilitas kerja sama luar negeri	212.700.000	170.444.500	80,13	100
	2 Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	Tersedianya pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	1 dokumen	242.560.000	220.815.100	91,04	100
	3 Fasilitas dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri	Terselenggaranya kerjasamanya dalam negeri	2 fasilitas kerja sama dalam negeri	269.740.000	250.101.300	92,72	100
JUMLAH				725.000.000	641.360.900	88,46	100

BAGIAN HUKUM DAN PER-UU

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Program Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintahan daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan	20%	1.296.600.000	1.212.945.800	93,55	
		Persentase penyelesaian perkara	100%				
	1 Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah pertimbangan hukum	20 Pertimbangan Hukum	730.400.000	681.140.400	93,26	100
		Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	9 Kali				
		Jumlah tersusunnya laporan RANHAM	4 Laporan				
		Jumlah Pelaksanaan FGD	4 Kali				
		Jumlah pelaksanaan lomba kadarkum tingkat Provinsi	1 Kali				
		Jumlah Penyelesaian perkara	2 Perkara				
	2 Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyusunan Perda	7 Perda	204.200.000	194.340.400	95,17	100
		Jumlah penyusunan Perwal	10 Perwal				
		Jumlah penelitian dan pengoreksian SK Walikota	200 SK				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pengelolaan JDIH	Berita daerah dan lembaran daerah	362.000.000	337.465.000	93,22	100
		Jumlah sosialisasi produk hukum	16 Kali				
		Jumlah pengolahan arsip bagian hukum	Sesuai Kebutuhan				
		Jumlah publikasi produk hukum	4 Kali				
		Jumlah pendokumentasian SK Walikota	430 SK				
JUMLAH				1.296.600.000	1.212.945.800	93,55	100

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI ORGANISASI DAN KEGIATAN KEAGAMAAN	Persentase tindakanlanjutan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	9.041.613.750	8.702.331.950	96,25	
	1 Kegiatan peningkatan peran serta dan kualitas umat beragama	Terlaksananya TC Kafilah MTQ untuk Provinsi Jambi	6 Kali	8.641.613.750	8.335.824.450	96,46	100
		Terlaksananya MTQ Kota Jambi	1 Kali				
		Meningkatnya kepesertaan pada MTQ tingkat Provinsi Jambi	1 Kali				
		Terlaksananya FASI tingkat Kota maupun Provinsi Jambi	1 Kali				
		Terlaksananya Kegiatan Keagamaan (PHBI) Kota Jambi	5 Kali				
		Terlaksananya Pengiriman TPHDTKHD Kota Jambi	3 Orang				
		Terlaksananya Pengajuan Rutin di Rumah Dinas Walikota dan Wakil	22 Kali				
		Terlaksananya Festival Muharam Kota Jambi	1 Kali				
		Terlaksananya pemberian Insentif Petugas Syara', Popes, Diniyah Takmiliah dan Tenaga Pengajar Pengajian Keagamaan (TPPK) Kota	396 Petugas syar', 900 guru ponpes, 55 orang TPPK				
		Terlaksananya pelatihan guru PAMI	200 orang x 3 kali kegiatan				
		Terlaksananya Safari Ramadhan	11 Kali				
	2 Kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan aparatur	Terlaksananya Rakor Kesejahteraan	1 Kali	200.000.000	190.395.000	95,20	100
		Penilaian LSS	1 Kali				
		Terlaksananya Rakor Kepemudaan dalam Kota Jambi	1 Kali				
	3 Peran fungsi pemuda dan masyarakat	Terlaksananya Rakor Kepemudaan dalam Kota Jambi	1 Kali	200.000.000	176.112.500	88,06	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Kepemudaan	2 Kali				
		Terlaksananya Rakor Narkoba, HIV &	1 Kali				
		Terlaksananya senam kesegaran jasmani Setda Kota Jambi	1 Kali				
JUMLAH				9.041.613.750	8.702.331.950	96,25	100
JUMLAH TOTAL SEKRETARIAT DAERAH				62.814.736.650	59.213.820.049	94,27	100

4.2. SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			7.036.611.000	6.300.287.298	89,54	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Penyediaan Air, Listrik, Telpo	1. Belanja Telepon 9 Nomor Tagihan 2. Belanja Air 3 Rekening 3. Belanja Listrik 4 Rekening 4. Belanja Internet 12 Bulan	939.000.000	645.457.349	68,74	100
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan kantor	33 Buah Papan Ucapan	25.000.000	20.196.000	80,78	100
	3 Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya penyediaan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	1. 15 Premi Asuransi Kendaraan 2. Pajak Kendaraan Roda Empat 11 Unit 3. Pajak Kendaraan Roda Dua 30 Unit	183.000.000	97.914.759	53,51	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan SKPD	1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 Orang 2. Tim Pengelola Barang Milik Daerah 4 Orang 3. Tim Pengelola Keuangan 20 Orang 4. Pembantu Operator SIPKD SKPD 8 Orang 5. Pembantu Admin Administrasi	358.872.000	304.201.000	84,77	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	1. Peralatan dan Bahan-Bahan Kebersihan 1 Tahun 2. BBM 165 Liter dan Oli 10 Kaleng 3. Jasa Laundry 1 Tahun 4. Pakaian Kerja CS 22 Stel 5. Jasa Tenaga Kebersihan 22 Orang	536.275.000	518.056.590	96,60	100
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1. Alat Tulis Kantor 1 Tahun	195.000.000	194.836.015	99,92	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Peggandaan	1. Belanja Cetak Kalender 400 Budah, Agenda 100 Buah 2. Belanja Penggadaan 1 Tahun 3. Belanja Cinderamata Plakat 150 Buah	370.000.000	367.413.550	99,30	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	OutTerpenuhinya Bahan Suku Cadang Peralatan Listrik	1. Komponen Peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1	50.000.000	49.995.550	99,99	100
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. 106.920 Eksemplar	350.000.000	336.180.000	96,05	100
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat	1. Minum Harian Pegawai 1 Tahun 2. Makan Minum Rapat 120 Kali	350.000.000	126.800.300	36,23	100
	11 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Terwujudnya Tenaga Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	1. Premi Asuransi 23 Orang 2. Jasa Pengaman Kantor 23 Orang 3. Jasa Tenaga Sopir 4 Orang	637.464.000	637.464.000	100,00	100
	12 Perjalanan dinas	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi/konsultasi dan pendampingan kegiatan Anggota DPRD berjalan dengan baik	1. Dalam Daerah 4 Kali 2. Konsultasi/Koordinasi 35 Kali 3. Mendampingi Kegiatan Dewan 35 Kali	3.042.000.000	3.001.772.185	98,68	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			6.779.709.500	6.211.936.178	91,63	100
	1 Pengadaan mobil jabatan	Terpenuhinya mobil jabatan	1. 4 Unit	2.276.600.000	2.208.000.000	96,99	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1. Papan Nama Jabatan 17 Unit 2. Umbul-umbul 1 Paket 3. Papan AKD 8 Unit 4. Papan DUK 1 Unit 5. Papan Struktur Fraksi 10 Unit 6. Papan Visi Misi 1 Unit 7. Papan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 1 Unit	280.500.000	274.348.000	97,81	100
	3 Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur Kantor	1. Papan Nama 1 Paket 2. Meja Rapat 1 Paket 3. Kursi Rapat Paripurna 150 Unit	957.298.000	774.684.009	80,92	100
	4 Pengadaan peralatan perkantoran	Terpenuhinya Peralatan Kantor	1. AC Standing 4 Unit 2. Laptop 9 Unit 3. Komputer 13 Unit 4. Printer 12 Unit 5. UPS 14 Unit 6. Memory Eksternal 1 Unit 7. Kamera 2 Unit 8. Proyektor/Infocus 6 Unit 9. Voice Recorder 3 Unit	869.300.000	844.931.760	97,20	100
	5 Pembangunan Tempat Parkir	Terpenuhinya bangunan tempat parkir	1. Tempat Parkir 1 Paket	170.000.000	169.888.000	99,93	100
	6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1. Premi Asuransi 2 Premi 2. Pemeliharaan Gedung	532.287.500	492.853.883	92,59	100
	7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat	1. Premi Asuransi Kendaraan 4 Unit 2. Perawatan Kendaraan 4 Unit	321.800.000	257.583.343	80,04	100
	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	1. Suku Cadang Kendaraan 13 Unit 2. BBM Roda Empat 13 Unit Roda Dua 30 Unit	509.600.000	375.051.333	73,60	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1. BBM Genset 1 Tahun 2. Pengisian Tabung Damkar 3 Paket 3. Retribusi PPR APK 1 Tahun 4. Pemeliharaan 7 Kegiatan 5. Pengadaan Tabung Gas 2 Tabung 6. Pengisian Tabung Gas 48 Kali	251.324.000	219.623.850	87,39	100
	10 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja	1. Pemeliharaan Laptop dan Printer 1 Tahun 2. Pemeliharaan Backdrop 1 Tahun	135.000.000	132.467.500	98,12	100
	11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Rehab Aula, Pos Jaga dan Ruang Komisi	Rehab Sedang/Berat 4 Paket	476.000.000	462.504.500	97,16	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			130.400.000	93.133.150	71,42	100
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan ID Card Pegawai Sekretariat DPRD Kota Jambi	1. PDH 135 Stel 2. ID Card 163 Stel	130.400.000	93.133.150	71,42	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			74.000.000	28.000.000	37,84	100
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pegawai	1. Iuran ASDEKSI 1 Tahun	74.000.000	28.000.000	37,84	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			100.000.000	98.840.000	98,84	100
	1 Pengembangan data/informasi	Aplikasi SIGAP	Aplikasi	100.000.000	98.840.000	98,84	100
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS LEMBAGA PERWAKILAM RAKYAT DAERAH			34.175.647.000	25.517.228.251	74,66	100
	1 Pembahasan rancangan peraturan daerah	Peraturan Daerah	1. 17 Ranperda 2. Perjalanan Dinas 9 Kali 3. NA 2 Paket 4. Bantuan Hukum 1 Perkara 5. Jasa Kerja Petugas Administrasi 16 Orang	4.458.655.000	2.668.710.487	59,85	100
	2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya Kegiatan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kota Jambi	1. Rapat Banggar 75 Kali 2. Perjalanan Dinas 13 Kali 3. Jasa Kerja Petugas Administrasi 18 Orang	6.465.940.000	4.159.687.228	64,33	100
	3 Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	1. Rapat Paripurna 5 kali dan Banmus 30 Kali 2. Perjalanan Dinas 6 Kali 3. Jasa Kerja Petugas Administrasi 19 Orang	3.653.000.000	2.601.701.152	71,22	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	4 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Perjalanan Dinas 30 Kali 2. Kegiatan Orientasi 1 Kali 3. Jasa Kerja Petugas Administrasi 42 Orang	17.279.712.000	14.295.035.074	82,73	100
	5 Reses dan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Reses dan Turun Lapangan Anggota DPRD	1. Reses 2 Kali 2. Turun Lapangan 19	1.310.000.000	880.444.310	67,21	100
	6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda, Produk Hukum Baru dan Kegiatan DPRD	1. Informasi Kegiatan Dewan 1 Tahun 2. Cetak Buku 100 Buku	1.008.340.000	911.650.000	90,41	100
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DPRD			1.725.980.500	1.274.301.600	73,83	100
	1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Luar negara/ Lembaga Pemerintah/Non Lembaga Pemerintah	Terlaksananya Penerimaan Tamu Kunjungan	1. Tamu Kunjungan 39 Kali 2. Jasa Kerja Petugas Administrasi 15 Orang	557.330.500	273.066.500	49,00	100
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Kelengkapannya	1. PSH 89 Stel 2. PDH 89 Stel 3. PSL 45 Stel 4. PSR 89 Stel 5. Pakaian Adat 45 Stel	1.168.650.000	1.001.235.100	85,67	100
JUMLAH				50.022.348.000	39.523.726.477	79,01	100

5. URUSAN KEWILAYAHAN

5.1. KECAMATAN

5.1.1. KECAMATAN ALAM BARAJO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	51,95%	952.600.000	941.291.027	98,81	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	6,60%	126.000.000	119.505.506	94,85	100
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	0,24%	8.500.000	4.320.700	50,83	100
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan tim pengadaan	17,06%	309.100.000	309.050.000	99,98	100
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1,93%	35.000.000	35.000.000	100,00	100
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	4,42%	80.000.000	80.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	2,10%	38.000.000	38.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	0,55%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai kecamatan	0,17%	3.000.000	3.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	2,65%	48.000.000	47.959.500	99,92	100
	10 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	8,28%	150.000.000	150.000.000	100,00	100
	11 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	7,97%	145.000.000	144.455.321	99,62	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	26%	472.850.000	470.250.700	99,45	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	4,97%	90.000.000	89.965.000	99,96	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	4,96%	90.000.000	89.800.000	99,78	100
	3 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	8,17%	149.050.000	147.948.700	99,26	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	6,49%	118.800.000	117.547.000	98,95	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	0,39%	7.000.000	7.000.000	100,00	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	0,99%	18.000.000	17.990.000	99,94	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawaiPresentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	2,04%	36.900.000	36.900.000	100,00	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	2,04%	36.900.000	36.900.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0,66%	15.000.000	12.000.000	80,00	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	0,66%	15.000.000	12.000.000	80,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0,17%	3.000.000	3.000.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	0,17%	3.000.000	3.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0,33%	6.000.000	6.000.000	100,00	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD	100%	3.000.000	3.000.000	100,00	100
	2 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD	100%	3.000.000	3.000.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2,26%	40.950.000	40.925.000	99,94	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	2,26%	40.950.000	40.925.000	99,94	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	19,96%	6.926.102.000	6.722.315.630	97,06	
	1 Kegiatan Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	2,97%	1.000.000.000	999.849.280	99,98	100
	2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6,56%	2.226.412.000	2.208.137.000	99,18	100
	3 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	0,22%	75.000.000	75.000.000	100,00	100
	4 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	5,09%	1.774.000.000	1.715.942.735	96,73	100
	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	0,77%	267.951.000	259.716.920	96,93	100
	6 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kenali Besar	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	0,25%	102.187.000	83.766.000	81,97	100
	7 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Rawasari	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	0,75%	253.105.750	252.586.680	99,79	100
	8 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rawasari	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	0,34%	117.032.250	114.475.460	97,82	100
	9 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mayang Mangurai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	0,80%	268.756.750	268.602.860	99,94	100
	10 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mayang Mangurai	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	0,29%	101.381.250	97.316.595	95,99	100
	11 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bagan Pete	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	0,80%	283.048.000	268.980.450	95,03	100
	12 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bagan Pete	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	0,26%	87.090.000	87.090.000	100,00	100
	13 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beliung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	0,68%	237.672.000	230.635.150	97,04	100
	14 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Beliung	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	0,18%	132.466.000	60.216.500	45,46	100
JUMLAH				8.453.402.000	8.232.682.357	97,39	100

5.1.2. KECAMATAN KOTA BARU

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	97,31	1.037.591.500	1.009.682.082	97,31	
	1 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	12	8.000.000	3.152.800	39,41	100
	2 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	46	312.720.000	309.612.000	99,01	100
	3 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	6	67.071.000	67.071.000	100,00	100
	4 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100	82.700.000	82.700.000	100,00	100
	5 Kegiatan penyediaan barang cetakan/penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	100	13.500.000	13.500.000	100,00	100
	6 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	12	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	7 Kegiatan penyediaan makanan/minuman	Terlaksananya pelayanan rapat dan koordinasi rutin	12	44.250.000	44.250.000	100,00	100
	8 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	24	186.780.000	186.780.000	100,00	100
	9 Kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	2	19.200.000	19.200.000	100,00	100
	10 Kegiatan perjalanan dinas	Meningkatnya kualitas SDM	12	160.000.000	159.915.981	99,95	100
	11 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan dan jumlah rekening telepon, air dan listrik	12	138.370.500	118.500.301	85,64	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,73	334.100.000	319.834.055	95,73	
	1 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12	89.700.000	89.674.000	99,97	100
	2 Kegiatan pengadaan peralatan perkantoran	Jumlah jenis pengadaan peralatan perkantoran yang diadakan	12	74.000.000	73.354.960	99,13	100
	3 Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas yang terpelihara	12	142.400.000	128.805.095	90,45	100
	4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Jumlah jenis pemeliharaan alat-alat kantor yang terpelihara	12	28.000.000	28.000.000	100,00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawaiPresentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100	32.500.000	32.500.000	100,00	
	1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	65	32.500.000	32.500.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	10.000.000			
	1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/bintek/kursus	1	10.000.000			
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	2.025.000	2.025.000	100,00	100
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen dan laporan keuangan yang dsusun	19	2.025.000	2.025.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	1.500.000	1.500.000	100,00	
	1 Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	1.500.000	1.500.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	6.000.000	6.000.000	100,00	
	1 Kegiatan pengembangan Data dan Informasi	Jumlah data/ informasi yang dikembangkan	12	6.000.000	6.000.000	100,00	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	93,66	5.680.445.000	5.320.292.215	93,66	
	1 Kegiatan Bangkit Berdaya	Jumlah usulan RT yang diakomodir	37	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	100
	2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	12	1.253.125.000	1.245.113.200	99,36	100
	3 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Persentase lokasi penertiban dalam kecamatan	12	103.790.000	103.600.000	99,82	100
	4 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	12	1.472.840.000	1.257.320.000	85,37	100
	5 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Sukakarya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	50	259.000.000	245.812.648	94,91	100
	6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukakarya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	40	111.138.000	104.560.315	94,08	100
	7 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Simpang III Sipin	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina kelurahan	50	259.000.000	183.710.250	70,93	100
	8 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	40	111.138.000	102.255.905	92,01	100
	9 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Paal Lima	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina kelurahan	50	259.000.000	250.983.847	96,90	100
	10 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Lima	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	40	111.138.000	110.838.000	99,73	100
	11 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Kenali Asam Bawah	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina kelurahan	50	259.000.000	251.703.488	97,18	100
	12 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Bawah	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina kelurahan	40	111.138.000	101.872.209	91,66	100
	13 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Kenali Asam Atas	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	50	259.000.000	252.434.353	97,47	100
	14 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Atas	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina kelurahan	40	111.138.000	110.088.000	99,06	100
JUMLAH				7.104.161.500	6.691.833.352	94,20	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

5.1.3. KECAMATAN PAAL MERAH

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai Paten	100,00%	1.181.140.392	1.060.184.325	89,76
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12,95%	141.960.000	111.616.327	78,63
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	28,11%	309.096.000	228.802.000	74,02
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya jasa kebersihan kantor	4,84%	56.799.200	56.299.740	99,12
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya alat tulis kantor	6,62%	82.436.192	82.233.008	99,75
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	1,39%	17.350.000	9.725.000	56,05
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya penerangan gedung kantor	0,76%	9.499.000	9.000.000	94,75
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya makan dan minum	5,97%	74.300.000	72.864.000	98,07
	8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Terwujudnya tenaga adm	20,07%	249.900.000	249.900.000	100,00
	9 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terwujudnya sopir kecamatan dan penjaga malam	9,06%	112.800.000	112.800.000	100,00
	10 Perjalanan Dinas	Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah	10,20%	127.000.000	126.944.250	99,96
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	503.497.450	477.990.799	94,93
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya perlengkapan gedung	14,30%	54.368.750	54.368.750	100,00
	2 Pengadaan Mebeleur	Terwujudnya mebeleur	45,91%	240.838.700	239.200.000	99,32
	3 Pengadaan Peralatan perkantoran	Terwujudnya peralatan perkantoran	14,37%	75.390.000	75.329.000	99,92
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas	23,33%	122.400.000	99.843.049	81,57
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Terwujudnya alat kantor dalam kondisi yang baik	2,10%	10.500.000	9.250.000	88,10
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100,00%	37.500.000	37.500.000	100,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas	100,00%	37.500.000	37.500.000	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan	100,00%	9.756.623	8.955.623	91,79
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya kesesuaian perencanaan	100,00%	9.756.623	8.955.623	91,79
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	4.531.090	1.500.000	33,10
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya kesesuaian perencanaan	57,33%	2.597.845	1.500.000	57,74
	2 Penyusunan rencana kerja SKPD	Terwujudnya kesesuaian perencanaan	42,67%	1.933.245		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	41.100.000	40.100.000	97,57
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas dan validitas data/Informasi	100,00%	41.100.000	40.100.000	97,57
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	89,00%	5.898.907.945	5.595.197.853	94,85

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	20,00%	1.000.000.000	997.966.050	99,80	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	75,00%	618.669.000	577.620.000	93,36	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	40,00%	113.208.945	109.537.945	96,76	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	60,00%	2.316.340.000	2.279.910.000	98,43	100
	5 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Talang Bakung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	98,84%	267.948.000	264.834.818	98,84	100
	6 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Bakung	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	97,30%	102.190.000	99.435.500	97,30	100
	7 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Payo Selincah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	81,69%	279.100.500	227.990.200	81,69	100
	8 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Payo Selincah	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	91,13%	91.037.500	82.960.900	91,13	100
	9 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Eka Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	59,34%	261.838.000	155.370.200	59,34	100
	10 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Eka Jaya	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	98,75%	108.300.000	106.950.000	98,75	100
	11 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Lingkar Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	95,93%	284.540.500	272.961.440	95,93	100
	12 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	85.597.500	85.597.500	100,00	100
	13 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Paal Merah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	85,76%	236.315.200	202.663.800	85,76	100
	14 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paal Merah	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	98,19%	133.822.800	131.399.500	98,19	100
JUMLAH				7.676.433.500	7.221.428.600	94,07	100

5.1.4. KECAMATAN TELANAIPURA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95,85%	1.217.957.000	1.167.471.173	95,85	
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran surat menyurat	100,00%	3.978.000	3.978.000	100,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	66,61%	123.600.000	82.325.173	66,61	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan	97,41%	332.600.000	323.974.000	97,41	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	99,00%	36.000.000	35.640.000	99,00	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	100,00%	85.002.000	85.002.000	100,00	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	40.000.000	40.000.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	10.500.000	10.500.000	100,00	100
	8 Penyediaan jasa makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	100,00%	37.500.000	37.500.000	100,00	100
	9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	99,92%	266.400.000	266.200.000	99,92	100
	10 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	100,00%	66.000.000	66.000.000	100,00	100
	11 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,99%	216.377.000	216.352.000	99,99	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Sarana dan Prasarana	99%	292.950.000	289.001.895	98,65	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	97.000.000	97.000.000	100,00	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	7.000.000	7.000.000	100,00	100
	3 Pengadaan Peralatan perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	100,00%	3.800.000	3.800.000	100,00	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	96,55%	51.000.000	49.238.495	96,55	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	97,73%	96.200.000	94.013.400	97,73	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	100,00%	37.950.000	37.950.000	100,00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%	48.750.000	48.750.000	100,00	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	100,00%	48.750.000	48.750.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	5.000.000			
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	-	5.000.000			
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	95,24%	2.120.000	2.019.000	95,24	100
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	95,24%	2.120.000	2.019.000	95,24	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah		2.120.000	2.120.000	100,00	
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD		2.120.000	2.120.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	2.500.000			
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	-	2.500.000			
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	96,94%	5.691.785.500	5.517.335.850	96,94	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	100,00%	1.000.000.000	999.992.130	100,00	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	99,98%	1.195.080.000	1.194.880.000	99,98	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	100,58%	88.910.000	89.425.000	100,58	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	98,67%	1.186.967.500	1.171.192.500	98,67	100
	5 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang IV Sipin	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	99,98%	283.111.420	283.057.420	99,98	100
	6 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang IV Sipin	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	88,36%	87.026.580	76.893.500	88,36	100
	7 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Buluran Kenali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	96,80%	315.078.000	304.980.000	96,80	100
	8 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Buluran Kenali	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	95,27%	55.060.000	52.455.000	95,27	100
	9 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Teluk Kenali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	77,23%	287.360.000	221.924.500	77,23	100
	10 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Kenali	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	86,65%	82.778.000	71.728.000	86,65	100
	11 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Telanaipura	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	96,53%	219.012.300	211.419.300	96,53	100
	12 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Telanaipura	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	93,05%	151.125.700	140.625.500	93,05	100
	13 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	92,19%	298.638.000	275.318.000	92,19	100
	14 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	95,66%	71.500.000	68.400.000	95,66	100
	15 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pematang Sujur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	94,89%	295.525.900	280.432.900	94,89	100
	16 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Sujur	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	74.612.100	74.612.100	100,00	100
JUMLAH				7.263.182.500	7.026.697.918	96,74	100

5.1.5. KECAMATAN DANAU TELUK

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	90,97%	1.036.864.000	943.241.354	90,97	
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran surat menyurat	100,00%	4.800.000	4.800.000	100,00	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	76,71%	90.100.000	69.116.154	76,71	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	53,04%	10.000.000	5.303.900	53,04	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan	77,68%	297.804.000	231.324.000	77,68	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100,00%	40.000.000	40.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	100,00%	48.000.000	48.000.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	47.000.000	47.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan jasa makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	100,00%	60.000.000	60.000.000	100,00	100
	10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Meningkatnya kinerja pegawai	99,51%	260.040.000	258.775.000	99,51	100
	11 Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	100,00%	54.120.000	54.120.000	100,00	100
	12 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,84%	120.000.000	119.802.300	99,84	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Sarana dan Prasarana	84%	250.350.000	209.095.250	83,52	
	1 Pengadaan Peralatan perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	61,46%	85.900.000	52.795.250	61,46	100
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	94,69%	153.450.000	145.300.000	94,69	100
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	100,00%	11.000.000	11.000.000	100,00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawaiPresentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	76,67%	39.000.000	29.900.000	76,67	
	1 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	76,67%	39.000.000	29.900.000	76,67	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00	100
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	81,64%	4.348.715.000	3.550.298.963	81,64	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	91,52%	600.000.000	549.144.672	91,52	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	99,58%	1.206.135.000	1.201.035.000	99,58	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	100,00%	76.000.000	76.000.000	100,00	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	61,98%	610.890.000	378.600.000	61,98	100
	5 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	6 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasir Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	91,39%	204.872.000	187.231.000	91,39	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	7 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	96,12%	165.266.000	158.854.000	96,12	100
	8 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tanjung Raden	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	94,84%	259.121.000	245.746.000	94,84	100
	9 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	97,25%	111.017.000	107.969.091	97,25	100
	10 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Olak Kemang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	10,32%	220.257.500	22.738.800	10,32	100
	11 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Olak Kemang	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	80,21%	149.880.500	120.219.400	80,21	100
	12 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tanjung Pasir	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	74,49%	211.971.000	157.895.000	74,49	100
	13 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	16,12%	158.167.000	25.500.000	16,12	100
	14 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Ulu Gedong	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	81,06%	259.096.600	210.026.600	81,06	100
	15 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	93,96%	111.041.400	104.339.400	93,96	100
JUMLAH				5.692.329.000	4.749.935.567	83,44	100

5.1.6. KECAMATAN JELUTUNG

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95,92%	871.309.000	835.754.254	95,92	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	93,52%	100.000.000	93.516.556	93,52	100
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	34,72%	6.400.000	2.221.900	34,72	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan	94,26%	344.000.000	324.238.800	94,26	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	98,29%	86.030.000	84.560.000	98,29	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	100,00%	82.500.000	82.500.000	100,00	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	14.994.000	14.994.000	100,00	100
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	5.650.000	5.650.000	100,00	100
	8 Penyedian jasa makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	100,00%	16.175.000	16.175.000	100,00	100
	9 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	95,26%	76.560.000	72.930.000	95,26	100
	10 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,98%	139.000.000	138.967.998	99,98	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Sarana dan Prasarana	96%	307.470.000	296.200.000	96,33	
	1 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	37.550.000	37.550.000	100,00	100
	2 Pengadaan Peralatan perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	99,98%	105.800.000	105.780.000	99,98	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	100,00%	22.540.000	22.540.000	100,00	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	88,86%	101.000.000	89.750.000	88,86	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	100,00%	14.500.000	14.500.000	100,00	100
	6 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	100,00%	26.080.000	26.080.000	100,00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%	34.000.000	34.000.000	100,00	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	100,00%	34.000.000	34.000.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	91,76%	42.500.000	39.000.000	91,76	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	91,76%	42.500.000	39.000.000	91,76	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	5.000.000	-	-	-
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	-	5.000.000	-	-	-
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	5.000.000	-	-	-
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	5.000.000	-	-	-
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	77.175.000	77.175.000	100,00	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	100,00%	77.175.000	77.175.000	100,00	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	92,24%	6.987.659.000	6.445.114.199	92,24	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	99,90%	1.000.000.000	998.997.175	99,90	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	97,75%	1.276.780.000	1.248.088.000	97,75	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	97,90%	263.158.000	257.628.300	97,90	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	89,62%	1.856.755.000	1.664.105.000	89,62	100
	5 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Payo Lebar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	94,16%	211.425.900	199.070.206	94,16	100
	6 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Payo Lebar	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	99,63%	158.712.100	158.122.500	99,63	100
	7 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Jelutung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	78,31%	256.429.875	200.818.055	78,31	100
	8 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelutung	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	98,70%	113.708.125	112.226.125	98,70	100
	9 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Handil Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	93,27%	298.471.875	278.388.395	93,27	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	10 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Handil Jaya	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	99,97%	71.666.125	71.646.000	99,97	100
	11 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Talang Jauh	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	50,56%	323.618.000	163.618.000	50,56	100
	12 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Jauh	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	98,58%	46.520.000	45.860.000	98,58	100
	13 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Cempaka Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	93,40%	240.864.500	224.959.943	93,40	100
	14 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	97,45%	129.273.500	125.977.250	97,45	100
	15 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kebun Handil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	98,83%	303.391.250	299.852.500	98,83	100
	16 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kebun Handil	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	66.746.750	66.746.750	100,00	100
	17 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Lebak Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	87,30%	306.580.875	267.655.875	87,30	100
	18 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lebak Bandung	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	96,53%	63.557.125	61.354.125	96,53	100
JUMLAH				8.330.113.000	7.727.243.453	92,76	100

5.1.7. KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95,27%	1.207.065.000	1.149.973.566	95,27	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran surat menyurat	99,75%	4.000.000	3.990.000	99,75	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	71,71%	152.400.000	109.287.866	71,71	100
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	93,87%	120.400.000	113.022.700	93,87	100
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan	99,54%	309.472.000	308.049.000	99,54	100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100,00%	29.040.000	29.040.000	100,00	100
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	100,00%	74.400.000	74.400.000	100,00	100
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	18.500.000	18.500.000	100,00	100
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	12.000.000	12.000.000	100,00	100
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	30.000.000	30.000.000	100,00	100
	10 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100,00%	12.576.000	12.576.000	100,00	100
	11 Penyediaan jasa makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	99,84%	40.000.000	39.936.000	99,84	100
	12 Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	98,16%	277.140.000	272.035.000	98,16	100
	13 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	100,00%	127.137.000	127.137.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Sarana dan Prasarana	96%	134.000.000	128.750.000	96,08	
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	8.000.000	8.000.000	100,00	100
	3 Pengadaan Peralatan perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	93,44%	80.000.000	74.750.000	93,44	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	100,00%	16.000.000	16.000.000	100,00	100
	5 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	2.010.000	2.010.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	100,00%	2.010.000	2.010.000	100,00	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	3.060.000	3.060.000	100,00	
	1 Penyusunan renstra SKPD	Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD	100,00%	3.060.000	3.060.000	100,00	100
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	97,97%	5.197.560.000	5.091.835.850	97,97	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	99,82%	1.000.000.000	998.165.350	99,82	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	98,57%	1.083.570.000	1.068.079.000	98,57	100
	3 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	98,72%	1.263.300.000	1.247.150.000	98,72	100
	4 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	97,32%	251.929.000	245.176.000	97,32	100
	5 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	90,19%	118.209.000	106.609.000	90,19	100
	6 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tambak Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	96,80%	260.983.000	252.644.400	96,80	100
	7 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambak Sari	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	109.155.000	109.155.000	100,00	100
	8 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Thehok	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	98,20%	259.347.000	254.672.000	98,20	100
	9 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Thehok	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	97,33%	110.791.000	107.830.000	97,33	100
	10 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Wijayapura	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	90,87%	259.066.000	235.412.500	90,87	100
	11 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wijayapura	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	99,19%	111.072.000	110.169.000	99,19	100
	12 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pakuan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	94,53%	244.513.500	231.149.100	94,53	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	13 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuan Baru	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	125.624.500	125.624.500	100,00	100
JUMLAH				6.553.695.000	6.385.629.416	97,44	100

5.1.8. KECAMATAN DANAU SIPIN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	97,06%	1.011.905.500	982.162.865	97,06	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	96,37%	130.000.000	125.276.331	96,37	100
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	63,48%	8.000.000	5.078.500	63,48	100
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan tim pengadaan	94,34%	318.648.000	300.599.000	94,34	100
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	94,05%	64.300.000	60.472.870	94,05	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	99,90%	60.000.000	59.940.425	99,90	100
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	99,63%	15.000.000	14.944.000	99,63	100
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	99,82%	13.000.000	12.976.000	99,82	100
	8 Penyediaan jasa makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	99,98%	35.000.000	34.993.250	99,98	100
	9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Meningkatnya kinerja pegawai	99,96%	119.425.500	119.383.500	99,96	100
	10 Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	100,00%	82.932.000	82.932.000	100,00	100
	11 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,98%	165.600.000	165.566.989	99,98	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Sarana dan Prasarana	98%	670.562.000	657.448.828	98,04	
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	98,67%	150.000.000	148.000.000	98,67	100
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	98,75%	107.500.000	106.151.854	98,75	100
	3 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	95,21%	100.000.000	95.211.500	95,21	100
	4 Pengadaan Peralatan perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	97,90%	194.102.000	190.019.000	97,90	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	99,90%	83.960.000	83.876.474	99,90	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	94,60%	15.000.000	14.190.000	94,60	100
	7 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawaiPresentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	92,54%	33.500.000	31.000.000	92,54	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	92,54%	33.500.000	31.000.000	92,54	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	10.000.000	-		
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	-	10.000.000	-		
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	99,30%	2.000.000	1.986.000	99,30	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	99,30%	2.000.000	1.986.000	99,30	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	98,13%	2.000.000	1.962.500	98,13	
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	98,13%	2.000.000	1.962.500	98,13	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	99,78%	7.000.000	6.984.500	99,78	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	99,78%	7.000.000	6.984.500	99,78	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	94,08%	5.255.032.000	4.943.888.930	94,08	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	97,86%	1.000.000.000	978.598.788	97,86	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	99,06%	1.083.772.000	1.073.633.400	99,06	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	99,70%	39.470.000	39.350.000	99,70	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	93,83%	1.281.100.000	1.202.100.000	93,83	100
	5 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sungai Putri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	78,55%	259.096.600	203.526.950	78,55	100
	6 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Putri	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	99,01%	111.041.400	109.942.375	99,01	100
	7 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Murni	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	71,48%	259.096.000	185.192.556	71,48	100
	8 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Murni	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	98,56%	111.042.000	109.443.250	98,56	100
	9 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Legok	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	96,96%	259.096.600	251.208.853	96,96	100
	10 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Legok	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	95,82%	111.041.400	106.396.400	95,82	100
	11 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Selamat	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	87,48%	239.979.800	209.930.654	87,48	100
	12 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selamat	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	95,16%	130.158.200	123.853.304	95,16	100
	13 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Solok Sipin	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	93,52%	259.096.600	242.297.000	93,52	100
	14 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Solok Sipin	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	97,64%	111.041.400	108.415.400	97,64	100
JUMLAH				6.991.999.500	6.625.433.623	94,76	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7

5.1.9. KECAMATAN PASAR JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 91,50% b. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1.128.796.000	1.032.878.479	91,50	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor 78,89%	235.000.000	185.381.879	78,89	100
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan tim pengadaan 83,02%	272.000.000	225.820.000	83,02	100
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor 100,00%	14.520.000	14.520.000	100,00	100
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai 100,00%	46.876.000	46.876.000	100,00	100
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100,00%	40.000.000	40.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga 100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai kecamatan 98,84%	10.000.000	9.884.000	98,84	100
	9 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor 99,99%	25.000.000	24.996.600	99,99	100
	10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Meningkatnya kinerja pegawai 100,00%	224.400.000	224.400.000	100,00	100
	11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti Dan Penjaga Malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor 100,00%	66.000.000	66.000.000	100,00	100
	12 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM 100,00%	160.000.000	160.000.000	100,00	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,98%	627.800.000	608.820.413	96,98	
	1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor 99,41%	17.000.000	16.900.000	99,41	100
	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor 99,13%	57.500.000	57.000.900	99,13	100
	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja 99,81%	50.000.000	49.904.250	99,81	100
	4 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor 99,51%	60.000.000	59.708.000	99,51	100
	5 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja 99,23%	112.000.000	111.140.700	99,23	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor 98,67%	10.000.000	9.867.000	98,67	100
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor 97,42%	148.800.000	144.965.563	97,42	100
	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor 100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00	100
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meningkatnya kualitas mebeleur 100,00%	8.000.000	8.000.000	100,00	100
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor 100,00%	15.000.000	15.000.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	89,83%	129.500.000	116.334.000	89,83	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	99,88%	27.500.000	27.467.000	99,88	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	99,88%	27.500.000	27.467.000	99,88	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	87,50%	20.000.000	17.500.000	87,50	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	87,50%	20.000.000	17.500.000	87,50	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	5.000.000	5.000.000	100,00	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	100%	5.000.000	5.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	5.000.000	5.000.000	100,00	
	1 Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	99,48%	30.000.000	29.844.600	99,48	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data/ informasi yang dikembangkan	99,48%	30.000.000	29.844.600	99,48	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	94,68%	3.370.042.600	3.190.775.975	94,68	
	1 Bangkit Berdaya	Jumlah usulan RT yang diakomodir	99,88%	216.000.000	215.743.100	99,88	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	99,79%	772.224.000	770.601.400	99,79	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Wilayah Kecamatan	Persentase lokasi penertiban dalam kecamatan	99,94%	40.000.000	39.976.000	99,94	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	99,11%	861.266.600	853.639.200	99,11	100
	5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	98,58%	289.000.000	284.896.025	98,58	100
	6 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Beringin	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	95,47%	81.138.000	77.461.550	95,47	100
	7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	99,66%	250.100.000	249.243.750	99,66	100
	8 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100,00%	120.038.000	120.038.000	100,00	100
	9 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	47,97%	307.350.000	147.429.075	47,97	100
	10 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100,00%	62.788.000	62.788.000	100,00	100
	11 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	99,49%	231.000.000	229.821.875	99,49	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	12 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Asam	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100,00%	139.138.000	139.138.000	100,00	100
JUMLAH				5.214.138.600	4.917.286.467	94,31	100

5.1.10. KECAMATAN JAMBI TIMUR

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	89%	1.713.555.000	1.527.549.452	89,15	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,30%	210.300.000	107.883.745	51,30	100
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	81,24%	433.740.000	352.355.000	81,24	100
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100,00%	38.960.000	38.960.000	100,00	100
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	100,00%	114.700.000	114.700.000	100,00	100
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	12.100.000	12.100.000	100,00	100
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	4.700.000	4.700.000	100,00	100
	7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlatan rumah tangga	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00	100
	8 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	99,20%	40.795.000	40.470.000	99,20	100
	9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	99,90%	547.140.000	546.590.000	99,90	100
	10 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramuhbakti Dan Penjaga Malam	Jumlah tenaga pengamanan kantor pengemudi dan penjaga malam	100,00%	93.720.000	93.720.000	100,00	100
	11 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,38%	215.000.000	213.670.707	99,38	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	93%	438.700.000	406.907.500	92,75	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	98,84%	124.000.000	122.560.000	98,84	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	3 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya kenyamanan kerja	95,97%	77.000.000	73.895.000	95,97	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	86,10%	196.000.000	168.752.500	86,10	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	100,00%	5.100.000	5.100.000	100,00	100
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja	100,00%	6.600.000	6.600.000	100,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	66.000.000	66.000.000	100,00	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	100%	66.000.000	66.000.000	100,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip perangkat daerah	90%	3.000.000	2.700.000	90,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Camat Pasar Jambi 90%	3.000.000	2.700.000	90,00	100
5	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip perangkat daerah 100%	16.000.000	16.000.000	100,00	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD 100%	12.000.000	12.000.000	100,00	100
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terpenuhinya rencana kerja SKPD 100%	4.000.000	4.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip perangkat daerah 97%	16.000.000	15.500.000	96,88	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi 97%	16.000.000	15.500.000	96,88	100
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan 45%	7.389.017.000	6.932.001.622	93,81	
	1 Bangkit Berdaya	Terwujudnya terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat 99,98%	700.000.000	699.893.400	99,98	100
	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 98,00%	1.570.340.000	1.538.865.000	98,00	100
	3 Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya kebersihan di lingkungan kecamatan 100,00%	19.400.000	19.400.000	100,00	100
	4 Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Pembinaan RT dan LPM 89,86%	1.768.035.000	1.588.840.000	89,86	100
	5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sijenjang	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 92,53%	255.293.000	236.225.806	92,53	100
	6 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sijenjang	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 99,92%	114.845.000	114.754.800	99,92	100
	7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 96,71%	259.658.000	251.126.000	96,71	100
	8 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kasang Jaya	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 98,60%	110.480.000	108.936.000	98,60	100
	9 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Talang Banjar	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 92,24%	258.844.000	238.763.153	92,24	100
	10 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Talang Banjar	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 100,00%	111.294.000	111.294.000	100,00	100
	11 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Budiman	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 99,00%	256.340.000	253.774.293	99,00	100
	12 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Budiman	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 100,00%	113.798.000	113.798.000	100,00	100
	13 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sulanjana	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 92,56%	256.132.000	237.066.306	92,56	100
	14 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sulanjana	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 98,61%	114.006.000	112.416.000	98,61	100
	15 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Kasang	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 83,53%	259.821.000	217.025.906	83,53	100
	16 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kasang	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 92,20%	110.317.000	101.717.000	92,20	100
	17 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir 92,04%	251.288.150	231.274.395	92,04	100
	18 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Sari	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan 97,71%	118.849.850	116.134.000	97,71	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	19 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Rajawali	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir	85,25%	258.588.000	220.459.063	85,25	100
	20 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rajawali	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan	78,48%	111.550.000	87.549.500	78,48	100
	21 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah sarana dan prasarana yang di akomodir	86,33%	265.374.000	229.085.000	86,33	100
	22 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Pinang	Persentase lembaga masyarakat yang dibina kelurahan	98,89%	104.764.000	103.604.000	98,89	100
JUMLAH				9.642.272.000	8.966.658.574	92,99	100

5.1.11. KECAMATAN PELAYANGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	87,99%	818.580.000	720.254.300	87,99	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	69,18%	92.400.000	63.918.500	69,18	100
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan tim pengadaan	76,79%	298.200.000	228.980.000	76,79	100
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100,00%	13.880.000	13.880.000	100,00	100
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	99,81%	67.000.000	66.869.800	99,81	100
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	38.000.000	38.000.000	100,00	100
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	100,00%	66.000.000	66.000.000	100,00	100
	8 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramuhbakti dan Penjaga Malam	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	100,00%	112.200.000	112.200.000	100,00	100
	9 Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	99,59%	120.900.000	120.406.000	99,59	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir	60%	288.510.000	271.932.700	94,25	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	100,00%	50.000.000	50.000.000	100,00	100
	2 Pengadaan Mebeleur	Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	99,26%	27.210.000	27.010.000	99,26	100
	3 Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	99,62%	53.000.000	52.800.000	99,62	100
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	87,99%	134.700.000	118.522.700	87,99	100
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00	100
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	100,00%	13.600.000	13.600.000	100,00	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	86,67%	30.000.000	26.000.000	86,67	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	86,67%	30.000.000	26.000.000	86,67	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang di memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0,66%	-	-		
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	0,66%				
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kantor Camat	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00	100
6	PROGRAM PERENCANAAN SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	4.500.000	4.500.000	100,00	
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD	100%	1.000.000	1.000.000	100,00	100
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya kesesuaian perencanaan	100%	3.500.000	3.500.000	100,00	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00%	15.520.000	15.520.000	100,00	
	1 Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas data/Informasi	100,00%	15.520.000	15.520.000	100,00	100
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	91,74%	4.746.805.000	4.354.939.501	91,74	
	1 Kegiatan Bangkit Berdaya	Terwujudnya /terciptanya infrastruktur lingkungan berbasis masyarakat	99,77%	600.000.000	598.600.000	99,77	100
	2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	97,21%	1.180.977.000	1.148.027.000	97,21	100
	3 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	99,84%	77.100.000	76.975.000	99,84	100
	4 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Tersedianya Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat	94,33%	666.900.000	629.100.000	94,33	100
	5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pembinaan RT dan LPM	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00	100
	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	66,73%	259.096.600	172.902.600	66,73	100
	7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	47,36%	111.041.400	52.585.000	47,36	100
	8 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	100,00%	259.096.600	259.096.600	100,00	100
	9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	95,95%	111.041.400	106.541.400	95,95	100
	10 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelm	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	84,54%	259.096.600	219.034.086	84,54	100
	11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelm	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	91,57%	111.041.400	101.680.000	91,57	100
	12 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	87,15%	259.096.600	225.811.790	87,15	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	FISIK (%)
1	2	3		4	5	6	7
	13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	96,93%	111.041.400	107.636.525	96,93	100
	14 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tahtul Yaman	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	100,00%	259.096.600	259.096.600	100,00	100
	15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahtul Yaman	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	100,00%	111.041.400	111.041.400	100,00	100
	16 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di akomodir	74,81%	259.096.600	193.834.100	74,81	100
	17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	82,83%	111.041.400	91.977.400	82,83	100
JUMLAH				5.904.915.000	5.394.146.501	91,35	100

LAMPIRAN II**: DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA TAHUN 2019**

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	TOP IT & TELCO Award 2019	Majalah Itech	Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME menerima penghargaan Top Inspiring e-Government Management System 2019	Jakarta, 27 Maret 2019	Walikota Jambi
2	Indonesia Innovation Award 2019	Kemrisek RI dan Asosiasi Pengusaha Teknologi Nasional (APTIKNAS)	Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME menerima penghargaan Indonesia Innovation Award 2019 untuk Program Inovasi Kampung Bantar	Jakarta, 25 April 2019	Walikota Jambi
3	Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Teraktif	Gubernur Jambi	Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Teraktif Menjaga Kestabilan Harga di Bulan Ramadan 1440 H se-Provinsi Jambi	Jambi, 27 Mei 2019	Walikota Jambi
4	Tokoh Nasional Peduli Lansia	Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita	Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME menerima penghargaan tingkat nasional sebagai Tokoh Nasional Peduli Lanjut Usia (Lansia) atas kepedulian dan dukungan penuh terhadap masyarakat lanjut usia di Kota Jambi	Bandung, 10 Juli 2019	Walikota Jambi
5	Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, AAGN Puspayoga	Ketua TP PKK Kota Jambi, Hj. Yuliana Fasha, S.E., M.Si.Ak.,Ca menerima penghargaan tingkat nasional Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM atas dedikasi dan kepedulian terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di Kota Jambi	Banyumas, 11 Juli 2019	Ketua TP PKK Kota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
6	Kota Layak Anak Tahun 2019 Kategori Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambise	Kota Jambi berhasil menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Madya atas kepedulian, integritas dan komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil terbaik bagi anak-anak di Kota Jambi.	Makassar, 23 Juli 2019	Wakil Walikota Jambi
7	Indonesia's Attractiveness Award (IAA) Kota Terbaik Sektor Pelayanan Publik Peringkat Platinum	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo]	Kota Jambi berhasil meraih penghargaan Indonesia's Attractiveness Award (IAA) untuk ketiga kalinya. Pada tahun 2019 ini, Kota Jambi dianugerahi sebagai Kota Terbaik Sektor Pelayanan Publik Peringkat Platinum	Jakarta, 23 Juli 2019	Walikota Jambi
8	TOP Eksekutif Muslim 2019	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI)	Walikota Jambi meraih penghargaan Top Eksekutif Muslim 2019 pada ajang penghargaan Top Eksekutif Muslim, Top Eksekutif Muslimah, Top Halal dan IPEMI Award 2019. Walikota Jambi dinilai berprestasi dan berperan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi muslim dan muslimah lainnya.	Jakarta, 29 Juli 2019	Walikota Jambi
9	Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama	Presiden RI, Joko Widodo	Walikota Jambi diakui oleh negara telah berjasa luar biasa mendedikasikan dirinya kepada nusa, bangsa dan negara, pada bidang atau peristiwa atau hal tertentu di luar bidang militer. Walikota Jambi diusulkan oleh Kementerian Sosial RI, atas upaya, pengorbanan, komitmen dan jasa-jasanya di bidang peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Jambi.	Jakarta, 15 Agustus 2019	Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
10	Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan	Menteri Hukum dan HAM RI	Walikota Jambi meraih penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan, atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Kota Jambi sebagai Kelurahan Sadar Hukum	Jambi, 26 Agustus 2019	Walikota Jambi
11	Penghargaan Nasional Pembina Olahraga Berprestasi	Menpora Imam Nahrawi	Walikota Jambi meraih Penghargaan Nasional sebagai Pembina Olahraga Berprestasi, pada puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-XXXVI Tahun 2019 di Kota Banjarmasin	Banjarmasin, 08 September 2019	Walikota Jambi
12	Wahana Tata Nugraha	Menhub Budi Karya Sumadi	Walikota Jambi meraih Penghargaan Nasional Piala Tata Nugraha (WTN) Tanpa Catatan atas kinerja yang baik dalam menciptakan sistem angkutan perkotaan yang tertata dan efektif di Indonesia. Penghargaan diserahkan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019 di JCC Jakarta	Jakarta, 15 September 2019	Walikota Jambi
13	Penghargaan Menteri Keuangan RI Atas Opini WTP Pemkot Jambi	Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indarwati	Walikota Jambi menerima penghargaan atas opini WTP dari Menteri Keuangan RI terhadap LKPD Pemkot Jambi Tahun 2018	Kota Jambi, 30 September 2019	Walikota Jambi
14	APKLI Award 2019	Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI)	Walikota Jambi menerima penghargaan APKLI Award Tahun 2019 atas kiprahnya dalam bidang tata kelola ekonomi kerakyatan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi	Kota Jambi, 05 Oktober 2019	Walikota Jambi
15	Natamukti	Menteri Koperasi dan UMKM RI	Walikota Jambi menerima penghargaan Natamukti Award Tahun 2019 atas kesuksesan dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di Kota Jambi	Kota Bogor, 07 Oktober 2019	Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
16	Terbaik I Kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan	Gubernur Jambi	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Terbaik I Kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan	Kota Jambi, 10 Oktober 2019	Walikota Jambi
17	Penghargaan Kehormatan Bintang Astha Hannas	Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Walikota Jambi menerima penghargaan Kehormatan Bintang Astha Hannas dari Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, atas komitmen yang tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.	Subang, 25 Oktober 2019	Walikota Jambi
18	Top 25 Leaders Seven Media Asia Awards 2019, Kategori Top Leader and Best Performance	Jaringan Seven Media Asia, Asia Global Council, The Key People Magazine, dan Clock Research and Development Center	Walikota Jambi menerima penghargaan Top 25 Leaders Seven Media Asia Awards 2019 dengan Kategori Top Leader and Best Performance, atas kegigihan, prestasi dan sumbangsih bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta pencapaian kinerja dan kepemimpinan terbaik bagi daerah	Denpasar, 01 November 2019	Walikota Jambi
19	Penghargaan The Best Leader 2019 DataGovAI 2019	Kemenkominfo RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenperin RI, Kemenko Bidang Perekonomian RI dan dari berbagai asosiasi dan enterprise dari dalam dan luar negeri, US Commercial Service di Jakarta	Walikota Jambi menerima penghargaan The Best Leader 2019 DataGovAI 2019, karena dinilai sebagai kepala daerah di Indonesia yang memberi nilai-nilai inspirasi atas dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam membangun konsep smart city melalui berbagai inovasi.	Jakarta, 06 November 2019	Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
20	Penghargaan Best Data IT Center	Kemenkominfo RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenperin RI, Kemenko Bidang Perekonomian RI dan dari berbagai asosiasi dan enterprise dari dalam dan luar negeri, US Commercial Service di Jakarta	Pemerintah Kota Jambi melalui menerima penghargaan Best Data IT Center dan The Best Data Infrastructure pada ajang penghargaan DataGovAI 2019	Jakarta, 06 November 2019	Wakil Walikota Jambi
21	Penghargaan The Best Data Infrastructure DataGovAI 2019	Kemenkominfo RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenperin RI, Kemenko Bidang Perekonomian RI dan dari berbagai asosiasi dan enterprise dari dalam dan luar negeri, US Commercial Service di Jakarta	Pemerintah Kota Jambi melalui menerima penghargaan Best Data IT Center dan The Best Data Infrastructure pada ajang penghargaan DataGovAI 2019	Jakarta, 06 November 2019	Wakil Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
22	Penghargaan Sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Kategori Sangat Baik	Menpan-RB Tjahjo Kumolo	Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih Penghargaan Sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Kategori Sangat Baik (A-), sedangkan Dinas DUKCAPIL Kota Jambi berhasil meraih penilaian dengan kategori Baik (nilai B) dan RSUD H. Abdul Manap berhasil meraih penilaian dengan kategori Baik Dengan Catatan (nilai B-)	Kota Batam, 07 November 2019	Wakil Walikota Jambi
23	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi Award 2019	Wakil Ketua Dewan Pers RI Hendri CH Bangun dan Ketua PWI Pusat H. Atal S. Depari	Walikota Jambi menerima penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi award 2019, atas kepeduliannya terhadap dunia pers	Kota Bandung, 16 November 2019	Walikota Jambi
24	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Kota Menuju Cerdas (SMART CITY)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
25	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Ekonomi Cerdas (SMART ECONOMY)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
26	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Sosial Cerdas (SMART SOCIAL)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
27	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Lingkungan Cerdas (SMART ENVIRONMENT)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
28	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Kesehatan (SMART HEALTH)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
29	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Pengembangan dan Pengelolaan Kota	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
30	Penghargaan Sebagai Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Kesiapan Integrasi (INTEGRATION RADINESS)	Rektor Institut Teknologi Bandung	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Atas kesiapan menuju Kota Pintar pada Ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019	Kota Bandung, 18 November 2019	Walikota Jambi
31	Penghargaan Sebagai Apreasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019 Kriteria Kabupaten / Kota	Ibu TP PKK Nasional Kemendagri	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan atas kinerja serta kepedulian Bunda PAUD dalam Proses Penanaman Karakter Unggul pada anak-anak usia dini di Kota Jambi	Jakarta, 18 November 2019	Ketua TP PKK Kota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
32	Penghargaan Swasti Saba Wiwerda	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan RI Dr. Terawan Agus Putranto	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan Swasti Saba (Kota Sehat) dengan Kategori Wiwerda Kota Jambi sukses mengupgrade tingkatan kualifikasi yang sebelumnya Swasta Saba Padapa (2017), Menjadi Swasti Saba Wiwerda (2019)	Jakarta, 19 November 2019	Wakil Walikota Jambi
33	Penghargaan Sebagai TOP DIGITAL Implementation 2019 on City Government #Level Star 4	Majalah IT Works	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas TOP DIGITAL Implementation 2019 on City Government #Level Star 4 pada ajang TOP DIGITAL Awards 2019 oleh Majalah IT WORKS	Jakarta, 27 November 2019	Walikota Jambi
34	Penghargaan Sebagai TOP DIGITAL Transformation Readiness 2019	Majalah IT Works	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas TOP DIGITAL Transformation Readiness 2019 pada ajang TOP DIGITAL Awards 2019 oleh Majalah IT WORKS	Jakarta, 27 November 2019	Walikota Jambi
35	Penghargaan Sebagai TOP Leader Digital Implementation 2019	Majalah IT Works	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas TOP Leader Digital Implementation 2019 pada ajang TOP DIGITAL Awards 2019 oleh Majalah IT WORKS	Jakarta, 27 November 2019	Walikota Jambi
36	Penghargaan sebagai Walikota Entrepreneur Award 2019	Philip Kotler Center For ASEAN Marketing	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas Kinerja dan Upaya Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E dalam mengembangkan kegiatan Perdagangan di Kota Jambi	Jakarta, 04 Desember 2019	Walikota Jambi
37	Penghargaan Muri 1000 Anak PAUD Tabuh Rebana	MURI	Pemerintah Kota Jambi Menerima Penghargaan atas pemecahan Rekor Muri Anak PAUD yang menabuh Rebana	Kota Jambi, 05 Desember 2019	Walikota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
38	Penghargaan Predikat terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi	KPK RI	Pemerintah Kota Jambi Menerima Penghargaan atas Kinerja dan Upaya Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME terhadap Pencegahan Korupsi di Kota Jambi	Jakarta, 9 Desember 2019	Walikota Jambi
39	Penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2018	Menteri Hukum dan HAM	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas Kinerja dan Upaya Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E terhadap kepedulian Hak Asasi Manusia di Kota Jambi	Jakarta, 05 Desember 2019	Walikota Jambi
40	Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3	Kepala BPKP RI	Pemerintah Kota Jambi Menerima penghargaan atas Kinerja dan Upaya Bapak Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E dalam Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas SPIP dari BPKP RI	Jambi, 16 Desember 2019	Wakil Walikota Jambi

LKPJ 2019



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020



Executive Summary

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA JAMBI

TAHUN 2019





WALIKOTA JAMBI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA JAMBI TAHUN 2019
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA JAMBI

SENIN, 30 MARET 2020



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi
Salam Sejahtera bagi kita semua***

Yang Terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan;

Yang Saya Hormati, Rekan-Rekan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kota Jambi;

Yang Saya Hormati Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Agama Jambi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Yang Saya Hormati, Saudara Wakil Walikota Jambi;

Yang Saya Hormati, Saudara Sekretaris Daerah Kota Jambi;

Yang Saya Hormati, Saudara Staf Ahli Walikota dan para Asisten Setda Kota Jambi;

Yang Saya Hormati, Para Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Jambi;

Yang Saya Hormati, Para Camat dan Lurah se Kota Jambi;

Yang Saya Hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita;

Yang Saya Hormati, Para Ketua Partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga Non Pemerintahan dan Insan Pers;

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada hari yang baik ketika ini, kita semua dapat menghadiri **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dengan acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2019.**

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. *Aamiin ya robbal alamiin.*

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, LKPj adalah suatu kewajiban Kepala Daerah dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama satu tahun anggaran, yang tentunya akan menjadi media evaluasi bagi kita semua.

Adapun substansi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, mencakup beberapa hal, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

PERTAMA, MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian/perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, yakni **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”**.

Dengan demikian, maka visi dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi segenap lapisan dan komponen masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam berkarya, dan menjadikannya sebagai ruh serta instrumen dalam meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan serta kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan ini.

Untuk melihat gambaran umum mengenai kinerja Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat dari Indikator Makro Daerah sepanjang tahun 2019, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); PDRB per Kapita; kondisi inflasi; serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saudara-saudara yang Saya Hormati,

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi tahun 2019 tercatat sebesar 5,33 persen, naik dari tahun 2018 yang sebesar 5,26 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi sebesar 5,33 persen ini berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional.

Adapun struktur ekonomi Kota Jambi pada tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu;

1. Perdagangan dan jasa;
2. Transportasi dan Pergudangan;
3. Industri Pengolahan;
4. Konstruksi; dan
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Pemerintah Kota Jambi terus berupaya memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa seiring upaya optimalisasi sumber-sumber potensi PAD untuk menjaga arah positif laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan.

Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 51,05 juta rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 48,25 juta rupiah.

Selain itu, kinerja pengelolaan ekonomi daerah juga ditunjukkan dengan perkembangan inflasi daerah. Inflasi Kota Jambi pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,27 persen turun dari inflasi tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,02 persen. Angka inflasi Kota Jambi tahun 2019 berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72 persen.

Selanjutnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 78,26 poin dibanding pada tahun 2018 sebesar 77,14 poin atau meningkat 1,12 poin, hal tersebut menandakan bahwa Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Pendapatan Perkapita masyarakat kota Jambi semakin baik.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

KEDUA, MENGENAI KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya, kami sampaikan bagian mengenai **Pengelolaan Keuangan Daerah** yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Banyak sudah kebijakan yang ditempuh dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik itu upaya-upaya intensifikasi, maupun yang terkait dengan ekstensifikasi; misalnya kami senantiasa mengevaluasi dan mengkaji perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang valid; menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah; mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survei lapangan terhadap objek pajak dan retribusi daerah; memverifikasi kebenaran laporan wajib pajak dan retribusi daerah; menyelesaikan keberatan wajib pajak; melakukan penagihan atas tunggakan pajak; Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan juga kerjasama pihak terkait dalam memudahkan pengawasan pembayaran pajak daerah diberbagai sektor penerimaan.

Kita juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran PBB; kemudahan dalam pembuatan SPPT PBB baru khususnya bagi pengembang perumahan di Kota Jambi. Selain itu guna mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah Kota Jambi juga melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah, bersinergi dengan KPK dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh tersebut pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan penerimaan daerah yang proporsional sesuai dengan potensi yang ada, guna meningkatkan dukungan anggaran dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Hadirin yang saya hormati,

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada Tahun 2019, **total realisasi Pendapatan Daerah** Kota Jambi dari sumber-sumber tersebut mencapai 1,65 Triliun Rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 yang sebesar 1,62 Triliun Rupiah, maka Total Realisasi Pendapatan Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 1,62% atau naik 26 Miliar Rupiah lebih.

Adapun Penerimaan dari masing-masing Pos Pendapatan tersebut meliputi:

- ◆ Target penerimaan PAD pada tahun 2019 sebesar 381,74 Miliar Rupiah, dan terealisasi sebesar 393,55 Miliar Rupiah atau 103,09 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 sebesar 338,89 Miliar Rupiah, maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13 persen atau naik 54,66 Miliar Rupiah;
- ◆ Target penerimaan Dana Perimbangan pada tahun 2019 sebesar 1,13 Triliun Rupiah, dan terealisasi sebesar 1,11 Triliun Rupiah atau 98,22 persen. Realisasi tahun 2019 ini hampir sama dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2018 yang juga sebesar 1,11 Triliun Rupiah;

- ◆ Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 sebesar 163,83 Miliar Rupiah, dan terealisasi sebesar 147,54 Miliar Rupiah atau 90,05 persen.

Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran, dengan mengedepankan kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, agenda prioritas dan target-target pembangunan daerah, potensi dan juga permasalahan, serta perkiraan situasi dan kondisi kedepan.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit, pada Tahun 2019 Belanja Daerah adalah sebesar 1,84 Triliun Rupiah lebih yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar 1,04 Triliun Rupiah dan Belanja Tidak Langsung sebesar 806,3 Miliar Rupiah.

Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2018 sebesar 1,75 Triliun Rupiah, maka Belanja Pemerintah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 5,34 persen atau 93,67 Miliar Rupiah lebih.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, masih menunggu hasil proses audit dari BPK RI, dan akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

KETIGA, MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Jambi menetapkan agenda Prioritas Pembangunan Kota Jambi pada Tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah.

Selanjutnya secara garis besar akan disampaikan berbagai program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan tugas desentralisasi baik yang bersifat wajib maupun pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, yang akan kami sampaikan berdasarkan Prirotas Pembangunan Tahun 2019.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bagian yang strategis dalam mendukung upaya kita semua untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah cara yang paling tepat dalam mengakselerasi perubahan, kemajuan dan juga tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Pembangunan Pendidikan, difokuskan guna semakin terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penerapan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, melainkan juga kemampuan interaksi sosial dan juga interpersonal, pendidikan watak dan budi

pekerti, nasionalisme, pendidikan vokasi dan ketrampilan, serta pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.

Pada Tahun 2019, untuk penyelenggaraan urusan pendidikan telah dialokasikan anggaran melalui APBD Kota Jambi sebesar 509,87 Miliar Rupiah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 378,85 Miliar Rupiah dan Belanja Langsung sebesar 131,03 Miliar Rupiah.

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 1,84 Triliun Rupiah, maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 27,58%. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009.

Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,

Urusan Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan.

Program **Jambi Cerdas** merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Jambi dalam mensukseskan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun guna mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap anak dalam meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata,

dengan sasaran peserta didik yang rawan putus sekolah dari keluarga ekonomi tidak mampu di wilayah Kota Jambi. Adapun anggaran program Jambi Cerdas pada tahun 2019 sebesar 2,28 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 1.586 siswa dari masyarakat kurang mampu di Kota Jambi.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi 2018-2023, sejumlah target indikator kinerja utama daerah dibidang pendidikan telah dapat kita capai, yakni:

- ◆ Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2019 ditargetkan 14,6 dapat kita realisasikan sebesar 14,62
- ◆ Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 21,3% dapat kita capai sebesar 21,3%
- ◆ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 20129 ditargetkan sebesar 10,68 dan dapat kita capai sesuai target yakni sebesar 10,68

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pada tahun 2019 pembangunan bidang kesehatan diarahkan guna peningkatan kemudahan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta merevitalisasi infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan

yang terkait dengan upaya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, termasuk penyediaan anggaran sebesar Rp 6,7 Miliar untuk Pembayaran Premi melalui program **Jambi Bugar** yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan bagi 24.282 masyarakat miskin dan pembayaran pengobatan pasien kurang mampu yang belum terakomodir dalam program pemerintah pusat. Untuk mendukung agar program Jambi Bugar tepat sasaran, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi program Jambi Bugar ke setiap kecamatan dalam Kota Jambi; pendataan penerima Kartu Jambi Bugar melalui ketua RT, lalu data diverifikasi oleh Dinas Dukcapil; dan selanjutnya data tersebut di *crosscheck* dengan BPJS Kesehatan untuk menghindari tumpang tindih data dengan penerima Jamksemas APBN.

Selain itu kita terus melaksanakan Peningkatan Layanan RSUD H. Abdul Manap yang saat ini sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2008, demikian juga RSUD H. Abdurrahman Sayuti di Kecamatan Danau Teluk serta tetap melanjutkan peningkatan layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tersebar dalam wilayah Kota Jambi ini.

Atas upaya dan komitmen kita semua dibidang kesehatan, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Kota Sehat tingkat “Swasti Saba Wiwerda”.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Kita sama-sama menyadari bahwa investasi merupakan bagian yang strategis dalam mendongkrak aktivitas ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja baru. Realisasi Investasi PMDN melalui

Izin Prinsip Penanaman Modal pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,055 Triliun Rupiah meningkat 93,98% dari realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp 544,01 Miliar Rupiah.

Pemerintah Kota Jambi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi diantaranya; mempermudah pengurusan perizinan, peningkatan sumber daya manusia, promosi potensi investasi, penyusunan standar operasional dan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk perizinan. Saat ini kita telah memiliki “Sistem Perizinan Online Kota Jambi” yang mengakomodir 73 jenis perizinan. Pada tahun 2019, telah diterbitkan 6.214 izin baru, izin IMB sebanyak 3.672 perizinan, izin usaha lainnya sebanyak 1.941, izin usaha perawat dan sejenisnya sebanyak 601 dan izin yang diregistrasi sebanyak 4.438 perizinan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah meraih kembali penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai *Role Model* unit penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik.

Hadirin yang saya hormati,

Peningkatan sektor koperasi dan UKM kita lakukan dengan meningkatkan daya saingnya, kemandirian, partisipasi daya inovasi dan juga kreativitas para pelaku Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Jambi, kita dapat merealisasikan target peningkatan UKM yang berkualitas sebesar

8,08% atau UKM yang berkualitas bertambah 50 unit menjadi 870 unit UKM yang berkualitas dari jumlah UKM kita sebanyak 10.763 unit. Demikian halnya dengan peningkatan Koperasi berkualitas yang realisasinya melebihi target yakni 16,50% dari target 16,06%, sehingga saat ini Koperasi yang berkualitas berjumlah 36 unit dari 218 unit koproasi aktif.

Kebijakan pembangunan sektor industri diarahkan untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan eksistensi dan pertumbuhan industri kecil dan industri rumah tangga, sehingga mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor pertanian, meskipun bukan menjadi sektor utama dalam pembentukan struktur ekonomi Kota Jambi, namun sektor ini senantiasa cukup mendapatkan perhatian yang layak dan proposional. Pada sektor pertanian, Pemerintah Kota Jambi mencoba menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau *Good Manufacturing Practise* (GMP) yang bertujuan menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen, mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan.

Dibidang social, dapat kami sampaikan bahwa jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang terlayani melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 14.661 orang, dengan total dana keseluruhan sebesar 55,3 miliar rupiah melalui dana APBN.

Selanjutnya kita juga mewisuda KPM PKH yang secara mandiri dan sukarela keluar dari penerima bantuan PKH atau Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 228 KPM. Kita berharap kedepan dapat mewisuda lebih banyak lagi KPM Graduasi Mandiri Sejahtera. Disamping itu pemerintah Kota Jambi juga terus melaksanakan program penanganan PMKS, terutama PMKS terlantar seperti anak jalanan terlantar (anak *punk*) yang bekerjasama dengan Batalyon Infanteri 142 Kesatria Jaya. Pemerintah Kota Jambi juga telah memulangkan anak jalanan terlantar sebanyak 305 orang ke tempat asalnya masing-masing.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang Terhormat,

Untuk meningkatkan kapasitas kota dan juga mendukung kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Jambi, kita semua terus memantapkan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan juga peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang baik dan memadai; yang merata dan terintegrasi dengan sistem perkotaan serta didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun hasil yang telah dicapai terkait dengan peningkatan dan pembangunan infrastruktur selama Tahun 2019 adalah :

1. Terlaksananya perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan status Kota dengan Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 89,06% atau sepanjang 454,60 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2019 baru mencapai 87,06% atau sepanjang 444,39 km.
2. Terlaksananya peningkatan drainase pada alur sekunder dan tersier, dengan Target rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 100% dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sebesar sesuai target 100% atau sepanjang 127,2 km.

3. Target cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 67,39% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2019 sebesar 69,38%.
4. Rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, berdasarkan pantauan peta citra 2013 diperoleh ratio kesesuaian ruang adalah sebesar 95% atau masih terdapat margin sebesar 5% margin bangunan yang harus ditertibkan.
5. Melalui Program Bangkit Berdaya pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton, drainase, jembatan beton, sumur, parit jalan, MCK, turap, *paving block*, posyandu dan poskamling yang tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kota Jambi.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Selain hal tersebut, hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan urusan perumahan diantaranya adalah

1. Pada tahun 2019 Luas kawasan kumuh yang ditargetkan untuk ditangani adalah seluas 32,9 Ha, mampu kita realisasikan seluas 66,05 Ha atau terealisasi 200,75%.
2. Untuk meningkatkan layanan penerangan jalan umum dan juga lampu taman, Pemerintah Kota Jambi melakukan perluasan cakupan, peningkatan estetika penerangan taman dan juga pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan fungsi LPJU dan sekaligus merespon isu pembangunan hijau berkelanjutan.

3. Pada tahun 2019 kita mampu merealisasikan penanganan 501 unit rumah tidak layak huni, dari target yang ditetapkan sebanyak 202 unit.

Dapat juga kami sampaikan bahwa saat ini Kota Jambi telah memiliki Rumah Susun Sewa di Lokasi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khusus bagi Tenaga Medis. Namun saat ini belum dapat dihuni karena masih dalam proses serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan dalam pengelolaan keamanan dan kenyamanan lalu lintas, Pemerintah Kota Jambi telah memasang 18 (delapan belas) CCTV pada simpang-simpang utama yang langsung terkoneksi ke ruang Jambi *City Operation Center* (J-COC), dan kedepannya akan terus ditambah untuk simpang-simpang yang belum terpasang. Untuk merintis pelayanan angkutan umum yang nyaman kita telah bekerjasama dengan PT. Multi Inti Digital Transport dalam penyediaan angkutan umum pintar (Koja Trans) yang melayani jalan-jalan koridor utama, sehingga diharapkan angkutan dalam kota yang lama dapat berfungsi sebagai *feeder*.

Untuk mewujudkan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen dalam menambah Ruang Terbuka Hijau, sampai saat ini kita sudah merealisasikan 60 lokasi RTH dengan luasan kurang lebih 141,42 ha.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

KEEMPAT, MENGENAI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

Selanjutnya, kami sampaikan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan selama tahun 2019, meliputi kerjasama antar daerah; kerjasama dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana; serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum kondisi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi cukup baik. Mengenai gangguan yang terjadi masih dalam skala kecil dan relatif terkendali, hal ini dapat teratasi dengan adanya operasi yustisi dan non yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi secara internal maupun secara lintas sektoral yang melibatkan beberapa OPD yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesbangpol yang berkoordinasi dengan TNI/Polri.

Kerjasama dengan pihak ketiga, baik dalam negeri maupun luar negeri sudah banyak kita laksanakan, diantaranya; APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), UCLG ASPAC (*United Cities Local Government Asia Pacific*), DELGOSEA (*Democratic Local Governance in Southeast Asia*), serta bekerjasama dengan Pemerintah Singapura melalui *Singapore Corporate Program* (SCP), dimana hingga saat ini kita telah mengirimkan kurang lebih 175 orang ASN untuk peningkatan SDM dengan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari Pemerintah Singapura.

Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah memiliki Unit Reaksi Cepat yang disiapkan untuk mempercepat *respon time* terhadap penanganan bencana.

Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami sampaikan penyelenggaraan Tugas Pembantuan, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dana Tugas Pembantuan tersebut dikucurkan untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sebesar Rp. 559.420.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 552.936.148. Dana Tugas Pembantuan tersebut digunakan untuk kegiatan:

1. Padat Karya Infrastruktur
2. Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri
3. Layanan dukungan manajemen Eselon I

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang Terhormat, hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah, berkat upaya yang sungguh-sungguh serta dukungan seluruh pihak dan terutama Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, sehingga dalam penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diatas, pada tahun 2019 kita mampu meraih 40 jenis penghargaan dan prestasi, diantaranya adalah :

- ◆ **Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama** dari Presiden Republik Indonesia atas upaya, pengorbanan, komitmen dan jasa-jasa di bidang peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Jambi.

- ♦ **Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM**, dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atas dedikasi dan kepedulian terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di Kota Jambi.
- ♦ **Wahana Tata Nugraha** dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas kinerja yang sungguh-sungguh dalam menciptakan sistem angkutan perkotaan yang tertata dan efektif di Indonesia.
- ♦ **Natamukti** dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia atas keberhasilan dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di Kota Jambi
- ♦ **Tokoh Nasional Peduli Lansia** dari Menteri Sosial Republik Indonesia atas kepedulian dan dukungan penuh terhadap masyarakat lanjut usia di Kota Jambi.
- ♦ **Penghargaan Sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Kategori Sangat Baik** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang Terhormat,

Demikianlah Ringkasan Eksekutif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, sebagai pengantar penyampaian LKPJ Tahun 2019.

Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Jambi dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur FORKOMPIMDA, dan tentunya hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan, organisasi politik dan LSM, insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh *stakeholders* sebagai mitra kerja pemerintah Kota Jambi.

Kita patut bersyukur dengan suasana damai, aman dan tentram yang kita rasakan bersama sepanjang tahun 2019 lalu, ini semua adalah berkat kiprah dan kerjasama seluruh komponen masyarakat dengan seluruh jajaran aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI di Kota kebanggaan ini.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, selaku manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan kami memohon maaf apabila di dalam menunaikan amanah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan masih belum memenuhi harapan masyarakat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua.

Akhirnya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita senantiasa memohon perlindungan, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Tanah Pilih Pesako Betuah yang kita cintai ini. *Amiin-amiin Ya Rabbal Alamin.*

Terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Executive Summary **LKPJ 2019**



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020